



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENINGKATAN DOMINASI MNC DI SEKTOR PERTANIAN
(STUDI KASUS PT.CARGILL INDONESIA)**

TESIS

BILQIS FITRIA SALSABIELA

1006743456

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM S2 DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL**

JAKARTA

JUNI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENINGKATAN DOMINASI MNC DI SEKTOR PERTANIAN
(STUDI KASUS PT.CARGILL INDONESIA)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

BILQIS FITRIA SALSABIELA

1006743456

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM S2 DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
EKONOMI POLITIK INTERNASIONAL**

JAKARTA





JUNI 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Bilqis Fitria Salsabiela
NPM : 1006743456
Program Studi : Paskasarjana Ilmu Hubungan Internasional
Judul Tesis : Peningkatan Dominasi MNC di Sektor Pertanian
(Studi Kasus PT.Cargill Indonesia)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Makmur Keliat, Ph.D ()
Ketua Sidang : Dr.Freddy Buhama Lumban Tobing, M.Si ()
Penguji Ahli : Asra Virgianita, M.A. ()
Sekretaris : Utaryo Santiko, S.Sos, M.Si ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2012

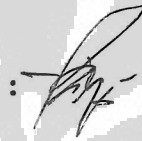
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun di rujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Bilqis Fitria Salsabiela

NPM : 1006743456

Tanda Tangan

: 

Tanggal

: 2 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bpk. Makmur Keliat, Ph.D, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Pusdatin Kementerian Pertanian yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
3. Semua narasumber pada tesis saya yang memberikan kesediaan waktunya untuk saya wawancara dan membantu saya memahami permasalahan dalam tesis saya ini. Saya mengucapkan terimakasih banyak.
4. Ibu dan kakak-kakak saya yang telah memberikan *support* atau dukungan moral yang tinggi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Sahabat-sahabat setia saya yang telah banyak membantu saya memotivasi agar segera menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 13 Juni 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Bilqis Fitria Salsabiela
NPM : 1006743456
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Departemen : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Peningkatan Dominasi MNC di Sektor Pertanian (Studi Kasus PT.Cargill Indonesia)**.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Di buat di : Jakarta

Pada Tanggal: 13 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Bilqis Fitria Salsabiela)

ABSTRAK

Nama : Bilqis Fitria Salsabiela
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Peningkatan Dominasi MNC di Sektor Pertanian
(Studi Kasus PT.Cargill Indonesia)

Tesis ini membahas mengenai 2 komoditas yang menjadi salah satu bisnis unit Cargill, yakni; komoditas kedelai dan sawit. Dalam bisnis kedelai, Cargill menjadi salah satu importir besar kedelai di dalam negeri, di dalam tesis ini akan dicermati tingkat ketergantungan Indonesia yang tinggi terhadap impor kedelai, krisis kedelai di tahun 2008, indikasi kartel serta dampak terhadap seluruh rantai bisnis berbasis kedelai. Sementara dalam komoditas sawit, akan di cermati kasus konversi lahan Hindoli-Cargill yang merupakan anak usaha Cargill serta dampaknya terhadap sektor pertanian, kedua hal ini akan menggiring pada kesimpulan sisi negatif dan positif sebuah MNC Agribisnis bernama Cargill.

Kata kunci : Pertanian, komoditas, dampak

ABSTRACT

Name : Bilqis Fitria Salsabiela
Study Program : International Relations
Title : The Increase of MNC's domination in Agribusiness Sector
(Case Study PT.Cargill Indonesia)

This thesis explain about two commodities which are Cargill's business units; grain commodities and palm oils. In Cargill grains, Cargill become one of the biggest importir in this country, so this thesis will describe the degree of indonesian's defendency of impor grains, grains crisis in 2008, cartel indication and also the impact for all the business circle in grains. And in palm oils commodities, this thesis will explain about Hindoli-Cargill conversion case and its impact to agriculture sector, these two cases will bring to the resume about a negative and positive side from Agribusiness MNC named Cargill.

Key words : Agriculture, Comodities, Impact

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Orisinalitas.....	
Halaman Pengesahan.....	
Kata Pengantar.....	
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis.....	
Abstrak.....	
Daftar Isi.....	
Daftar Gambar.....	
Daftar Tabel.....	
Daftar Lampiran.....	
1. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4. Signifikansi Penelitian.....	9
1.5. Tujuan Penelitian.....	9
1.6. Kerangka Teori.....	10
1.7. Asumsi.....	12
1.8. Hipotesis.....	12
1.9. Model Analisa.....	13
1.10. Metode Penelitian.....	14
1.11. Pembabakan.....	14
2. Peningkatan Dominasi MNC di Sektor Pertanian.....	16
2.1. MNC Agribisnis Bernama Cargill.....	16
2.2. Faktor Eksternal Penyebab Peningkatan Dominasi MNC.....	27

Universitas Indonesia

2.3. Faktor Internal Penyebab Peningkatan Dominasi MNC	31
3. PT.Cargill Indonesia Dalam Komoditas Kedelai.....	34
3.1. Tingkat Ketergantungan Impor Kedelai Yang Tinggi.....	34
3.2. Krisis Kedelai Di Tahun 2008.....	54
3.3. Indikasi Permainan Kartel.....	59
3.4. Analisa Dampak Bagi Sektor Pertanian Indonesia.....	67
3.4.1. Petani Kedelai Lokal.....	68
3.4.2. Koperasi Tahu Dan Tempe (KOPTI).....	69
3.4.3. Pengrajin Tahu Dan Tempe.....	71
3.4.4. Konsumen.....	72
4. PT.Cargill Indonesia Dalam Komoditas Sawit.....	73
4.1. Liberalisasi Perdagangan Dalam Komoditas Sawit.....	73
4.2. Konversi Lahan Sawit Di Sumatera Selatan.....	76
4.3. Kasus Hindoli-Cargill Menurut Sudut Pandang Cargill.....	78
4.4. Kasus Hindoli-Cargill Menurut Sudut Pandang LSM	82
4.5. Kasus Hindoli-Cargill Menurut Sudut Pandang Badan Pemeriksa Keuangan	84
4.6. Analisa Kasus Dan Dampak Bagi Sektor Pertanian.....	85
5. Kesimpulan.....	95
Daftar Referensi.....	102

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1.	Perkembangan Luas Panen dan Produksi Kedelai Dunia, 1961 – 2009.....	37
GAMBAR 3.2.	Negara-negara Produsen Kedelai di dunia berdasarkan kontribusi rata-rata luas panen 2005 – 2009.....	38
GAMBAR 3.3.	Negara-negara Produsen Kedelai di Dunia Berdasarkan Rata-rata Kontribusi Produksi 2005 – 2009.....	40
GAMBAR 3.4.	Kontribusi Rata-rata Volume Ekspor Kedelai 5 Negara Besar dan Indonesia, 2005 – 2009.....	40
GAMBAR 3.5.	Kontribusi rata-rata nilai ekspor kedelai 5 negara besar di dunia, 2005 -2009.....	41
GAMBAR 3.6.	Perkembangan Harga Kedelai Dunia, Tahun 1994 – 2010.....	42
GAMBAR 3.7.	Perkembangan Konsumsi Kedelai Dunia, 1993-2007.....	43
GAMBAR 3.8	Rata-rata Konsumsi Kedelai 5 (Lima) Negara Besar di Dunia dan Indonesia, 2003 -2007.....	44
GAMBAR 3.9.	Harga Produsen Kedelai di Negara Produsen Terbesar Dunia 2005 – 2009.....	45
GAMBAR 3.10.	Rata-rata Harga Produsen untuk Komoditas Kedelai di Negara Produsen, Indonesia dan Dunia, Tahun 2005 – 2009.....	46
GAMBAR 3.11.	Perkembangan Harga Kedelai Tingkat Produsen dan Konsumen di Indonesia, 1983 – 2009.....	47
GAMBAR 3.12.	Perkembangan Produksi Kedelai di Indonesia, 1970 – 2011.....	49
GAMBAR 3.13.	Perkembangan Luas Panen Kedelai di Indonesia, 1970 – 2011.....	50
GAMBAR 3.14.	Perkembangan Volume Ekspor dan Impor Kedelai di Indonesia, 1987 – 2010.....	51
GAMBAR 3.15.	Kontribusi Rata-rata Volume Impor 5 Negara Besar di Dunia dan Indonesia, 2005 – 2009.....	52
GAMBAR 3.16	Kontribusi Nilai Impor Kedelai 5 Negara Besar di Dunia dan Indonesia, 2005 -2009.....	52
GAMBAR 4.1.	Rencana Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit hingga tahun 2020.....	74
GAMBAR 4.2.	Perkebunan Hindoli-Cargill dan kawasan hutan.....	79

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.	Peranan Pertanian dan Manufaktur dalam Perekonomian Indonesia.....	2
TABEL 1.2.	Perubahan Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Selama Tahun 1999 – 2003 (%).....	3
TABEL 2.1.	Pendapatan Cargill inc	17
TABEL 2.2.	Jenis Produk Cargill & Alokasi Pemenuhan Kebutuhannya.....	18
TABEL 2.3.	Masalah-masalah Besar Yang Dihadapi Cargill.....	19
TABEL 2.4.	Tingkat Ketergantungan Impor Untuk Pangan.....	25
TABEL 2.5.	Berbagai Kebijakan yang Mendukung Pengembangan <i>Agrofuel</i> di Indonesia.....	32
TABEL 3.1.	Proyeksi Konsumsi Kedelai.....	53
TABEL 3.2.	Putusan KPPU dalam Kasus Kartel.....	64
TABEL 4.1.	Perkembangan Produksi dan Luas Areal Kelapa Sawit (2000 –2010).....	73
TABEL 4.2.	Perusahaan-perusahaan kelapa sawit pemasok CPO untuk minyak goreng tahun 2007.....	89
TABEL 4.3.	Jenis-jenis Pungutan di Sektor Kehutanan.....	92
TABEL 5.1.	Proyeksi Kebutuhan Kedelai.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 Wawancara dengan Kolega Bisnis PT.Cargill Indonesia, bertempat di Jakarta Pusat tanggal 5 Desember 2012 jam 20.55.....
- LAMPIRAN 2 Wawancara dengan Mantan Pejabat Tinggi PT.Cargill Indonesia, bertempat di Plaza Senayan tanggal 16 Januari 2012 jam 15.00.....
- LAMPIRAN 3 Wawancara dengan Achmad Yakub. Ketua Departemen Kajian dan Strategis Serikat Petani Indonesia, bertempat di kantor SPI tanggal 26 Januari 2012 jam 15.30.....
- LAMPIRAN 4 Wawancara dengan Asep Nurdin, Ketua 1 Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (GAKOPTINDO). Melalui telepon. 1 Maret 2012. Jam 11.20.....
- LAMPIRAN 5 Wawancara dengan Pejabat KPPU, bertempat di kantor KPPU tanggal 29 Februari 2012 jam 15.00.....
- LAMPIRAN 6 Wawancara dengan Staff Investigasi KPPU, bertempat di kantor KPPU, 29 Februari 2012 jam 15.30.....
- LAMPIRAN 7 Wawancara dengan Ruslan; Ketua Petani Kedelai Wilayah Jawa Timur (SPI Jatim) melalui telepon tanggal 5 Maret 2012 jam 14.35.....
- LAMPIRAN 8 Wawancara dengan Ardi; Penyalur Kedelai skala kecil bertempat di Kabupaten Cirebon, tanggal 8 April 2012 jam 12.30.....
- LAMPIRAN 9 Wawancara dengan Pengrajin tempe bertempat di Kota Kuningan, tanggal 10 April 2012 jam 11.30.....
- LAMPIRAN 10 Wawancara dengan salah satu Konsumen bertempat di Kota Kuningan tanggal 10 April 2012 jam 8.00.....
- LAMPIRAN 11 Email dari Elfian Effendi, Direktur LSM Greenomics Indonesia tanggal 26 Februari 2012.....
- LAMPIRAN 12 Wawancara dengan Mantan Pejabat BPK RI tanggal 21 Januari 2012 jam 19.46.....

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena globalisasi dan dinamikanya saat ini telah banyak mempengaruhi wajah ekonomi, sosial dan politik masyarakat, bahkan sanggup mengubah tatanan dalam konstelasi global. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga tidak mampu menahan masuknya arus globalisasi yang ternyata membawa implikasi luas dan kompleks di berbagai sendi kehidupan bernegara.

Richard Mansbach; salah seorang pakar pemerhati masalah-masalah politik internasional dengan karyanya *The Web of World Politics; Non State Actors in Global System* (1976) mengemukakan suatu asumsi menyangkut beberapa aspek penting dari realitas perubahan tatanan internasional yang dapat dikategorikan ke dalam dua perspektif; pertama, perspektif sistemik, diantaranya yaitu;¹

1. *The primacy of economic and human pursuit*, yakni telah surutnya perhatian orang kepada isu-isu politik dan keamanan, sebagai akibat meluasnya perhatian terhadap perkembangan lingkungan ekonomi.
2. *Specificity of power*, yakni perubahan-perubahan dalam sistem internasional yang berasal dari hakekat perubahan *power* dalam konteks tumbuhnya interdependensi internasional (saling ketergantungan) dan kepentingan yang saling melengkapi.
3. *Inter-relations domestic and international politics*, yakni sistem internasional kontemporer yang ditandai dengan perkembangan inter-relasi dan interdependensi antara politik domestik dan politik internasional.

Perubahan dalam sistem internasional yang disampaikan Mansbach itu tak lain adalah globalisasi dan liberalisasi perdagangan, kedua fenomena ini telah memukul perekonomian negara kita dan melahirkan persoalan yang sangat krusial. Globalisasi dan liberalisasi perdagangan menyingkirkan sekat-sekat pasar sehingga jalinan interaksinya kian terintegrasi dan menghasilkan *agregat* volume perdagangan yang bertendensi naik karena liberalisasi tidak hanya memperbesar ruang pasar

¹Drs. Yanuar Ikbar, M.A., *Ekonomi Politik Internasional 2; Implementasi Konsep dan Teori*. (Bandung; PT. Refika Aditama, 2007), h.207.

ekspor, tetapi juga serbuan komoditas impor yang kian menderas sehingga membawa dampak di berbagai sektor yang essential bagi pembangunan ekonomi Indonesia, diantaranya yakni; sektor pertanian. Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian bagi negara dunia ketiga seperti Indonesia. Hal tersebut terefleksi pada data statistik yang disajikan BPS mengenai sumbangan sektor pertanian pada PDB dan lapangan kerja yang cukup besar.

TABEL 1.1. Peranan Pertanian dan Manufaktur dalam Perekonomian Indonesia.

Tahun	Sumbangan pada PDB (%)		Sumbangan Pada Lapangan Kerja (%)	
	Pertanian	Manufaktur	Pertanian	Manufaktur
1960	53.92	8.35	n.a.	n.a.
1970	47.50	8.93	64.16	6.50
1980	30.66	15.26	55.93	9.08
1990	19.40	19.39	55.87	10.14
2000	16.63	26.83	45.28	12.96
2010	13.61*	26.16*	39.87	12.15

Sumber: Badan Pusat Statistik (berbagai publikasi), *ramalan berdasarkan proporsi pada tahun 2009;

n.a.= not available

Kontribusi sektor pertanian seperti dinyatakan dalam Tabel 1.1. tersebut memiliki tendensi menurun bersamaan dengan meningkatnya kontribusi sektor manufaktur, namun peningkatan yang terjadi di sektor manufaktur tidak secara cepat mengimbangi laju penurunan di sektor pertanian sehingga di masa sekarang atau kedepannya sektor pertanian ini masih berpotensi tinggi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Banyak penduduk terutama di pedesaan yang menggantungkan

hidupnya dari usaha tani. Pangsa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian juga masih lebih tinggi bila dikomparasikan dengan sektor industri, seperti data yang tercermin berikut ini;

TABEL 1.2. Perubahan Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Selama Tahun 1999 – 2003 (%)

Sektor	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian	43.21	45.28	43.77	49.99	51.83
Industri	12.97	12.96	13.31	0.78	0.90
Lainnya	43.82	41.76	42.92	49.23	47.27
Total	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (berbagai tahun terbitan)

Jadi di tilik dari tingkat absorpsinya, disimpulkan bahwa di Indonesia mata pencaharian sebagai buruh tani dan petani masih tergolong tinggi dan sayangnya, 90% petani Indonesia adalah petani kecil yang memiliki luas lahan 0,1-1 Ha. Simpul-simpul strategis petani sangat bergantung pada kapabilitas pemerintah untuk mengembangkan potensi dan peluang di sektor pertanian. Nampaknya sampai saat ini, Negara masih kurang mampu mengelola keunggulan potensialnya di sektor ini sehingga memunculkan aktor-aktor lain untuk terlibat, seperti; perusahaan agribisnis baik lokal maupun Multinasional (MNC).

Sesuai dengan perspektif kedua dari Mansbach, yakni; Perspektif unit, diantaranya adalah;²

1. *Stateness as variable*, yakni suatu pemikiran dari kaum tradisional tentang negara (*uniform & unitarism*) tidak dapat dibenarkan lagi secara sistemik.

² *ibid*, h.208.

2. *Significance of non-state actors*, bahwa arena internasional diisi oleh beberapa aktor, interaksi dari aktor-aktor sub nasional telah dapat melampaui batas-batas negara melalui bentuk-bentuk pengambilan keputusan internasional dan koordinasi atas aktivitas-aktivitas yang melintasi batas-batas negara baik bilateral maupun multilateral.

MNC merupakan salah satu aktor Non-Negara dan menjadi pelaku utama perubahan ekonomi dan politik internasional. Menurut pengertian dari *United Nation Economic and Social Intercessional Committee, The Impact of Transnational Corporations on the Development Process and on International Relations, New York; United Nations, 1975* menyebutkan definisi MNC sebagai berikut;³

“The MNC is an agency of direct, as opposed to portfolio, investment in foreign countries. It is not always incorporated or private. It can be a cooperative or state-owned entity. Almost every large business organization has some direct or indirect involvement with foreign countries, but only when an enterprise confronts one or more of the problems of designing, producing, marketing or financing its products or services within and among foreign nations does it become truly multinational.”

MNC sebagai perusahaan yang melakukan investasi dan operasi di banyak negara dengan tujuan untuk memperoleh pangsa pasar, kemudahan akses pada bahan-bahan mentah bagi produk-produknya dan mendapatkan profit yang tinggi. MNC jelas mempunyai *power* dalam keunggulan modal, *asset*, sumber daya atau bahkan kekuatan *lobby* yang sanggup mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah tempat MNC itu berada karena itu MNC kerap kali di sebut sebagai “*Leviathan*” atau monster.

Barnet & Muller dalam *Global Reach; The Power of Multinational Corporations* (tahun 1974); mengupas mengenai kekuatan MNC yang membuat peranan negara sebagai *state-actor* menjadi semakin berkurang, MNC memiliki

³ George A.Steiner and John F.Steiner, *Business, Government and Society A Managerial Perspective; Text and Cases*, (United States; Irwin Mc Graw-Hill, Ninth Edision. Chapter 12) h. 412.

pengaruh yang besar dalam membuat suatu keputusan serta mengemukakan sifat-sifat dasar MNC khususnya mengarah kepada motivasi ekonomi, seperti;⁴

1. Mencari keuntungan sebesar-besarnya, baik keunggulan monopolis maupun keuntungan komparatif dalam rangka mengantisipasi saingan-saingan bisnis mereka di seluruh dunia.
2. Memperluas pasar produksinya di seluruh dunia, dengan jalan menempatkan pabrik-pabriknya di lokasi pasar terdekat untuk menekan biaya transportasi hasil produk.
3. Memperoleh bahan-bahan primer sumber alam dan energi, tenaga kerja, secara murah untuk menekan faktor produksi biaya dan kebutuhan industrinya secara teratur (tidak terputus).

Dalam menjejakkan dirinya di suatu negara, MNC meninjau berbagai pertimbangan yang tentunya bertujuan untuk mendatangkan *benefit* bagi perusahaannya. Kelonggaran aturan investasi di masa lalu serta derasnya arus globalisasi menjadi gerbang bagi MNC untuk masuk ke Indonesia. Dalam *frame* liberalisasi perdagangan saat ini dengan dahsyatnya transaksi ekspor-impor dan krisis harga pangan telah menghantarkan eksistensi MNC agribisnis raksasa lintas negara yang kian menggurita.

Menurut Davis dan Goldberg, dua professor dari Harvard University, dalam buku “*A Concept of Agribusiness*” yang diterbitkan pada tahun 1957, mendefinisikan agribisnis sebagai berikut:⁵

“Agribusiness is the sum total of all operations involved in the manufacture and all distribution of farm supplies; production activities on the farm; and the storage, processing and distribution of farm commodities and items made from them.”

Agribisnis dimaknai sebagai usaha yang berkaitan dengan pertanian, sehingga MNC Agribisnis di sini dapat didefinisikan sebagai perusahaan asing

⁴ Drs. Yanuar Ikbar, M.A., *op.cit*, h.214.

⁵ Tim penulis, *Refleksi Agribisnis; 65 tahun Profesor Bungaran Saragih*, (Bogor: IPB Press. 2010), h.25.

raksasa yang mampu menghasilkan produk pertanian dalam kuantitas yang besar, memiliki manajemen yang komprehensif mengenai proses produksi sampai penyaluran atau distribusinya. MNC agribisnis di Indonesia banyak yang merupakan bagian dari rantai pasok (*Supply Chain Management* = SCM) baik bagi kebutuhan dalam negeri maupun perusahaan lain yang mempunyai *global deal* dengannya. MNC menjadi pemasok beberapa komoditas yang cukup penting bagi Indonesia, seperti; Monsanto untuk kebutuhan kapas, Cargill untuk kebutuhan gula dan kedelai, Nestle untuk kebutuhan susu formula, dll.

Mengangkat tema ‘Peningkatan Dominasi MNC di Sektor Pertanian’ adalah sebuah tantangan yang sangat berat, namun mengingat betapa pentingnya hal ini untuk di kaji lebih mendalam, maka penulis mencoba menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk tesis. Penulis akan meneliti mengenai keberadaan sebuah MNC bernama PT.Cargill Indonesia sebagai salah satu MNC agribisnis raksasa yang beroperasi di Indonesia. Menurut kolega bisnis PT.Cargill Indonesia, beliau mengemukakan bahwa Cargill merupakan perusahaan MNC yang sangat besar, di Indonesia 7 di antara 10 kapal yang berlayar mengangkut biji-bijian adalah milik Cargill.⁶

Cargill juga disebutkan oleh salah satu mantan pejabat tingginya yang berhasil di wawancarai penulis dalam suatu kesempatan mengungkapkan bahwa di Indonesia, Cargill memiliki *global deal* dengan Coca-Cola yang juga merupakan perusahaan asing milik Amerika Serikat. Coca-Cola mendapat pasokan gula salah satunya dari Cargill.⁷

Cargill mempunyai berbagai macam diversifikasi usaha pada bisnisnya, yakni; pakan ternak, biji-bijian, minyak nabati, kelapa sawit dan gula. Dalam penelitian ini, penulis memilih dua komoditas, yakni; kedelai dan sawit untuk dijadikan sebagai fokus bahasan utama dalam studi kasus PT.Cargill Indonesia ini.

⁶ Wawancara dengan Kolega Bisnis PT.Cargill Indonesia, bertempat di Jakarta Pusat tanggal 5 Desember 2012 jam 20.55 (Lampiran 1)

⁷ Wawancara dengan Mantan Pejabat Tinggi PT.Cargill Indonesia, bertempat di Plaza Senayan tanggal 16 Januari 2012 jam 15.00 (Lampiran 2)

Penulis akan berusaha mengkaji secara komprehensif, menyajikan data dan hasil wawancara dari berbagai sudut pandang untuk menghindari *anortopia* dalam menganalisa sehingga diharapkan menghasilkan kesimpulan yang benar-benar obyektif. Karena hendaknya problematika yang membelit sektor pertanian ini menjadi konsideran bagi kita dan semua pihak untuk *concern* serta memberi kontribusi solusi daripada saling menyalahkan.

1.2. Rumusan Permasalahan

Dalam studi kasus PT.Cargill Indonesia ini akan diuraikan 2 komoditas yang sangat berbeda karakteristiknya, namun masih dalam *frame* model analisa yang sama dan keduanya akan menggambar pada suatu resume penelitian ini. Perangkat aturan dari Pemerintah serta liberalisasi perdagangan itu telah mempengaruhi 2 komoditas yang vital bagi Indonesia ini; yakni komoditas kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tahu dan tempe serta komoditas sawit yang menjadi primadona ekspor bagi Indonesia.

Dalam komoditas kedelai, masih lekat dalam memori kita di tahun 2008 silam, Indonesia terhimpit masalah kelangkaan kedelai yang berimplikasi langsung pada naiknya harga kedelai yang membumbung tinggi di pasaran. Naiknya harga kedelai secara mencolok itu menimbulkan kepanikan bagi semua rantai industri dan perdagangan berbasis kedelai, beberapa importir besar seperti PT.Cargill Indonesia (CI) dan CV.Gerbang Cahaya Utama (GCU) kedatangan menimbun berton-ton kedelai di saat terjadinya kenaikan harga kedelai, meskipun importir kedelai berjumlah sangat banyak mencapai angka 303 importir, namun pemenuhan kebutuhan kedelai dalam negeri yang mencapai 70% itu hanya dikuasai oleh empat importir utama salah satunya adalah Cargill, dugaan kartel dalam kedelai begitu kuat sehingga perlu untuk diteliti karena sedikitnya jumlah para importir utama kedelai dan bagaimana implikasinya terhadap sektor pertanian Indonesia.

Sementara dalam komoditas sawit, perangkat aturan dan liberalisasi perdagangan membuat sawit menjadi primadona ekspor, namun sayangnya setengah

lahan sawit di Indonesia dikuasai oleh asing, PT.Cargill Indonesia adalah salah satunya. Sehingga di tesis ini akan di teliti mengenai kasus konversi lahan PT.Hindoli di Sungai Lilin, Palembang yang merupakan anak usaha Cargill. Menurut salah satu mantan pejabat tinggi Cargill yang berhasil penulis wawancarai itu menyatakan bahwa kasus Konversi Lahan Hindoli, posisi Cargill sebenarnya adalah sebagai korban dari birokrasi.⁸ Sementara dari LSM, seperti; Greenomics Indonesia dan Pemerintah yang gencar menyuarakan kasus konversi lahan hutan memiliki argumennya sendiri. Dengan mengkaji kedua kasus ini dari berbagai sudut pandang diharapkan dapat mendeskripsikan bagaimana aliansi tripel yang tercipta antara Negara, MNC serta anak usahanya.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana hubungan aliansi tripel antara MNC, Negara dan borjuasi lokal?
2. Bagaimana pembangunan dalam ketergantungan itu terjadi tercermin dari 2 studi kasus yang di teliti? (komoditas kedelai dan sawit)

Adapun pemilihan studi kasus pada kedua komoditas ini disebabkan oleh beberapa alasan;

- Paparan satu komoditas saja tidak cukup mencerminkan bagaimana aliansi tripel itu terjadi antara Pemerintah, MNC dan borjuasi lokal sehingga memerlukan adanya suatu komparasi dengan komoditas yang lain dalam diversifikasi unit usaha MNC sehingga kemudian dapat di tarik resume mengenai aliansi tripel dari kedua komoditas yang di angkat
- Sebagai salah satu perusahaan multinasional yang besar di Indonesia. Cargill tidak lepas dari beberapa masalah, permasalahan besar yang pernah dihadapi oleh PT.Cargill Indonesia (CI), antara lain;

⁸ Wawancara dengan Mantan Pejabat Tinggi PT.Cargill Indonesia, bertempat di Plaza Senayan tanggal 16 Januari 2012 jam 15.00 (Lampiran 2)

- Peristiwa penimbunan 13.000 ton kedelai di gudang PT.Susanti Megah Dupak Rukun, Surabaya di saat terjadi kelangkaan kedelai.
- Kasus Konversi Lahan PT.Hindoli di tahun 2005 yang dilakukan audit BPK tanggal 15 Januari 2010.

Kedua kasus ini sempat ramai dibicarakan media, beberapa saat kemudian tereduksi oleh berbagai macam pemberitaan yang lain sehingga patut untuk di teliti apakah terjadi peningkatan dominasi MNC di sektor pertanian dalam kedua komoditas tersebut.

- Diversifikasi unit usaha Cargill sangat banyak, namun di pilih dua komoditas (kedelai dan sawit) bukan gula atau pakan ternak misalnya, padahal kedua komoditas itu juga Cargill memiliki tingkat dominasi yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri, namun tidak adanya kasus yang mencuat serta tender-tender yang dimenangkan Cargill mungkin di warnai adanya indikasi lobi-lobi, namun hal tersebut sangat susah untuk dibuktikan karena ketiadaannya *direct evidence*, bahwa kebanyakan lobi-lobi di lakukan dengan cara *over the counter*. Oleh karena itu, komoditas kedelai dan sawit di pilih untuk di teliti lebih lanjut.

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini signifikan karena merupakan penelitian yang jarang dilakukan dalam studi hubungan internasional yang menyoroti tentang sektor pertanian di Indonesia. Jarang dilakukannya penelitian secara riil di bidang ini.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai maksud untuk mengkaji dampak dari keberadaan perusahaan agribisnis asing ini terhadap;

- Sektor Pertanian Indonesia. Dalam kasus kedelai implikasinya bagi petani kedelai lokal, koperasi tahu tempe, penyalur, industri tahu dan tempe serta konsumen terkait dengan aktivitas PT.Cargill Indonesia (CI) sebagai importir

utama kedelai, dalam kasus sawit adalah konversi lahan Hindoli-Cargill di Sungai Lilin, Palembang, Sumatera Selatan.

- Daya saing produk lokal versus impor, dalam hal ini adalah komoditas kedelai.
- Meneliti bagaimana hubungan ekonomi dan politik yang mencerminkan aliansi tripel dalam kasus tersebut.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teoritik yang merupakan pedoman dalam menguji data dan merupakan 'pisau' analisa untuk menelisik permasalahan ini adalah;

- *The Triple-Alliance Theory* dari Peter Evans.

Teori dependensi dari Peter Evans menjadi analisa dasar dalam pembuatan tesis ini karena teori ini paling relevan untuk menunjukkan formasi dari aliansi tripel, antara; Negara, MNC dan borjuasi lokal di negara dunia ketiga yang mengarahkan pada cengkraman 'Pembangunan dalam Ketergantungan'.⁹ Negara dalam hal ini Indonesia yang merupakan tempat MNC itu berada, sementara MNC yang di angkat dalam tesis ini adalah kasus PT.Cargill Indonesia, serta borjuasi lokal, yakni; perusahaan nasional yang menjadi anak usaha dari MNC tersebut, yaitu; PT.Hindoli sebagai anak usaha Cargill Palm Oils dalam naungan bendera PT.Cargill Indonesia.

Evans berpendapat bahwa negara berkembang situasinya tidaklah stagnan, Negara mengalami berbagai perkembangan, namun hasil dari pertumbuhan yang dicapainya tersebut dibagikan juga kepada pemodal asing serta borjuasi lokal dengan dukungan yang berasal dari kekuatan politik negara. Masyarakat kebanyakan di negara berkembang tersingkirkan dari proses pertumbuhan ini karena MNC sebagai kekuatan modal asing memiliki kekuatan yang maha dahsyat di sektor ekonomi, politik dan sosial, kekuatan MNC telah berhasil melintasi batasan politis dari pemerintahan di Negara yang ditempatinya.¹⁰

⁹ Peter Evans, *Dependent Development*, Princeton University Press (New Jersey, 1979), h.15.

¹⁰ *Ibid.*

Peter Evans juga menyatakan bahwa pada mulanya modal asing, yang masuk ke negara-negara pinggiran hanya bertujuan menguras bahan mentah dan menjual barang industri mereka.¹¹ Industrinya sendiri dibangun di negara-negara pusat, begitupula dengan Cargill yang semula hanya berkantor pusat di Minnesota, Amerika Serikat kemudian berkembang ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

Menurut Evans, pabrik-pabrik pun muncul di negara-negara pinggiran, sementara para industriawan pusat masih tetap memegang kendali dan menarik keuntungan dari proses Industrialisasi yang terjadi di negara-negara pinggiran.¹² Munculnya *dependent development* atau pembangunan dalam ketergantungan, otak yang mengendalikan operasi perusahaan-perusahaan ini secara global ada di negara-negara pusat, sedangkan cabang-cabangnya hanya boleh mengambil keputusan tentang hal-hal yang berhubungan dengan operasi perusahaan cabang lokal tersebut.¹³ Lokasi pabrik yang tersebar di seluruh dunia tidak lagi menjadi persoalan besar bagi MNC seperti Cargill karena kendali dapat tetap dipegang oleh pusat perusahaan tersebut. Menurut pengakuan salah satu kolega bisnis pejabat tinggi Cargill yang telah diwawancarai, untuk pengadaan mesin tik saja sejumlah 2 juta dan biayanya sebanyak 300.000US\$ mesti dikonsultasikan dahulu ke kantor pusatnya di Minnesota.¹⁴ Tentu saja setiap keputusan bisnis yang bersifat teknik dan krusial harus terlebih dahulu dikonsultasikan pada kantor pusatnya di Amerika Serikat.

Alasan menggunakan teori ini dibandingkan dengan teori ketergantungan lainnya adalah;

1. Ingin melihat formasi aliansi tripel yang dikemukakan oleh Evans, jelas kekuatan modal asing ada di tangan Cargill Inc. dan Pemerintah dengan berbagai macam regulasi dan kebijakan yang mengatur, serta borjuasi lokal; perusahaan-perusahaan nasional yang dibiayai dan dioperasikan oleh

¹¹ Peter Evans, *Dependent Development Theory* dalam Dr. Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta; PT.Gramedia Pustaka Utama, 1996), h.77.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wawancara dengan Kolega Bisnis PT.Cargill Indonesia, bertempat di Jakarta Pusat tanggal 5 Desember 2012 jam 20.55 (Lampiran 1)

perusahaan MNC tersebut, seperti; di sawit adalah PT.Hindoli, PT.Harapan Sawit Lestari dan PT.Indo Sawit Kekal, di kedelai adalah Cargill Grains yang berada di bawah naungan PT.Cargill Indonesia yang merupakan *host country* dari Cargill Inc. sehingga akan terlihat bagaimana hubungan ketiga aktor tersebut dalam berinteraksi.

2. Ingin mengetahui bagaimana pembangunan dalam ketergantungan itu terjadi yang tercermin pada kasus kedelai ataupun sawit yang akan di teliti.

1.7. Asumsi

PT.Cargill Indonesia dengan penerimaan bersih sebesar US\$ 2.69 miliar dan Cargill Inc sebesar 107.9 billion US\$ tentu tidak sebanding dengan pendapatan per kapita para petani lokal sebagai pelaku sektor pertanian yang merupakan masyarakat kebanyakan, seperti yang Evans sebutkan bahwa masyarakat di negara berkembang tersebut jadi tersingkirkan dari proses pertumbuhan karena MNC memiliki kekuatan *capital* yang sangat besar dan dalam sebuah kompetisi, *capital* yang besar itu akan selalu memenangkan persaingan, apalagi disparitasnya sangat jauh sementara Negara ini kurang menjatuhkan keberpihakannya pada sektor pertanian. Hal ini jelas dikeluhkan oleh para petani seperti Ruslan sebagai ketua Serikat Petani Indonesia (Petani Kedelai) wilayah Jawa Timur yang mengemukakan bahwa pemerintah cenderung berjabat tangan dengan para kapitalis sehingga para petani kurang mendapat perhatian yang cukup.¹⁵

1.8. Hipotesis

- Adanya peningkatan dominasi MNC di sektor pertanian dalam komoditas kedelai tercermin dari indikasi kartel dan spekulasi 4 importir besar kedelai di

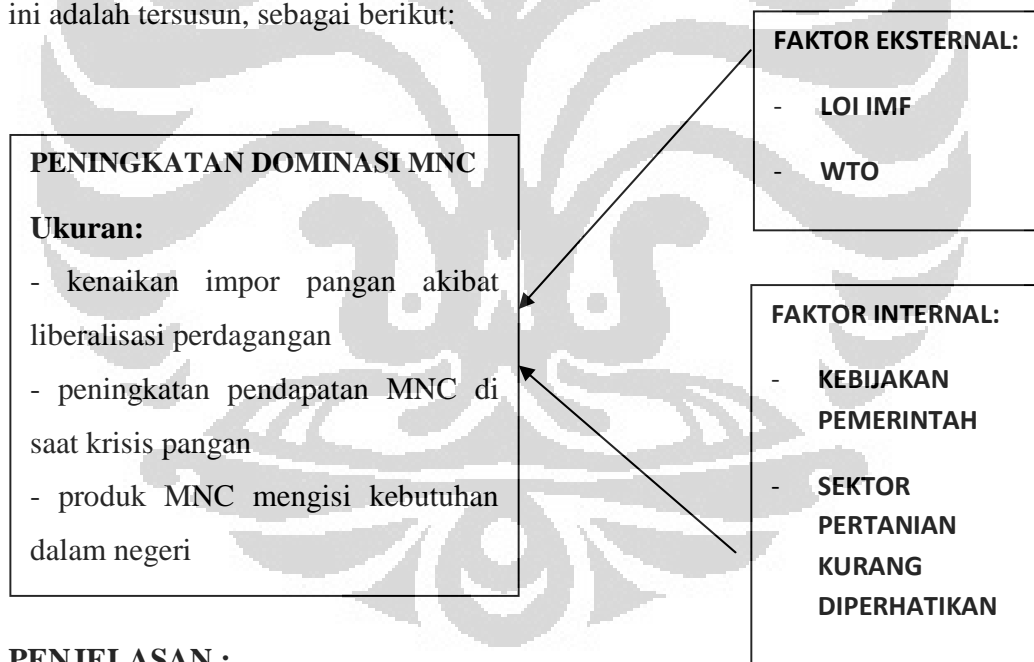
¹⁵ Wawancara dengan Ruslan; Ketua Petani kedelai Wilayah Jawa Timur (SPI Jatim) melalui telepon tanggal 5 Maret 2012 jam 14.35 (Lampiran 7)

saat krisis kedelai 2008 sehingga menyebabkan kenaikan harga yang sangat drastis serta kelangkaan kedelai di pasaran dan importir besar seperti PT.Cargill Indonesia diuntungkan dalam keadaan ini.

- Adanya peningkatan dominasi MNC di sektor pertanian dalam komoditas sawit dengan setengah lahan sawit dikuasai oleh asing termasuk Cargill akibat kurangnya peranan pemerintah menata sektor perkebunan Indonesia.
- Adanya ‘Pembangunan dalam ketergantungan’ yang terjadi pada kasus kedelai dalam hubungan MNC sebagai *host country* (PT.Cargill Indonesia) dan *home country* (Cargill Inc.)

1.9. Model Analisa

Frame penjelasan yang akan dideskripsikan dalam rancangan proposal tesis ini adalah tersusun, sebagai berikut:



PENJELASAN :

1. Peningkatan dominasi MNC di sektor pertanian dengan indikator adanya kenaikan impor pangan, peningkatan pendapatan MNC di saat krisis pangan serta produk-produk MNC yang mengisi pemenuhan kebutuhan dalam negeri, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal.

2. Faktor eksternal dengan Cargill Inc. selaku perusahaan asing raksasa mampu mempengaruhi lembaga internasional, seperti; WTO dengan aturan liberalisasi perdagangan, serta Loi IMF yang sifatnya harus dipatuhi, hal ini memudahkan MNC untuk menjual komoditas yang diperdagangkannya ke seluruh dunia sehingga terjadi pembangunan dalam ketergantungan.
3. Faktor Internal berupa kebijakan pemerintah dari serangkaian solusi dalam pemecahan masalah dalam komoditas kedelai dan sawit bertendensi mempermudah terjadinya peningkatan dominasi MNC di sektor pertanian, di tambah lagi kurangnya perhatian pemerintah terhadap sektor ini.

1.10. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara berbagai narasumber yang terkait serta observasi di lapangan. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari berbagai instansi pemerintah. Serta data sekunder yang di ambil berasal dari Google search untuk kasus-kasus PT.Cargill Indonesia, PT.Hindoli, PT.Indo Sawit Kekal dan PT.Harapan Sawit Lestari dan Youtube: *a legacy of destruction; Cargill's plantation in Borneo, 2009.*

1.11. Pembabakan

Rencana pembabakan dalam tesis ini, adalah;

BAB 1

Berisikan latar belakang, perumusan masalah, signifikansi penulisan, kerangka teori, asumsi, hipotesa, model analisis, metodologi yang digunakan.

BAB 2

Bercerita mengenai bagaimana peningkatan dominasi MNC di sektor pertanian itu terjadi, bahwa Cargill mampu menguasai pangan suatu negara disebabkan karena faktor eksternal dan internal.

BAB 3

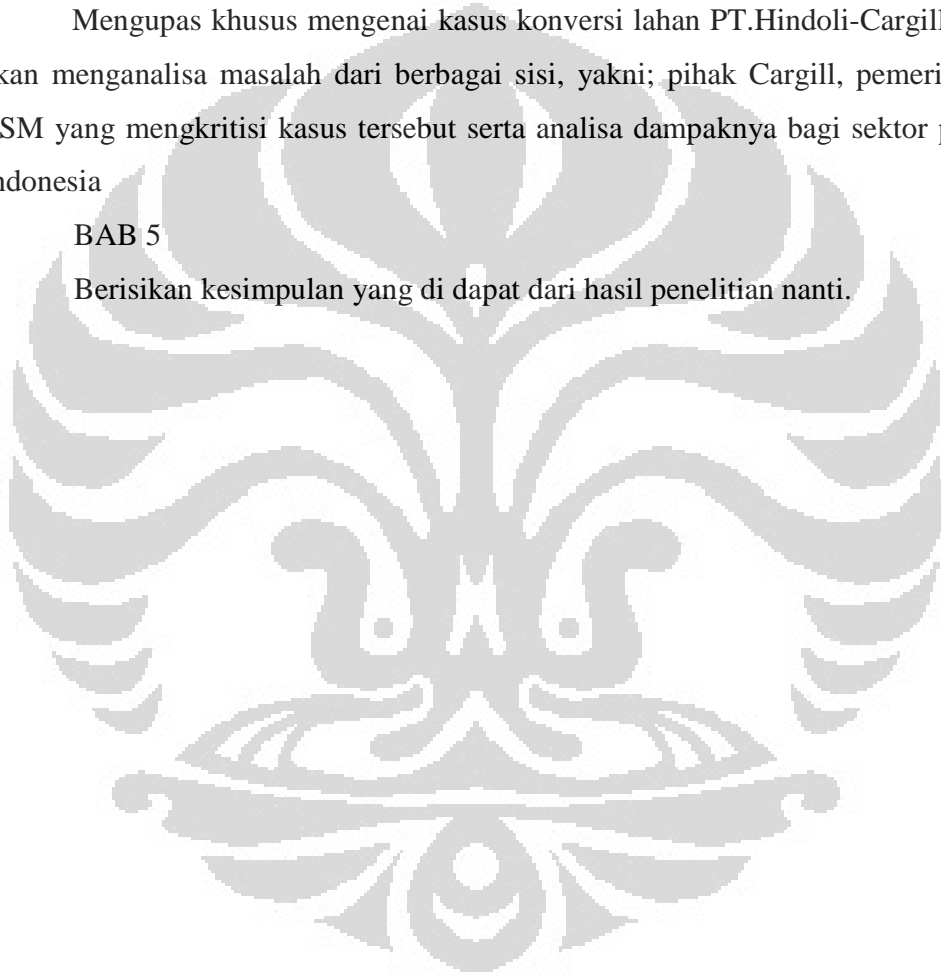
Mengupas khusus mengenai PT.Cargill Indonesia sebagai importir dalam komoditas kedelai. Krisis kedelai di tahun 2008 dan indikasi kartel yang dilakukan para importir serta dampak bagi sektor pertanian, meliputi; petani kedelai lokal, koperasi tahu tempe, produsen tahu dan tempe, dan konsumen.

BAB 4

Mengupas khusus mengenai kasus konversi lahan PT.Hindoli-Cargill, penulis akan menganalisa masalah dari berbagai sisi, yakni; pihak Cargill, pemerintah dan LSM yang mengkritisi kasus tersebut serta analisa dampaknya bagi sektor pertanian Indonesia

BAB 5

Berisikan kesimpulan yang di dapat dari hasil penelitian nanti.



BAB 2

PENINGKATAN DOMINASI MNC DI SEKTOR PERTANIAN

Meningkatnya dominasi MNC di sektor pertanian Indonesia tercermin dari berkurangnya peran negara mengatur sektor ini, pada mulanya pertanian di dorong oleh produktivitas petani lokal dalam memproduksi komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, kini trennya beralih dengan diberlakukannya liberalisasi perdagangan melalui kredo mekanisme pasar menyebabkan serbuan komoditas impor yang membanjiri tanah air, harga-harga pangan yang semula di austraki oleh negara melalui peran Bulog sebagai *public obligation*, kini dilepaskan ke pasar, liberalisasi perdagangan seolah menciptakan suatu sistem untuk meningkatkan dominasi MNC seperti Cargill yang mencari keunggulan komparatif dari bisnis yang diperdagangkannya di seluruh dunia.

2.1. MNC Agribisnis bernama Cargill

Cargill Incorporated adalah perusahaan multinasional yang di bangun secara mandiri dengan berkantor pusat di Minnetonka, Minnesota, Amerika Serikat. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1865 ini merupakan salah satu perusahaan swasta terbesar di Amerika Serikat dalam pendapatannya saat ini.

Keuntungan Cargill di catur wulan pertama tanggal 29 Februari 2008 saja telah melewati angka di atas USD 1 miliar (yakni; USD 1.3 miliar); 86% kenaikan keuntungannya itu dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan bahan pangan secara global dan semakin berkembangnya industri bahan bakar alam (biofuel) yang menyebabkan pertambahan *demand* pada bisnis inti Cargill, yaitu; komoditas dan teknologi di bidang pertanian.

Di tahun 2009, Cargill mengumumkan pendapatannya yang telah mencapai USD 116,6 miliar dan pemasukannya dari jasa yang mencapai USD 3,33 miliar pada tahun pajak 2009. Dan pada tahun 2010, pendapatannya sedikit berkurang menjadi sebesar USD 101,3 miliar serta di tahun fiskal 2011 ini, Cargill mencatat penjualan dan penerimaan lain naik lagi menjadi sebesar USD 119,5 miliar dan penerimaan

bersih Cargill adalah sebesar USD 2.69 miliar. Cargill juga sudah memiliki lebih dari 130.000 pegawai di 66 negara. Tak mengherankan lagi, jika Cargill merupakan perusahaan umum Amerika Serikat yang masuk dalam jejeran 10 perusahaan terbesar menurut versi majalah Fortune 500.

TABEL 2.1. Pendapatan Cargill Inc.

Dalam juta USD	2011	2010	Persentase Perubahan
Penjualan dan pendapatan lain	\$119,469	\$101,308	18
Pendapatan bersih	4,242*	2,603	63
Arus kas dari kegiatan bisnis	4,551	3,332	37

Sumber: www.cargill.co.id, di akses tahun 2011

Cargill yang merupakan perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki banyak diversifikasi usaha dalam bisnisnya, beberapa bisnis utama Cargill adalah perdagangan, pembelian dan distribusi serelia khususnya gandum, bahkan 25% dari total ekspor gandum Amerika Serikat berasal dari produksi Cargill. Cargill juga bergerak di banyak komoditas pertanian lainnya, seperti; perdagangan di bidang energi biofuel (*Crude Palm Oils*), baja dan transportasi pertanian, manufaktur dan penjualan dari hasil ternak serta pakan ternak (Cargill Animal Nutrition). Cargill Animal Nutrition bahkan kini telah menjadi perusahaan terbesar di bidang pertanian termasuk peternakan dan perikanan di dunia.

Perusahaan ini juga menjadi penyedia pasar daging domestik di Amerika Serikat sebesar 22%, Cargill merupakan pengeksport terbesar dibandingkan dengan perusahaan lainnya untuk berbagai macam produk pertanian bagi Argentina dan merupakan produsen hasil ternak terbanyak untuk Thailand. Selain itu, semua telur yang digunakan di restoran McDonald's di Amerika Serikat disalurkan dari peternakan milik Cargill. Ketergantungan domestik Amerika Serikat terhadap produk Cargill dapat digambarkan sebagai berikut;

TABEL 2.2. Presentase Jenis Produk Cargill dan Alokasi Pemenuhan Kebutuhannya

Presentase	Jenis Produk	Alokasi Pemenuhan Kebutuhan
25%	Gandum	Ekspor
22%	Pasar daging	Domestik
100%	Telur	McDonald's

Sumber: di olah dari www.cargill.com, di akses tahun 2011

Usaha bisnis Cargill lainnya adalah memproduksi bahan-bahan makanan yang digunakan untuk di proses lebih lanjut dalam industri makanan, seperti; pati dan sirup gula, minyak sayur dan lemak.

Cargill merupakan salah satu dari originator dan pengolah kakao terkemuka di dunia. Pelanggan Cargill, meliputi; pabrik pengolah susu, kembang gula, bakeri/roti dan pembuat es krim, yang memproduksi kue, biskuit, kembang gula dan produk lain untuk konsumen di seluruh dunia.¹⁶

Perusahaan ini juga memproduksi garam dan menjadi satu-satunya perusahaan yang memproduksi garam proses Alberger di Amerika Serikat yang bernilai yodium tinggi sehingga diminati banyak industri makanan siap-saji dan industri penyaji makanan lainnya.

Cargill pun bergerak di bidang jasa keuangan yang mengatur resiko keuangan di pasar komoditas. Di tahun 2003, Cargill dengan jasa keuangannya yang bertindak sebagai pengelola investasi global yang dikenal dengan nama Black River Asset Management memiliki jumlah harta dan kewajiban sekitar 10 miliar dolar Amerika. 2/3 saham dari perusahaan ini dimiliki oleh The Mosaic Company (sahamnya terjual habis di tahun 2011). The Mosaic Company ini merupakan salah satu *leader market*

¹⁶ www.cargill.co.id, di akses 2 November 2011 jam 11.20.

dalam dunia produksi dan pemasaran khususnya untuk produk bahan baku phosphate dan potash yang merupakan nutrisi penting bagi pertanian.

Kebesaran Cargill bukan hanya mengenai bisnisnya saja, namun Cargill juga aktif dalam berbagai sponsorship olah raga. Sejak tahun 2009/2010 Cargill telah menjadi penyandang dana utama bagi kostum sepak bola Hereford United F.C; sebuah tim yang menduduki peringkat baik ke 4 di Inggris.

Cargill sendiri didirikan pada tahun 1865 oleh William W. Cargill, ketika ia membeli sebuah rumah penghasil gandum di Conover, Iowa. Satu tahun berikutnya, Sam, saudaranya, bergabung dalam usaha tersebut dan membentuk W.W. Cargill and Brother. Mereka bekerja sama mendirikan lebih banyak rumah penghasil gandum dan membuka tempat penggilingan gandum. Dan semenjak itu, Cargill pun mengalami pasang surutnya dalam berbisnis dan kemudian berkembang menjadi besar seperti saat ini.

Cargill sebagai perusahaan raksasa telah dihadapkan pada berbagai masalah lingkungan, kontaminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Beberapa kasus yang telah dilaporkan media, antara lain;¹⁷

TABEL 2.3. Masalah-masalah besar yang di hadapi Cargill

Tahun	Masalah lingkungan, kontaminasi dan pelanggaran HAM	Kerugian dan Jumlah Korban
1970	Cargill menjual 63.000 ton bibit gandum yang dirawat menggunakan methylmercury (suatu unsur yang dilarang di banyak negara Barat) ke Basra, Irak.	Kematian pada 93 orang
2003	Cargill di Santarem, Brasil telah selesai membangun pelabuhan untuk memproses biji kedelai yang terletak di area Amazon.	Upaya Cargill itu telah mempercepat hilangnya hutan penghujan lokal.
2005	Cargill melakukan perdagangan anak yang di ambil dari Mali ke Ivory Coast dan dipekerjakan secara paksa di perkebunan coklat selama 12 sampai 14 jam sehari tanpa	Pelanggaran hak buruh dan perlindungan anak

¹⁷ www.cargill.com, di akses 2 November 2011 jam 21.00.

	bayaran, tidur dan sedikit makanan serta pemberian hukuman fisik secara terus-menerus.	
2005	Cargill juga dilaporkan sebagai pembeli terbesar untuk kapas asal Uzbekistan.	penggunaan tenaga anak di bawah umur dalam panen kapas, serta berbagai pelanggaran hak buruh di cabang mereka di Uzbekistan.
Oktober 2007	Penarikan atas produk Cargill sebanyak hampir 850.000 daging cacah beku yang dibuat di pabriknya, cabang Butler, Wisconsin.	Daging cacah tersebut diduga telah terkontaminasi oleh bakteri E.coli.
Agustus 2011	USDA dan Cargill secara bersamaan mengumumkan penarikan 36 juta ton produk daging ayam kalkun yang diproduksi oleh pabrik Cargill di Springdale, Arkansas	Adanya salmonella pada daging kalkun Cargill dan hal itu telah memakan korban 1 orang meninggal dan 76 orang menderita sakit dan data tersebut di ambil dari 26 negara bagian

Sumber : www.cargill.com, di akses tahun 2011

Di tahun 1970, Cargill menjual 63.000 ton bibit gandum yang dirawat menggunakan methylmercury (suatu unsur yang dilarang di banyak Negara Barat) ke Basra, Irak. Walaupun dimaksudkan untuk pertanian dan bukan untuk dikonsumsi manusia atau binatang, namun beberapa pengguna produk itu menggunakannya sebagai makanan karena ketidaktahuan, hal ini juga disebabkan karena satu-satunya peringatan tentang racun yang tercetak pada bungkusnya hanya tertulis dalam bahasa Inggris dan Spanyol dan ditujukan sebagai peringatan untuk para pekerja di kapal-kapal Amerika. Hal ini telah menyebabkan kematian pada 93 orang.

Di tahun 2003, Cargill di Santarem, Brasil telah selesai membangun pelabuhan untuk memproses biji kedelai yang terletak di area Amazon, hal itu secara dramatis meningkatkan produksi kedelai di area tersebut dan menurut data yang di buat oleh Greenpeace, upaya Cargill itu telah mempercepat hilangnya hutan penghujan lokal. Di bulan Februari tahun 2006, pengadilan federal di Brasil memberikan waktu enam bulan pada Cargill untuk menyelesaikan masalah

lingkungannya. Pada bulan Juli 2006, jaksa federal hampir menutup pelabuhan tersebut. Greenpeace aktif berkampanye melawan Cargill khususnya ke para penjual bahan pangan yang besar dan dengan cepat mendapatkan dukungan dari McDonald's, diikuti pedagang dari Inggris; Asda, Waitrose dan Marks & Spencer untuk berhenti membeli hasil ternak yang dibuat di pabrik kedelai Amazon. Para pedagang ini kemudian menuntut Cargill dan Archer Daniels Midland, Bunge, Andre Maggi Group dan Drefus untuk membuktikan bahwa kedelai mereka bukan dihasilkan dari area bekas hutan penghujan di Amazon. Di bulan yang sama, Juli 2006 itu Cargill dilaporkan telah menunda pembelian biji kedelai dari tanah yang merupakan bekas hutan penghujan sebagai bentuk kepatuhan hukumnya.

Di tahun 2005, *International Labor Rights Fund* yang merupakan organisasi pelindung hak-hak buruh, melontarkan tuntutan terhadap Cargill, Nestle' dan Archer Daniels Midland, dan membawanya ke pengadilan federal dengan dakwaan melakukan perdagangan anak yang di ambil dari Mali ke Ivory Coast dan dipekerjakan secara paksa di perkebunan coklat selama 12 sampai 14 jam sehari tanpa bayaran, tidur dan sedikit makanan serta pemberian hukuman fisik secara terus-menerus. Cargill juga dilaporkan sebagai pembeli terbesar untuk kapas asal Uzbekistan dan Cargill sebenarnya mengetahui kemungkinan adanya penggunaan tenaga anak di bawah umur dalam panen kapas, serta berbagai pelanggaran hak buruh di cabang mereka di Uzbekistan.

Pada bulan Oktober tahun 2007, Cargill juga mengumumkan penarikan atas produknya sebanyak hampir 850.000 daging cacah beku yang dibuat di pabriknya, cabang Butler, Wisconsin. Daging cacah tersebut diduga telah terkontaminasi oleh bakteri E.coli. Daging tersebut sebagian besar di jual di toko-toko Walmart dan Sam's Club. Dibulan Maret 2009, Badan Inspeksi dan Karantina Australia (AQIS) menutup sementara ijin ekspor Cargill cabang Australia ke Jepang dan Amerika, setelah bakteri E.coli terdeteksi di kontainer ekspor Cargill yang berasal dari pabrik di

Wagga Wagga. Akhir bulan April 2009 AQIS mencabut larangannya atas ijin ekspor Cargill Australia.

Pada bulan Agustus 2011, USDA dan Cargill secara bersamaan mengumumkan penarikan 36 juta ton produk daging ayam kalkun yang diproduksi oleh pabrik Cargill di Springdale, Arkansas karena isu adanya salmonella pada daging kalkun Cargill. Daging tersebut diketahui diproduksi periode 20 Februari sampai 2 Agustus. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mengumumkan bahwa jejak salmonella yang ditemukan tidak dapat dihilangkan dengan anti-biotik yang di jual secara umum. Pada saat itu, insiden ini memakan korban 1 orang meninggal dan 76 orang menderita sakit dan data tersebut di ambil dari 26 negara bagian. Sekitar 25 tipe daging ayam kalkun yang diproduksi menggunakan berbagai merek nama juga terkena imbasnya dan semua produk Cargill yang dicurigai terdapat kode "Est.P-963."

Cargill sebagai salah satu perusahaan multinasional asal Amerika Serikat di bidang produksi dan pemasar produk-produk pangan, pertanian dan keuangan ini mampu melewati permasalahan-permasalahan yang dihadapinya itu dan sorotan media terhadap Cargill pun kemudian menjadi surut.

Di Indonesia, Cargill memulai kegiatan bisnisnya di Indonesia pada tahun 1974 dengan mendirikan pabrik pakan ternak skala kecil di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat¹⁸. Cargill memiliki rata-rata lebih dari 10 unit usaha di setiap negara dimana Cargill berada. Beberapa diversifikasi usaha dari Cargill di Indonesia menjadi pemain besar, seperti;

- Pakan ternak atau Cargill Animal Nutrition

Cargill Animal Nutrition dalam naungan bendera PT.Cargill Indonesia menjadi perusahaan pakan ternak yang sangat besar di Indonesia, Cargill dapat menyaing perusahaan pakan ternak lainnya seperti; Comfeed.

¹⁸ www.cargill.co.id, di akses 2 November 2011 jam 11.20.

Cargill Animal Nutrition menjadi semakin besar dengan melakukan berbagai akuisisi terhadap perusahaan pakan ternak lainnya di Indonesia.

- Kakao atau Cargill Cacao

Ketertarikan Cargill Cacao membidik kakao asal Indonesia adalah keunikan yang dimiliki Cacao asal Indonesia yang tidak mudah meleleh sehingga cocok digunakan untuk *blending*. Kakao ini merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang memiliki peranan cukup penting bagi perekonomian nasional.

Cargill melihat peluang besar dari kakao sehingga ingin mendirikan sendiri industri pengolahan kakaonya di Indonesia. CI mulai mempersiapkan rencana investasinya dan mencari alternatif lokasi untuk pembangunan pabrik dan merealisasikan investasinya dalam bisnis kakao pada pertengahan 2012.¹⁹ Dengan realisasi rencana investasi Cargill Cocoa, bisnis unit Cargill ini menjadi semakin pesat berkembang.

- Biji-bijian (Serelia) atau Cargill Grains

Cargill Grains merupakan salah satu bisnis unit PT.Cargill Indonesia (CI) yang sangatlah besar. Seperti yang diungkapkan oleh kolega bisnis Cargill bahwa 7 dari 10 kapal yang berlayar di Indonesia dan mengangkut biji-bijian adalah milik Cargill. Produk serelia khususnya kedelai menjadi pemasok kebutuhan dalam negeri, di kedelai misalnya, PT.Cargill Indonesia telah menjadi salah satu importir dan pemain besar di Indonesia bahkan dengan importir besar lainnya, CI mampu menggerakkan harga kedelai di pasaran ketika terjadi kelangkaan kedelai saat krisis kedelai melanda.

- Minyak Nabati atau Cargill Oil Seeds.

¹⁹ Cargill akan bangun pabrik kakao, <http://bataviase.co.id/node/803398>, 17 September 2011. Di akses 2 November jam 12.00.

Pada tahun 1994, Cargill memulai kegiatan usaha minyak nabati di Indonesia. Cargill Indonesia (CI) menghasilkan produk minyak nabati seperti minyak kelapa sawit mentah dan memproduksi minyak kelapa mentah terutama untuk mensuplai pabrik milik Cargill yang berlokasi di Malaysia, India, China, Eropa dan AS.²⁰ PT.Cargill Indonesia dalam bisnis ini banyak melakukan ekspansi pada kegiatan produksinya, seperti mengakuisisi fasilitas pengolahan kopra di Amurang, Sulawesi Utara sehingga bisnisnya semakin maju.

- Gula atau Cargill Sugar

Cargill Sugar yang memperdagangkan gula mentah, gula putih, dan etanol.menjadi pemain besar di Indonesia untuk pasokan gula dalam negeri. Beberapa kali tender besar pengadaan gula dimenangkan oleh Cargill.

- Minyak Kelapa Sawit atau Cargill Palm Oils

Cargill Palm Oils merupakan salah satu bisnis Cargill yang besar, dengan beberapa anak usahanya, yakni; PT.Hindoli, PT.Harapan Sawit Lestari (HSL) dan PT.Indo Sawit Kekal (ISK). Cargill telah berhasil memiliki areal perkebunan kelapa sawit yang sangat luas di Indonesia, tercatat bahwa anak usahanya yang bernama PT.Harapan Sawit Lestari memiliki 13.000 ha. Bahkan setengah lahan sawit di Indonesia dikuasai oleh asing, Cargill menjadi salah satunya.

Cargill terus tumbuh berkembang dengan pesat dan bahkan saat krisis pangan yang terjadi di tahun 2008 membuat perusahaan-perusahaan MNC seperti Cargill ini meraup pendapatan yang sangat tinggi.

²⁰ www.cargill.com, di akses 2 November 2011 jam 21.00.

Profit perusahaan-perusahaan agribisnis global pun meroket, kelabilan harga pangan memberi peluang besar bagi firma agribisnis seperti Cargill, Bunge dan ADM.²¹

Pada kuartal kedua tahun 2008, Bunge memperoleh keuntungan empat kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007, hantakan harga hasil pertanian sepanjang paruh kedua tahun 2010 membantu Cargill memperoleh capaian terbaik sejak tahun 2008, yang oleh pimpinan dan CEO mereka, Greg Page dikaitkan dengan 'kebangkitan di tengah kelabilan dalam pasar pertanian'.²²

Menurut taksiran South Center (2005) 90% perdagangan produk pertanian global dikontrol oleh 5 MNC.²³ Sekitar 75% perdagangan serelia dikuasai oleh 2 MNC raksasa, yaitu Cargill dan ADM (Archer Daniels Midland).²⁴

Liberalisasi perdagangan di dunia itu kian menciptakan derasnya serbuan impor pangan yang terjadi di Indonesia. Tingkat ketergantungan pada impor pangan meningkat dari periode sebelum 1998 dan periode setelahnya, seperti tercermin dalam gambar berikut ini;

TABEL 2.1. Tingkat Ketergantungan Impor Untuk Pangan Terpilih (%)

Komoditas	Rataan 1995-97	Rataan 1998-2003
Beras	4,3	9,1
Gula	31,2	46,5 *)
Kedelai	30,3	45,7 *)
Jagung	9,3	7,8 *)

Keterangan: *) periode 1998-2002

**) periode 1998-2001

Sumber: Husein Sawit & Rusastra (2005)

²¹Robert Bailey, "Menumbuhkan Masa Depan Yang Lebih Baik", Laporan Kampanye Keadilan Ekonomi, h.29, Oxfam Internasional. Juni 2011.

²² *Ibid.*

²³ M.Husein Sawit, *Liberalisasi Pangan; Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTO*, (Depok:Lembaga Penerbit FEUI; 2007), h.31.

²⁴ *Ibid.*

Dalam komoditas kedelai, angka ketergantungan impor kedelai pun semakin tinggi, sampai saat ini pemenuhan kebutuhan kedelai dalam negeri 60-70% di penuhi dengan melakukan impor. PT.Cargill Indonesia tercatat sebagai salah satu pemain besar importir kedelai.

Sementara dalam komoditas sawit, liberalisasi perdagangan juga melahirkan kebijakan pemerintah yang gencar menggalakan komoditas sawit dengan menggenjot produksinya untuk di ekspor sehingga pemerintah membuat kebijakan ekspansi lahan sawit untuk meningkatkan produksi. Peningkatan dominasi MNC terjadi manakala Indonesia merupakan negara terbesar dalam produksi sawit, 85% produksi sawit dunia dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia. Meskipun 55% produksi sawit dunia berasal dari Indonesia, namun pada faktanya bahwa setengah lahan sawit yang ada di Indonesia dikuasai oleh asing, seperti; Malaysia, Singapura dan Amerika Serikat (Cargill menjadi salah satu pemain asing yang besar dengan perkebunan milik PT.Harapan Sawit Lestari di Kalimantan Barat), apalagi hasil yang di peroleh pemerintah belum bisa secara langsung dirasakan masyarakat, hal ini berbeda dengan komoditas pangan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Peningkatan dominasi MNC juga terjadi pada komoditas yang lain yang menjadi salah satu diversifikasi bisnis unit Cargill. Seperti komoditas gula di tahun 2003, Dari berbagai tender yang ada, Cargill International paling banyak memenangkan tender. Perusahaan ini memenangkan tender gula untuk Perum Bulog sebanyak 100.000 ton untuk sekali tender, PT RNI sebanyak 150.000 ton untuk dua kali tender.²⁵

Bulog juga kembali menunjuk Cargill sebagai pemasok gula impor sebanyak 50.000 ton setelah sebelumnya perusahaan internasional yang berpusat di Hong Kong itu memasok gula ke Bulog sebanyak 100.000 ton.²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dua bulan ke depan,gula diperkirakan masih langka, pemerintah dinilai tak berbuat, <http://www.bumn.go.id/21857/publikasi/berita/bulog-kembali-menunjuk-cargill-memasok-gula-impor/>, 23 April 2003, di akses 30 November 2011, jam 13.00.

Di Indonesia pada tahun 2009, Cargill memasok kebutuhan impor *raw sugar* (gula mentah) Indonesia sebanyak 180 ribu ton. Perusahaan perdagangan komoditas agribisnis terbesar dunia ikut tender *raw sugar* untuk PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Pasokan gula Cargill berasal dari Amerika Serikat dan sedikit dari Brasil.²⁷ Sementara pada pakan ternak misalnya, Cargill melakukan dominasinya dengan melebarkan sayap-sayap industri pakan ternaknya, Cargill menuntaskan akuisisi pada tahun 2011 atas Provimi; sebuah perusahaan nutrisi hewan global.²⁸ Dengan akuisisi tersebut, PT.Cargill Indonesia (CI) yang mempunyai saham lebih dari 50% atas Provimi memiliki hak efektif untuk mengendalikan Provimi sehingga pengendalian perusahaan tersebut berada di tangan CI. Selain itu juga, PT.Cargill Indonesia telah berhasil mengakuisisi pabrik pakan ternak di Tanjong Morawa, Medan yang bernama PT.Berlian Unggas Sakti dengan cara membeli aset fisik pabrik pakan tersebut dengan kapasitas pabrik 160.000 metrik ton per tahun.²⁹ PT.Berlian Unggas Sakti sudah terlibat dalam produksi pakan ternak dan pemeliharaan induk DOC di Medan, Sumatera Utara sejak tahun 1988 dengan sekitar 150 karyawan.³⁰ Kekuatan CI dalam melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan pakan ternak lainnya kini menjadikan Cargill Animal Nutrition (CAN) sebagai industri pakan ternak yang besar dan ternama di Indonesia.

Terjadinya peningkatan dominasi MNC di sektor pertanian memang tak bisa dilepaskan dari beberapa faktor eksternal dan internal yang menyokong terciptanya situasi tersebut.

2.2. Faktor Eksternal Penyebab Peningkatan Dominasi MNC

MNC sebesar Cargill mampu mempengaruhi kebijakan WTO selaku organisasi perdagangan internasional yang sangat kuat. Kemampuan Cargill dalam

²⁷ Market Flash eTrading, <http://mdev.detik.com/read/2009/09/14/090228/1202855/6/market-flash-etradning>, Senin, 14 September 2009 09:02 WIB. di akses 29 Desember 2011, jam 19.30.

²⁸ <http://www.cargill.com/news/releases/2011/NA3052248.jsp>, di akses 14 desember 2011 jam 15.43.

²⁹ Cargill Mengakuisi pabrik Pakan ternak di Medan, Sumatera, Indonesia.

www.cargill.co.id/.../NA3037021.jsp, di akses 7 Desember 2011 jam 13.21.

³⁰ *Ibid.*

melobi di WTO memang tidak diragukan lagi, hal ini terbukti dengan keberhasilan Cargill melobi keanggotaan China di WTO.³¹ Malahan kebijakan WTO saat ini telah menggiring liberalisasi perdagangan yang sepihak dan menunjukkan keberpihakannya pada negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (WTO tidak menindak Amerika Serikat yang melakukan proteksi dalam negeri akibat krisis, padahal hal tersebut menyalahi konsesi WTO).

Cargill adalah pendukung aktif kebijakan perdagangan bebas. Selain Cargill turut melobi dalam keanggotaan Cina di forum WTO, Cargill juga berupaya untuk meningkatkan perdagangannya dengan Kuba dan Brasil.

Cargill merupakan pendukung kuat prinsip ekonomi neoliberal sebagai bagian dari model usahanya. Disebutkan dalam website resminya itu bahwa Cargill yang berprinsip fundamentalisme pasar melakukan usahanya dengan cara,³²

Pertama, Cargill memperjuangkan penghapusan hambatan perdagangan terutama di negara-negara yang tidak terdapat cabangnya disitu sehingga hal tersebut membuat harga produk Cargill menjadi lebih murah sehingga kuantitas penjualannya dapat meningkat.

Kedua, Cargill menurunkan biaya bahan pangan bagi negara-negara berkembang yang secara teori akan memberikan pendapatan perkapita secara tidak langsung karena pendapatan yang lebih kecil nantinya akan dikembalikan ke petani lokal. Cargill mendapat keuntungan melalui peningkatan pendapatan pembeli, karena pembeli dengan pendapatan lebih baik akan terdorong untuk mengkonsumsi makan diet yang mengandung lebih banyak gandum, protein, minyak sayur dan bahan pangan yang sudah di olah. Hal ini meningkatkan kesempatan untuk Cargill dalam menjual produk-produknya.

Kesuksesan bisnis Cargill banyak di tempuh dengan memperjuangkan penghapusan hambatan perdagangan di negara tempat tujuannya, hal itu selaras dengan apa yang digaungkan oleh WTO.

³¹ www.cargill.com, di akses 2 November 2011 jam 21.00.

³² www.cargill.com, di akses 2 November 2011 jam 21.00.

WTO sebagai organisasi perdagangan internasional menyerap intisari dari Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) David Ricardo yang percaya bahwa perdagangan harus dibebaskan tanpa campur tangan dari pihak manapun, baik dari pemerintah maupun swasta, perspektif ini sejalan dengan Adam Smith yang merupakan pendukung doktrin *laissez faire-laissez passer*. Smith juga sering mengkritik kebijaksanaan kaum merkantilis yang menetapkan tarif tinggi untuk melindungi industri dalam negeri, dalam *The Wealth of Nations* dijelaskan bahwa orang tidak perlu membuat sendiri barang-barang yang kalau di beli lebih rendah harganya daripada di buat sendiri.³³ Begitu juga kalau barang-barang luar negeri lebih rendah dari barang-barang ciptaan dalam negeri, lebih baik membelinya dari luar negeri di banding membeli buatan dalam negeri yang harganya lebih tinggi.³⁴

WTO memang gencar memperjuangkan penghilangan hambatan tarif dan non tarif dalam perdagangan internasional, meningkatkan transaksi ekspor dan impor sebagai cerminan liberalisasi perdagangan, mengurangi subsidi dan proteksi dalam negeri. Ketika kebijakan WTO dapat di pengaruhi oleh MNC, maka terbukalah peluang-peluang besar bagi MNC untuk mencari keuntungan dari negara tujuannya yang merupakan anggota dari WTO tersebut.

Cargill jelas melihat adanya potensi pangan yang sangat besar di negara-negara berkembang seperti Indonesia, apalagi di tinjau dari segi banyaknya jumlah penduduk dan pendapatan perkapita sehingga MNC tersebut tertarik untuk menjejakkan dirinya. Dalam periode 1996-2002, sekitar 62% hasil ekspor pertanian Indonesia digunakan untuk impor pangan. Dan sekitar 56% total impor produk pertanian oleh Indonesia, berupa produk pangan.³⁵

Menurut Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia; Achmad Ya'kub yang diwawancarai penulis, beliau menyatakan bahwa

³³ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta; PT.Rajagrafindo Persada, 1995), h.30.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ M.Husein Sawit, *op.cit*, h.222

kurangnya *grand design* dalam sektor pertanian di Indonesia ini membuat ketidakjelasan pada program pertanian, apalagi situasi tersebut makin di perparah setelah Indonesia pada tahun 1994 mengikat diri dalam keanggotaannya di WTO (*World Trade Organization*).³⁶ Sementara aturan-aturan dalam WTO sifatnya *legally binding* alias mengikat secara hukum, kalau melanggar peraturan tersebut dapat dikenai sanksi, aturan WTO bahkan melebihi Undang-undang nasional sehingga aturan mengenai pertanian yang telah menjadi kesepakatan di WTO harus dijalankan oleh anggotanya.³⁷

Indonesia menjejaki kerangka liberalisasi dan hal itu dijembatani juga oleh kebijakan Pemerintah Paska Reformasi mengenai permasalahan pangan dengan ditandatanganinya *Letter of Intent* (LOI) IMF pada bulan Januari 1998. Salah satu butirnya adalah pencabutan subsidi.

Semenjak itu, negara kita dibanjiri oleh produk-produk impor dengan harga yang lebih murah dan bahkan mengalahkan produk lokal yang sebelumnya menjadi primadona di negeri sendiri.

IMF memberikan resep untuk mencabut subsidi dan menghapus fungsi bulog sebagai *public obligation*, saat ini bulog hanya dijadikan sebagai *State Trading Enterprise* (STE) dimana seluruh harga pangan dilepaskan berdasarkan mekanisme pasar.

Ketika dana didapatkan dari IMF, pemerintah kurang membuat sasaran program yang jelas terutama di sektor pertanian sehingga *government expenditure* yang dikeluarkan pemerintah kurang efektif dan efisien sementara harga-harga pangan sudah dilepaskan kepada pasar, Bulog sudah tidak bisa melakukan intervensi harga apapun. Harga dapat dimainkan oleh para spekulator dan profit-profit yang meroket di raup MNC di saat krisis pangan terjadi.

³⁶ Wawancara dengan Achmad Yakub. Departemen Kajian dan Strategis Serikat Petani Indonesia, bertempat di kantor SPI tanggal 26 Januari 2012 jam 15.30 (Lampiran 3)

³⁷ *Ibid.*

2.3. Faktor Internal Penyebab Peningkatan Dominasi MNC

Kebijakan pemerintah paska LoI IMF menjadi semakin terbuka. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 141/MPP/Kep/3/2002, Importir kedelai hanya membutuhkan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagai syarat melakukan impor kedelainya.³⁸ Tidak perlu lagi izin impor khusus, dan harga tentu saja dilepaskan berdasarkan mekanisme yang tercipta di pasar komoditas (*New York Merchantile Exchange*). Kedelai impor utamanya dari Cargill dan ADM ini mulai menggempur tanah air dengan harga yang lebih murah.

Apalagi di tambah dengan *beleid* dari Negara Paman Sam berupa subsidi ekspor, seperti; GSM 102 dan 103 serta PL 480. Akibat adanya subsidi tersebut, maka importir dari negara-negara lain termasuk Indonesia ini tertarik mendatangkan kedelai dari Amerika Serikat karena mendapatkan berbagai kemudahan berupa pembayaran kredit setelah tiga tahun, selain itu tanpa bunga selama enam bulan, sementara the Public Law (P.L.480) merupakan skema perdagangan pangan yang dibungkus bantuan sehingga memungkinkan USDA memberi subsidi ekspor tanpa takut di sebut sebagai praktek *dumping*. Faktor-faktor tersebut telah menekan daya saing produk lokal sehingga kalah dengan keberadaan kedelai impor yang semakin *exist* digunakan bukan hanya di perkotaan, namun juga telah merambah ke area pedesaan.

Sementara itu, kebijakan pemerintah yang lain adalah mendukung peningkatan produksi *Crude Palm Oils* dengan melakukan ekspansi lahan sawit, penyusutan lahan utamanya kedelai yang beralih pada sawit kian menjadi-jadi. Berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan *Agrofuel* di Indonesia, seperti dalam tabel di bawah ini:

³⁸ Departemen Perdagangan, Himpunan Regulasi di Bidang Impor Tahun 1997-2007, (Jakarta; Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; 2008), h.85.

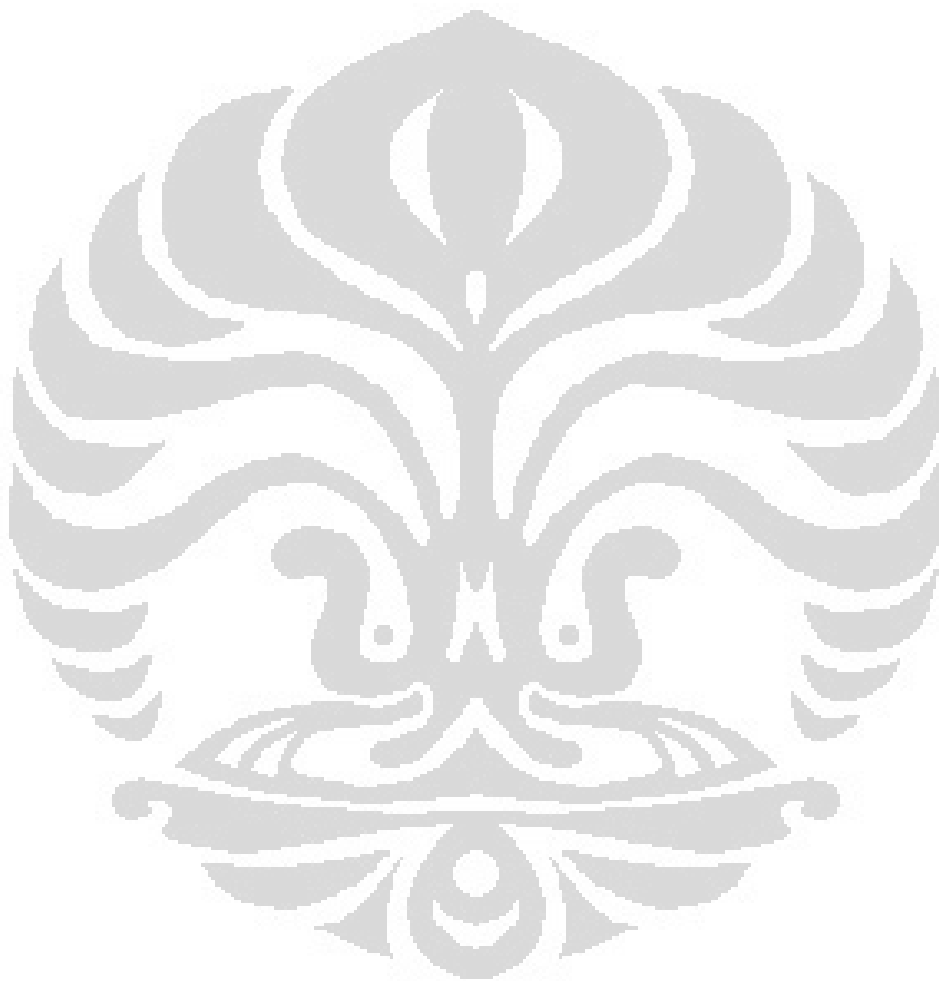
**TABEL 2.2. Berbagai Kebijakan yang Mendukung
Pengembangan Agrofuel di Indonesia**

Tahun	Kebijakan	Peraturan Mengenai
2006	Peraturan Presiden No.5	Kebijakan Energi Nasional
	Instruksi Presiden No.1	Persyaratan dan Penggunaan Agrofuel sebagai bahan bakar alternatif
	Peraturan Menteri Pertanian No.33	Pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan
	Peraturan Menteri Keuangan No.117	Kredit untuk pengembangan Agro-energi dan revitalisasi perkebunan
2007	Undang-undang no.25	Investasi
	Peraturan Menteri Pertanian No.26	Petunjuk mengenai ijin perkebunan
	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.51	Kriteria dan Petunjuk pelaksanaan untuk pedagang agrofuel sebagai bahan bakar alternatif
2008	Keputusan Dirjen Minyak dan Gas No.13A83	Standarisasi dan spesifikasi mengenai biofuel jenis biodiesel sebagai bahan bakar alternatif untuk pasar dalam negeri

Sumber: di olah dari data Serikat Petani Indonesia, 2011

Dari pola aliansi tripel yang terjadi, Pemerintah selaku negara tuan rumah secara tidak langsung menerapkan *beleid* yang mempermudah bisnis MNC beroperasi, seperti dalam kedelai, misalnya; kemudahan importir melakukan impor kedelainya tanpa ijin impor khusus, hanya nomor pengenal importir khusus saja sehingga memudahkan PT.Cargill Indonesia sebagai salah satu importir kedelai dalam mengoperasikan bisnis kedelainya di Indonesia, hal ini di dukung oleh negara tuan rumah tempat MNC itu berada, yakni; Amerika Serikat yang menerapkan

bantuan kredit untuk membantu memperlancar distribusi kedelainya yang mengalami surplus sangat luar biasa di negaranya itu. Hal ini membuat para importir kedelai di Indonesia tertarik mendatangkan kedelai impornya dari Amerika sehingga terciptalah ketergantungan impor kedelai yang sangat tinggi.



BAB 3 PT.CARGILL INDONESIA DALAM KOMODITAS KEDELAI

3.1. Tingkat Ketergantungan Impor Kedelai Yang Tinggi

Cargill memulai bisnisnya di Indonesia dengan mengimpor kedelai pada tahun 1999 berdasarkan perjanjian suplai jangka panjang dengan sebuah koperasi lokal berskala besar yang beranggotakan pabrik tahu dan tempe di Indonesia.³⁹

Sesuai dengan pernyataan Asep Nurdin selaku Ketua 1 Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia yang telah diwawancarai. KOPTI di Kota Leuwih Panjang, Bandung, Jawa Barat mengakui bahwa pasokan kedelainya itu kadang-kadang berasal dari Cargill Indonesia (CI) dan Gerbang Cahaya Utama (GCU), atau importir yang lain, hal itu tergantung pada permintaan para anggota dan harga yang paling sesuai dengan daya beli. CI dan GCU memang menguasai *market power* kedelai di Indonesia saat ini.⁴⁰

Kegiatan bisnis Cargill yang meliputi impor, pembongkaran, pembersihan, penyimpanan dan distribusi kedelai kepada pelanggan. Di seluruh rantai suplai, Cargill berkomitmen pada kualitas dan keamanan produk pada tingkat yang tinggi dengan mengantongi sertifikat HACCP yang meliputi keamanan dalam segi pembongkaran dari kapal dan penyimpanan, termasuk penyeleksian, pengemasan dan distribusi kedelai, bungkil kedelai, jagung dan penanganan kargo peti kemas.⁴¹

Dan menurut pernyataan Asep Nurdin, para importir kedelai yang besar, seperti; GCU, CI, SB mengambil kedelai dari kapal untuk di olah lebih lanjut, mereka mengolah dan membersihkan kedelai terlebih dulu, kemudian di pasang merk, misalnya; Cargill dengan merk Pelangi, GCU dengan merk Bola Merah, hal itu akan mempengaruhi harga sehingga harga kedelai antar importir menjadi tidak sama.⁴²

³⁹ www.cargill.co.id, di akses 2 November 2011 jam 21.39.

⁴⁰ Wawancara dengan Asep Nurdin, Ketua 1 Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (GAKOPTINDO). Melalui telepon. 1 Maret 2012. Jam 11.20 (Lampiran 4)

⁴¹ www.cargill.co.id, di akses 2 November 2011 jam. 21.39.

⁴² Wawancara dengan Asep Nurdin, Ketua 1 Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia (GAKOPTINDO). Melalui telepon. 1 Maret 2012. Jam 11.20 (Lampiran 4)

Agar dapat mendukung kegiatan rantai suplai Cargill di Indonesia ini, Cargill mengoperasikan dua fasilitas penyimpanan utama untuk biji-bijian di Cigading, Jawa Barat dan di Surabaya, Jawa Timur tepatnya di Jalan Dupak Rukun 71-73 di gudang milik PT.Susanti Megah.⁴³

Menurut salah satu mantan pejabat tinggi PT.Cargill Indonesia yang diwawancarai, beliau mengungkapkan bahwa Cargill benar adalah salah satu importir utama kebutuhan kedelai dalam negeri dan sebenarnya Cargill tidak merugi apabila tidak menjadi salah satu importir kedelai di Indonesia, namun keadaan di dalam negeri yang terjadi kekurangan stok kedelai membuat Cargill yang merupakan perusahaan asing dengan bisnis unit biji-bijian/serelia mendaftarkan diri untuk menjadi salah satu importir kedelai, Cargill melakukan hal ini karena memang ada kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa terpenuhi sehingga diperlukannya kehadiran para importir kedelai.

Pada perkembangannya, Cargill kemudian menjadi salah satu pemain utama dikarenakan kualitas kedelainya dan adanya kekurangan stok kedelai di Indonesia. PT.Cargill Indonesia (CI) mendapatkan sebagian besar stok kedelainya dari perusahaan induknya yang bernama Cargill Inc di Amerika Serikat.⁴⁴

Beberapa situasi juga dapat menjelaskan mengapa perusahaan seperti Cargill Inc. menjadi pemain utama dalam bisnis kedelai dunia dan bagaimana para importir utama kedelai khususnya PT.Cargill Indonesia menjadi dominan serta menguasai mata rantai kedelai di Indonesia pada tahun 2007-2008. Hal itu terbagi dalam kedua kondisi, yakni;

1. Kondisi Internasional

Negara induk dimana Cargill Inc. berada, yakni Amerika Serikat menduduki peringkat pertama sebagai produsen kedelai, juga luas panen serta produksi kedelai di dunia sehingga menunjukkan nilai dan volume ekspor kedelai yang tinggi dan

⁴³ *Koran Tempo*, "Ada 'Gunung Kedelai' di Surabaya", <http://www.wikimu.com//News.aspx?id=6128>, 26 Januari 2008, di akses 5 Desember 2011 jam 12.00.

⁴⁴ Wawancara dengan Mantan Pejabat Tinggi PT.Cargill Indonesia, bertempat di Plaza Senayan tanggal 16 Januari 2012 jam 15.00 (Lampiran 2)

menempatkan Amerika Serikat sebagai pemasok kedelai yang utama, Amerika memang sedang merajai produksi kedelainya, apalagi pada tahun 2000, produksi kedelai Amerika Serikat melimpah sehingga sulit untuk menampung panen kedelai petaninya dan untuk menjaga insentif para petani kedelainya, Pemerintah AS melalui USDA (*United State Departement of Agriculture*) meluncurkan kredit ekspor, GSM 102.⁴⁵

Sejak tahun 1970-an Amerika Serikat sudah sangat serius di bidang pertanian dan industri kedelai. Berdasarkan penelitian American Soybean Association tersebut bahwa kedelai akan menjadi “emasnya tanah” (*the gold of soil*) dan sumber protein masa depan (*the future protein of the world*).⁴⁶

Karena pasokannya yang surplus tersebut, maka Amerika Serikat mengekspor surplus kedelainya ke Indonesia dengan memberikan kredit GSM 102 itu di tahun 2000 sebesar 12 juta dollar AS dan tahun 2001 sebesar 750 juta dollar AS, fasilitas kredit khusus diberikan kepada para importir kedelai Indonesia.⁴⁷ Sehingga banyak importir kedelai di tanah air yang mendatangkan kedelai Amerika karena berharga lebih murah Rp 1.950,- daripada kedelai lokal dengan harga Rp 2.500,-, tentu saja kedelai lokal jadi kalah bersaing dan petaninya enggan menanam kedelai.⁴⁸

Selain itu, ditunjang pula dengan prakondisi dimana harga kedelai dunia mencapai angka yang tertinggi di tahun 2008 dan perkembangan rata-rata konsumsi kedelai di dunia yang cenderung naik, tak mengherankan lagi apabila Cargill Inc. dan ADM menjadi perusahaan MNC raksasa yang menguasai perdagangan serelia tersebut seluruh dunia.

⁴⁵ Kenyang adalah masalah politik, <http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=42>, di akses 14 November 2011 jam 14.00.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Bangsa ini Jika Terus Putar-putar Makin Celaka, http://www.selamatkan-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=55, di akses 7 November 2011 jam 13.23.

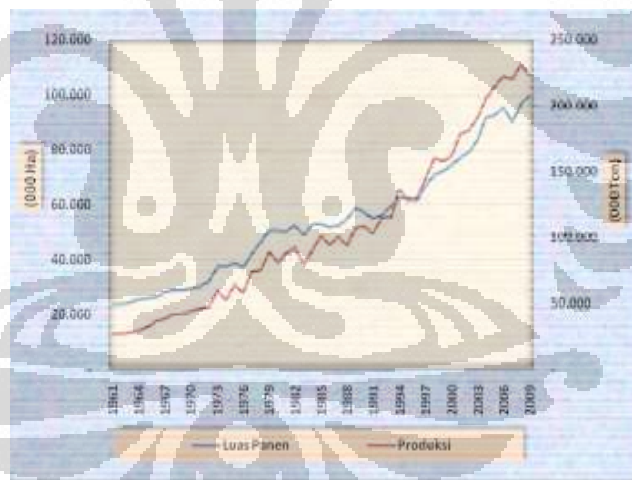
⁴⁸ *Ibid.*

Berikut ini adalah pemaparan data yang sumbernya berasal dari Outlook Kedelai Tanaman Pangan 2011, Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian;

- Luas Panen dan produksi kedelai di dunia periode 1961 – 2009 memiliki tendensi naik terus.

Menurut data FAO, tahun 2008 tercatat luas panen di dunia adalah sebesar 96,5 juta hektare dengan produksinya mencapai 231,39 juta ton, pada tahun 2009 tercatat juga luas panen di dunia adalah sebesar 99,5 juta hektare sementara produksinya adalah sekitar 223,18 juta ton. Di tahun terjadinya krisis pangan khususnya kedelai, memang perkembangan luas panen yang di tunjang dengan angka produktivitas dan produksi kedelai dunia sedang mengalami peningkatan.

GAMBAR 3.1. Perkembangan Luas Panen dan Produksi Kedelai Dunia, 1961 - 2009

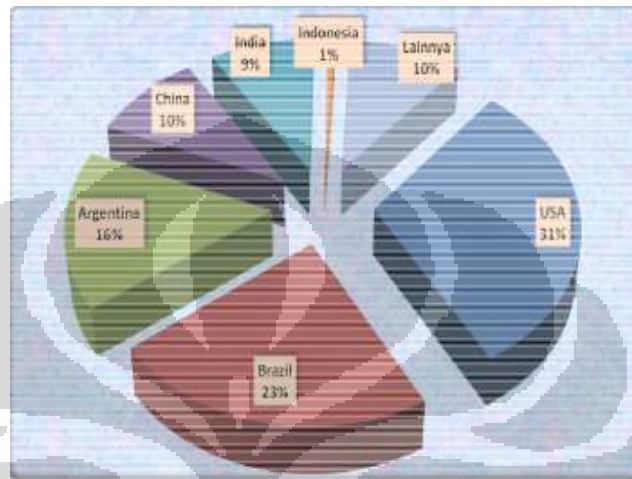


Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Produksi dan luas panen yang cukup besar ini membuat perkebunan dengan area lahan yang sangat luas dengan pengembangan teknologi pertanian yang canggih sanggup menghasilkan produksi kedelai berskala besar.

Hal itu selaras dengan kontribusi rata-rata luas panen 2005 -2009 seperti tercantum dalam gambar berikut ini:

GAMBAR 3.2. Negara-negara Produsen Kedelai di dunia berdasarkan kontribusi rata-rata luas panen 2005 – 2009.



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Amerika Serikat (31%) menduduki keragaan luas panen kedelai yang terbesar di dunia, di susul oleh Brazil (23%), Argentina (16%), China (10%), India (9%) dan Indonesia (1%). Indonesia menempati posisi ke-11 dunia sebesar 0,63%.

Menurut Pusdatin Kementerian Pertanian yang bersumber dari data FAO menyebutkan bahwa Amerika Serikat memiliki tren perkembangan luas panen kedelai yang meningkat dari tahun ke tahunnya, sebagai negara nomer satu dalam luas panen kedelainya di dunia, pada tahun 2005 luas panen di Amerika Serikat mencapai angka 28.834,60 ribu hektare, tahun 2006 naik menjadi 30.190,70 ribu, serta di tahun 2007 dan 2008 mencapai angka 25.959,20 ribu hektare dan 30.222,70 ribu hektare, sementara di tahun 2009 mencapai angka 30.907 ribu hektare.

Hal ini menunjukkan Cargill dengan bisnis unit kedelainya bernama Cargill Grains memiliki kemudahan untuk memperoleh pasokan kedelainya yang diperjualbelikan ke seluruh dunia karena luas panen kedelai dan produksinya sangat melimpah ruah.

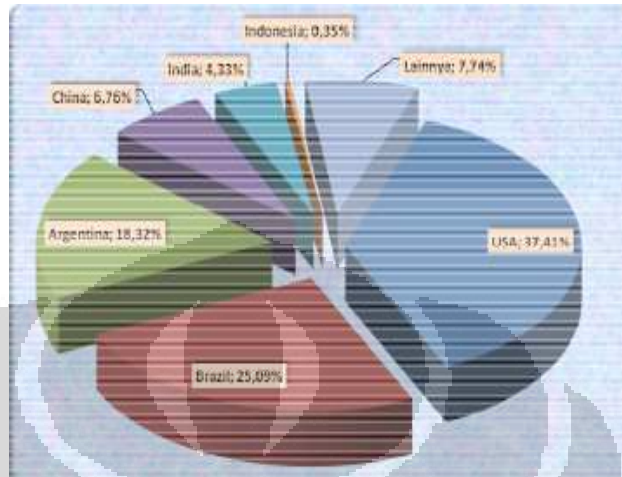
Amerika Serikat juga merupakan produsen no.1 kedelai di dunia sampai saat ini. Negara produsen kedelai yang menempati posisi 5 (lima) teratas di dunia adalah Amerika (37,41%), Brazil (25,09%), Argentina (18,32%), China (6,76%) dan India (4,33%). Kumulatif kontribusi ke-3 negara, yakni; Amerika, Brazil dan Argentina mencapai 80,82%, sementara Kumulatif kontribusi ke-5 negara tadi sudah mencapai angka 91,91% terhadap produksi kedelai dunia dan Indonesia berada pada posisi ke-11 jika di tinjau dari kontribusi rata-rata produksi kedelai yaitu sekitar 0,35%.

Produksi kedelai di dunia juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat menempati urutan yang pertama dengan produksi yang semakin meningkat tiap tahunnya, di tahun 2005 saja angka produksinya telah mencapai 83.505 ribu ton, di tahun 2006 dan 2007 mencapai 86.999 ribu ton dan 72.858 ribu ton, serta di tahun 2009 mencapai 91.417 ribu ton. Sementara di Indonesia, dari data FAO, menunjukkan kecenderungan penurunan produksi, terutama di tahun 2007 sebelum terjadinya krisis kedelai yang melanda tanah air. Angka produksinya paling rendah di sepanjang tahun 2005 – 2009, yakni; hanya mencapai angka 593 ribu ton, sementara di tahun sebelumnya mencapai 748 ribu ton. hal inilah yang menjadi salah satu faktor utama untuk kedelai impor mendapatkan tempat dan bermain di pasaran domestik.

Amerika Serikat sebagai negara produsen kedelai terbesar, di tahun 2008 produksinya mencapai 80,75% dan tahun 2009 produksinya naik menjadi 91,42 juta ton. Rata-rata produksinya selama periode 2005 – 2009 adalah sebesar 83,11 juta ton atau setara dengan 37,41 % dari rata-rata produksi sebesar 25, 09% selama 2005-2009.

Karena surplus produksinya, nilai dan volume ekspor kedelai di Amerika Serikat juga menunjukkan angka yang tinggi. Amerika (42,94%), Brazil (32,72%), Argentina (12,41%), Paraguay (3,95%) dan Kanada (2,35%) adalah negara-negara pengeksport kedelai terbesar di dunia.

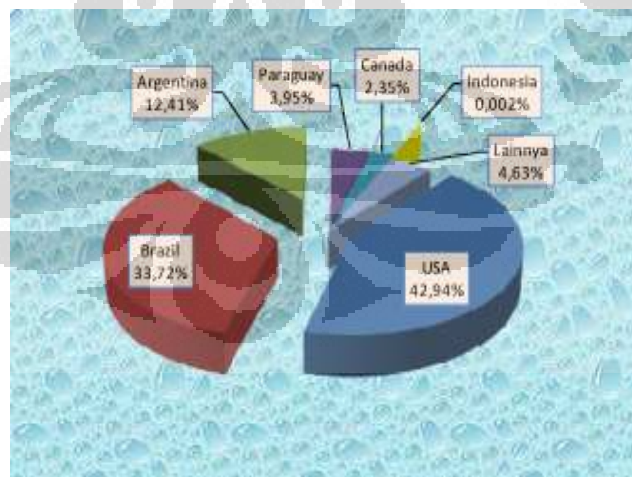
GAMBAR 3.3. Negara-negara Produsen Kedelai di Dunia Berdasarkan Rata-rata Kontribusi Produksi 2005 - 2009



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Sementara bila dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia hanya menduduki posisi ke-43 dengan kontribusi hanya 0,002%. Seperti data di bawah ini:

GAMBAR 3.4. Kontribusi Rata-rata Volume Ekspor Kedelai 5 Negara Besar dan Indonesia, 2005 – 2009



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Rata-rata volume ekspor Amerika selama periode 2005 -2009 adalah 31,62 juta ton, sementara Brazil mencapai 24,84 juta ton. Kontribusi rata-rata volume ekspor kelima negara mencapai 95,37% dari total volume ekspor dunia, Amerika Serikat dan Brazil saja sudah kontribusi rata-rata volume eksportnya sudah mencapai angka 75%. Tercatat pula bahwa Amerika Serikat adalah negara yang memiliki volume ekspor kedelai terbesar di dunia pada periode 2005 – 2009. Pada tahun terjadinya krisis kedelai, yakni tahun 2008, angka volume eksportnya meningkat drastis menjadi 33.995.600 ton dimana tahun sebelumnya hanya mencapai 29.840.200 ton.

Sementara kontribusi rata-rata nilai ekspor kedelai pada periode 2005 – 2009 tercermin pada gambar di bawah ini;

GAMBAR 3.5. Kontribusi rata-rata nilai ekspor kedelai 5 negara besar di dunia, 2005 -2009.



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Nilai ekspor kedelai juga di dominasi oleh 5 (lima) negara yang sama dengan total kontribusinya mencapai angka 94,66%. Amerika dan Brazil berturut-turut menyumbang 44,90% dan 32,57% dari total nilai ekspor kedelai dunia atau rata-rata sekitar 11,06 milyar US\$ dan 8,02 milyar US\$.

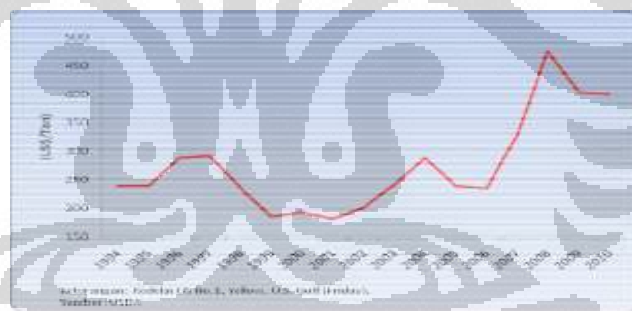
Nilai ekspor kedelai Indonesia menduduki posisi ke-44 dengan kontribusi hanya 0,01% atau sebesar 1.5 juta US\$. Tentu saja Cargill Inc sebagai salah satu perusahaan besar berperan sangat signifikan dalam mendistribusikan kedelai Amerika ke seluruh dunia.

- Harga kedelai dunia tertinggi di tahun 2008

Pada tahun 2008, kenaikan harga kedelai melonjak sangat tajam mencapai angka tertinggi dalam sejarah, hal ini pernah di prediksi oleh Jim Rogers sebagai pialang legendaries di bursa Wall Street, New York.⁴⁹

Dalam bukunya yang berjudul '*Hot Commodities*', pendiri Quantum Fund ini yakin pasar komoditas akan di buru, termasuk kedelai dan hal itu pun terbukti dengan harga kedelai internasional yang mencapai rekor tertinggi sebesar 13,1 US\$ per gantang atau 481,3 US\$ per ton di bursa komoditas Chicago, Amerika Serikat.⁵⁰ Lebih jelasnya, perkembangan harga kedelai dunia seperti pada gambar di bawah ini:

GAMBAR 3.6. Perkembangan Harga Kedelai Dunia, Tahun 1994 – 2010



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Perkembangan harga kedelai US No.1, Yellow, U.S.Gulf (Friday) yang menjadi patokan harga kedelai dunia pada umumnya cenderung berfluktuasi.

⁴⁹ *Cendana Pos*, "Ada Kartel di Kedelai", <http://www.cendanapos.com/2008/05/ada-kartel-di-kedelai.html>, 14 Mei 2008. Di akses 13 Desember 2011 jam 19.01.

⁵⁰ *Ibid.*

Kenaikan harga yang cukup tajam terjadi tahun 2007 – 2008 berkisar 40% - 45% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2008, harga kedelai dunia mencapai tingkat yang tertinggi yaitu sekitar 474,74 US\$ ton, sementara terendah terjadi pada tahun 2001, yaitu; 180,71 US\$/ton.

- Perkembangan konsumsi kedelai dunia cenderung meningkat

Konsumsi tertinggi dunia tercatat pada tahun 1997, yaitu; sekitar 10,97 juta ton. Tahun 1998-1999 konsumsi kedelai dunia menurun cukup tajam sekitar 9,15% dan 11,32 %. Setelah tahun 2002, konsumsi kedelai dunia cenderung untuk naik. Tahun 2007, konsumsi kedelai dunia adalah sekitar 10,25 juta ton, setidaknya pada tahun 2008 kecenderungan perkembangan konsumsi kedelai dunia adalah mengalami peningkatan.

Ini menunjukkan bahwa pangsa pasar bagi perusahaan seperti Cargill yang memperdagangkan kedelai ke seluruh dunia itu sangat besar. seperti tercermin dalam gambar di bawah ini;

GAMBAR 3.7. Perkembangan Konsumsi Kedelai Dunia, 1993-2007

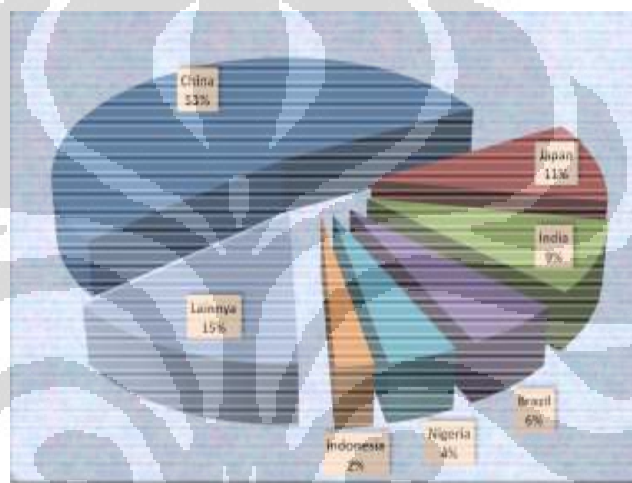


Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Hal itu selaras dengan data mengenai rata-rata konsumsi kedelai 5 (lima) negara besar yang mencerminkan besarnya konsumsi kedelai di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia di dalamnya.

Berikut ini adalah gambar yang menerangkan rata-rata konsumsi kedelai 5 (lima) negara besar di dunia dan Indonesia pada tahun 2003 - 2007:

GAMBAR 3.8. Rata-rata Konsumsi Kedelai 5 (Lima) Negara Besar di Dunia dan Indonesia, 2003 -2007



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Menurut data ini lima negara dengan konsumsi kedelai terbesar adalah China, Jepang, India, Brazil dan Nigeria. China merupakan negara dengan konsumsi kedelai terbesar, yaitu; rata-rata 5,27 juta ton pada tahun 2003 – 2007 atau sekitar 53,30 % dari total konsumsi kedelai dunia. Jepang dan India berturut-turut 1,04 juta ton dan 905,04 ribu ton atau 10,57% dan 9,16% dari total konsumsi dunia. Indonesia menempati urutan ke tujuh dengan rata-rata konsumsi 222,30 ribu ton atau 2,25% dari total konsumsi dunia, Indonesia pada tahun 2007 konsumsi kedelainya mencapai angka 306,12 ribu ton dengan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya ketergantungan terhadap kedelai impor

manakala pasokan kedelai lokal tidak bisa memenuhi besarnya permintaan dan konsumsi akan kedelai yang sangat tinggi di Indonesia.

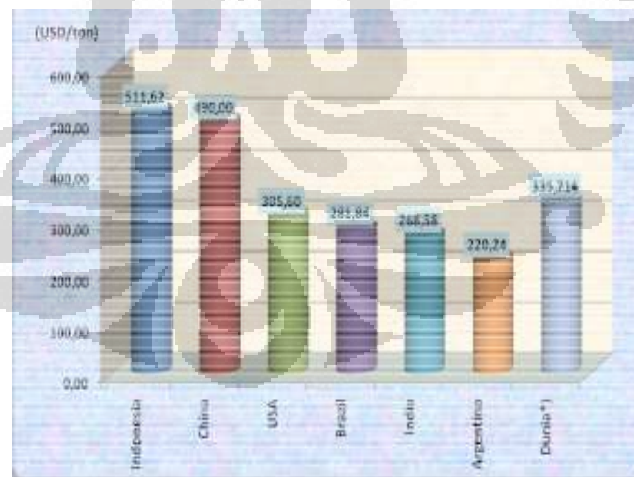
2. Kondisi Dalam Negeri

Kondisi dalam negeri memang di perparah dengan anjloknya produksi kedelai dalam negeri diantaranya akibat gagal panen, menciutnya lahan tanaman pangan, bencana alam serta keengganan petani menanam kedelai sehingga membuat harga kedelai Indonesia di tingkat internasional naik sangat tajam, bahkan mencapai angka yang tertinggi di dunia.

Seperti yang telah diungkapkan bahwa angka konsumsi kedelai bagi kebutuhan dalam negeri sangatlah besar, ini menyebabkan kedelai impor yang berharga lebih murah menutupi kekurangan stok kedelai nasional, hal itu pun tercermin pada disparitas volume ekspor dan impor kedelai, seperti data yang di himpun dari Pusdatin Kementerian Pertanian di bawah ini;

- Harga kedelai Indonesia paling mahal di dunia

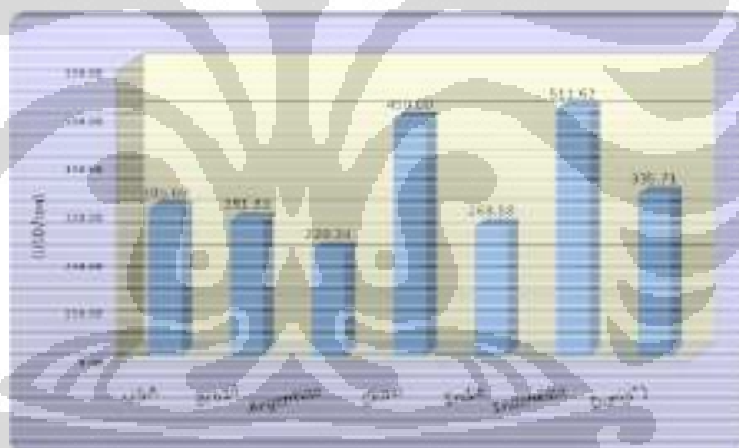
GAMBAR 3.9. Harga Produsen Kedelai di Negara Produsen Terbesar Dunia 2005 - 2009



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Disparitas harga produsen di dalam negeri dan harga internasional cukup jauh, terlihat bahwa harga produsen kedelai Indonesia berada pada level tertinggi jika dikomparasikan dengan 5 (lima) negara penghasil kedelai terbesar dunia. Secara rata-rata, harga produsen kedelai di Indonesia adalah 511,6 USD/ton. Jika ditelusuri lebih lanjut, perjalanan harga produsen komoditas kedelai di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya, pada tahun 2005 harga kedelai Indonesia mencapai 401,60 USD/ton, kemudian meningkat menjadi 407,40 di tahun berikutnya. Angka tersebut semakin naik, ketika harga kedelai di tahun 2007 mencapai 470,50 dan meningkat lagi di tahun 2008 ketika terjadinya krisis kedelai sampai menembus level 640,50 USD/ton.

GAMBAR 3.10. Rata-rata Harga Produsen untuk Komoditas Kedelai di 5 Negara Produsen, Indonesia dan Dunia, Tahun 2005 – 2009



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

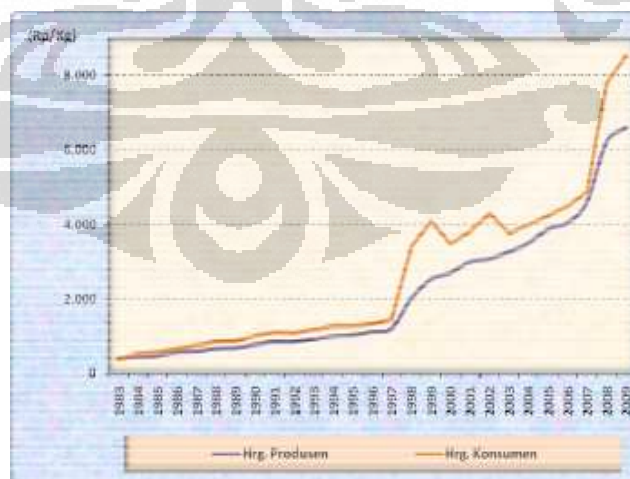
Jika ditinjau lebih rinci lagi, harga produsen negara-negara penghasil kedelai dunia, seperti; Amerika, Brazil, Argentina, China dan India berada pada level di bawah harga produsen kedelai di Indonesia. Amerika sebagai produsen kedelai terbesar dunia, tingkat harga produsennya rata-rata mencapai 305,6 US\$/ton. Sementara harga kedelai dunia yang berharga sekitar 335,71 US\$/ton berada di atas

harga produsen 4 (empat) negara besar penghasil kedelai, yaitu; Amerika, Brazil, Argentina dan India dan berada di bawah harga produsen di Indonesia dan China. Harga produsen di China sedikit lebih rendah dibandingkan Indonesia, yakni; 490 US\$/ton.

Harga produsen maupun konsumen di tahun 2008 juga mengalami kenaikan yang cukup tajam apabila dikomparasikan dengan harga tahun-tahun sebelumnya ataupun periode setelah krisis tahun 1997–1998, persentase pertumbuhannya di harga produsen mencapai 35,40% dan harga konsumen mencapai 60,68%. Disparitas harga tertinggi terjadi pada tahun 2009 (data terakhir) yaitu sebesar Rp 1.937,- per kilogram dimana harga kedelai tingkat produsen adalah Rp 6.588,- sementara harga tingkat konsumen Rp 8.525,- per kilogram.

Harga produsen dan konsumen pada kedelai lokal saja sudah sangat mahal, maka hal ini membawa dampak pada daya saing kedelai tersebut yang kalah dengan kedelai impor karena lebih rendahnya harga kedelai impor. Untuk lebih jelas mengenai harga pada kedelai lokal tercermin pada perbedaan perkembangan harga di tingkat produsen dan konsumen, seperti dalam gambar di bawah ini;

GAMBAR 3.11. Perkembangan Harga Kedelai Tingkat Produsen dan Konsumen di Indonesia, 1983 – 2009



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Perkembangan harga keduanya menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Rata-rata pertumbuhan harga produsen dan konsumen pada periode 1983 – 2009 adalah 12,03% dan 15,28% per tahun. Rata-rata pertumbuhan harga kedelai ini meningkat pada periode 1998 – 2009, yaitu; menjadi 16,07% untuk harga produsen dan 20,85% untuk harga konsumen.

Jadi disparitas harga produsen dan konsumen yang cukup jauh membuat harga kedelai lokal sangat mahal, apalagi rantai distribusinya dari petani ke konsumen cukup panjang sehingga harga akan dibebankan ke konsumen.

Bilamana dikomparasikan antara harga kedelai lokal dan impor yang beredar di pasaran, di tahun 2005, harga kedelai impor Rp.2.800,- sedangkan harga kedelai lokal Rp.3.500,- per kilogram, tahun 2006 harga kedelai impor Rp.2.600,- sedangkan kedelai lokal Rp.3.500,- per kilogram, dan pada 2007 harga kedelai impor Rp.3.200,- sedangkan kedelai lokal Rp.3.400,- per kilogram.⁵¹

- Kekurangan stok kedelai dalam negeri.

Kurangnya stok kedelai lokal terlihat pada perkembangan produksi kedelai di Indonesia, pada 2007-2008 saja masih berada di bawah 806.000 ton. Sementara kebutuhan dalam negeri pada saat itu sebesar 1,8 juta ton kedelai per tahun, dengan pasokan impor sebesar 1,2 juta ton karena produksi lokalnya di tahun 2007 hanya mencapai 620.000 ton.⁵² Perkembangan produksi kedelai dalam negeri dijelaskan dalam gambar di bawah ini;

⁵¹ *Policy Paper* Serikat Petani Indonesia (SPI). "Pandangan Petani Atas Kebijakan Pertanian Pemerintah Tahun 2008."

⁵² *Detik Finance*. Indro Bagus SU, "PMK Pembebasan BM Kedelai Di teken 21 Januari," <http://finance.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/01/tgl/time/182952/idnews/878921/idkanal/4>, senin, 14 Januari 2008 18;39. Di akses 11 Januari 2012 jam 17.45.

GAMBAR 3.12 Perkembangan Produksi Kedelai di Indonesia, 1970 - 2011

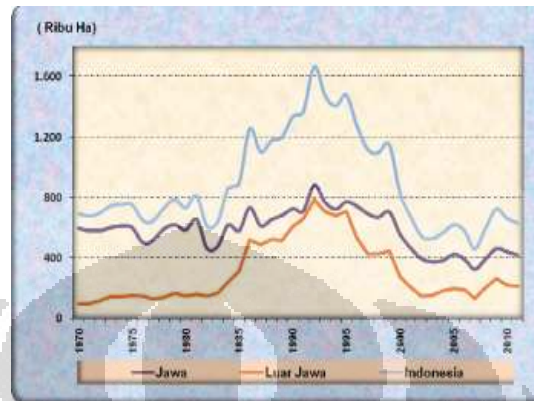


Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Produksi kedelai menurun tajam pada tahun 2000 hingga pada tahun 2007, dimana produksi yang dicapai hampir setara dengan pencapaian produksi yang terjadi pada tahun 1980-an. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi kedelai di tahun 2007 mengalami penurunan, produksi di tahun 2006 mencapai angka 787 ribu ton.⁵³ Sementara itu luas panen kedelai di Indonesia dijelaskan dalam gambar berikut ini;

⁵³ *ibid.*

**GAMBAR 3.13. Perkembangan Luas Panen Kedelai di Indonesia,
1970 – 2011**



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Luas panen kedelai di Indonesia periode 1970 – 2011 berfluktuasi dengan rata-rata kenaikan laju pertumbuhan sebesar 0,83% per tahun. Keragaan luas panen kedelai ini baik di Jawa maupun di luar Jawa terus meningkat pada periode tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an. Luas panen kedelai tertinggi yang pernah dicapai adalah sekitar 1,7 juta hektare pada tahun 1992. Namun setelah periode itu terjadi penurunan luas panen yang sangat drastis disebabkan berbagai faktor, seperti; spekulasi harga, bencana alam, kegagalan panen, penyusutan lahan akibat ekspansi sawit, hadirnya kedelai impor yang membuat kedelai lokal kalah bersaing, dll. Faktor-faktor ini menyebabkan keberadaan kedelai impor semakin *exist* di tanah air.

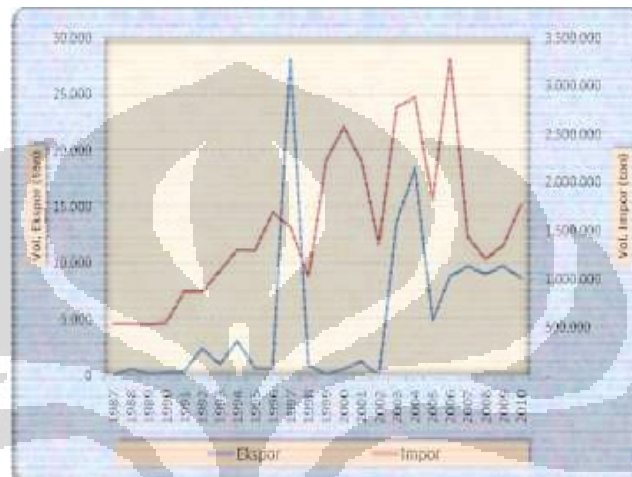
- Disparitas volume ekspor dan impor kedelai di Indonesia

Ekspor kedelai masih sangat kecil dibandingkan impornya. Lebih dari setengah kebutuhan kedelai dalam negeri (70%) masih dipenuhi dengan impor. Ekspor kedelai Indonesia sebagian besar dalam bentuk kedelai olahan, yaitu; kecap dengan negara tujuan ekspor; Australia, Arab Saudi dan Belanda.

Sementara impor kedelai juga cukup tinggi, rendahnya produksi kedelai dalam negeri menjadi salah satu kendala utamanya sehingga sebagian besar.

pemenuhan kebutuhan kedelai dalam negeri sangat bergantung pada impor. Perkembangan volume ekspor dan impor tercermin pada gambar di bawah ini;

GAMBAR 3.14. Perkembangan Volume Ekspor dan Impor Kedelai di Indonesia, 1987 – 2010

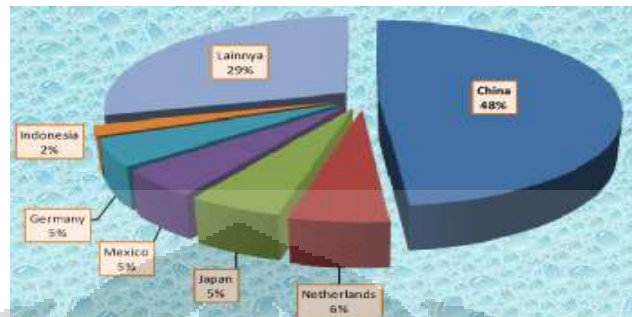


Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Perkembangan volume ekspor kedelai cenderung berfluktuasi. Sementara Perkembangan volume impor kedelai sedikit berbeda, pada periode 1987 – 2010 cenderung meningkat. Pada masa krisis ekonomi, impor kedelai mengalami penurunan dan naik lagi di masa pemulihan krisis tahun 1999 – 2000.

Jika di telisik volume dan nilai Impor Indonesia sangat besar, Indonesia menduduki peringkat ke-10 dunia dalam mengimpor kedelai. Kebutuhan dunia kedelai juga sangat besar. China (48%), Belanda (6%), Jepang (5%), Mexico (5%), Jerman (5%), dan Indonesia (2%). Hal itu tercermin pada kontribusi rata-rata volume impor seperti pada gambar di bawah ini;

GAMBAR 3.15. Kontribusi Rata-rata Volume Impor 5 Negara Besar di Dunia dan Indonesia, 2005 – 2009

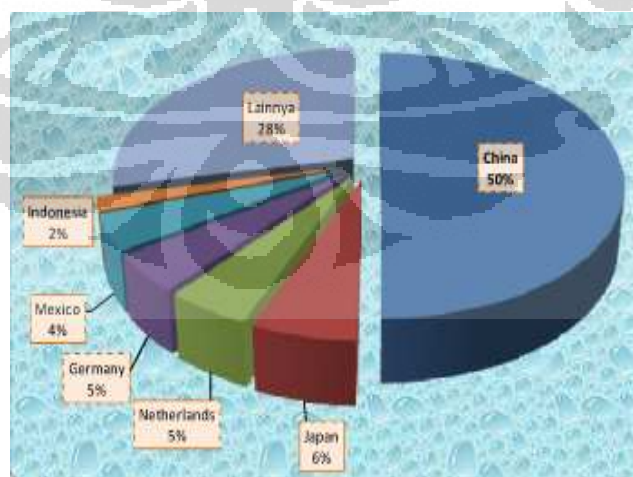


Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Pada tahun 2009, volume impor kedelai dunia adalah sekitar 79,70 juta ton atau rata-rata sekitar 73,20 juta ton.

Untuk volume impor kedelai global, Indonesia menempati urutan ke-10 dengan kontribusi rata-rata sebesar 1,90% terhadap total volume impor dunia selama kurun waktu 2005 – 2009 atau rata-rata sebesar 1,40 juta ton. Sementara nilai impor dunia tak jauh berbeda dari volumenya, hal itu tercermin pada gambar berikut ini;

GAMBAR 3.16. Kontribusi Nilai Impor Kedelai 5 Negara Besar di Dunia dan Indonesia, 2005 -2009



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

China sebagai negara importir terbesar memiliki kontribusi sebesar 50,19% dari total nilai impor dunia atau rata-rata sebesar 14,35 milyar US\$ selama periode 2005-2009. Indonesia menduduki posisi ke-11 dengan kontribusi nilai impor sebesar 1,68% atau rata-rata sebesar 481,27 US\$ pada kurun waktu 2005 – 2009.

Dari data-data tersebut di atas menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa melepaskan ketergantungannya yang besar pada pasokan kedelai impor utamanya yang berasal dari Amerika Serikat.

- Besarnya konsumsi kedelai bagi kebutuhan dalam negeri

Kedelai Indonesia sebagian besar dikonsumsi dalam bentuk produk olahannya, seperti; tempe, tahu, tauco atau oncom. Saat ini industri yang menggunakan bahan baku kedelai berjumlah 92 ribu unit dengan komposisi; produsen tempe 56 ribu unit, tahu 28 ribu unit, kecap 1.500 unit dan tauco 2.100 unit dengan penyebaran wilayah adalah 39% di Jawa Tengah, 22% di Jawa Timur, 13% Jawa Barat, 8,5% Jogjakarta dan Kalimantan dan Sumatera sisanya.⁵⁴ Namun sebagian besar ketersediaannya masih mengandalkan kedelai impor karena memang pasokan dalam negeri yang sangat kurang. Bahkan berdasarkan data dari Pusdatin Kementerian Pertanian ini memperlihatkan bahwa tren proyeksi konsumsi kedelai mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahunnya.

TABEL.3.1. Proyeksi Konsumsi Kedelai

Tahun	Proyeksi Konsumsi (ton)
2009	1 689 001
2010	1 718 260
2011	1 847 105
2012	1 875 259
2013	1 903 651
Pertumbuhan (%)	3,07

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

⁵⁴ *Detik finance*. Indro Bagus SU, *op.cit.*

Kondisi Internasional dan dalam negeri turut membangun dominasi Cargill Inc. selaku *home country* pada *frame* pembangunan dalam ketergantungan seperti yang disebutkan oleh Peter Evans. Indonesia yang memiliki pasokan kedelai lokal yang sangat kurang sehingga para importirnya berlomba-lomba untuk mendapatkan kedelai Amerika yang berharga murah dengan fasilitas kredit yang disediakan oleh pemerintah Amerika Serikat tersebut.

Pemerintah juga turut mempermudah ketentuan terhadap para importir kedelai, karena importir tidak perlu ijin khusus dalam melakukan impornya, hanya membutuhkan dana yang cukup untuk membeli impor kedelai dari *supplier*. PT.Cargill Indonesia selaku *host country* seperti yang disampaikan oleh mantan pejabatnya memperoleh pasokan kedelainya dengan mudah dari Cargill Inc selaku *home country*.

Begitupula dengan para importir lainnya, memang tidak ditemukan data yang memastikan kedelai Amerika yang dibeli importir lainnya selain PT.Cargill Indonesia juga berasal dari Cargill Inc., namun pada kenyataannya yang menguasai pasar kedelai di Amerika Serikat dan bahkan dunia saat ini adalah Cargill dan ADM (Archer Daniels Midland).

MNC yang pada dasarnya memiliki sifat untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya seperti disampaikan oleh Barnet & Muller, hal itu tercermin pada krisis kedelai di tahun 2008 yang terjadi di Indonesia, dimana adanya penimbunan berton-ton kedelai oleh pemain besarnya, adanya indikasi permainan kartel antar para importir di saat terjadinya kenaikan dan kelangkaan kedelai, sementara para importir hanya berjumlah sedikit.

3.2. Krisis Kedelai di Tahun 2008

Krisis pangan merupakan salah satu masalah klasik yang membelit Indonesia. Misalnya; kasus beras pada tahun 1998, gula di tahun 2002, susu pada tahun 2007, minyak goreng pada tahun 2007 dan kedelai di tahun 2008. Dalam bab ini akan di kupas mengenai PT.Cargill Indonesia (CI) sebagai salah satu importir utama

kebutuhan kedelai nasional, indikasi kartel dalam pasar oligopoli kedelai yang memicu terjadinya krisis kedelai dan perangkat aturan yang turut menciptakan krisis harga pangan di tahun 2008 itu.

Berdasarkan sumber dari Kementerian Perdagangan Direktorat Perdagangan Luar Negeri, sampai tahun 2007 sebelum terjadinya krisis kedelai di Indonesia tercatat importir kedelai berjumlah 303 perusahaan dan importir kedelai yang memiliki NPIK kedelai sampai Januari 2008 hanya sebanyak 216 perusahaan, dari jumlah itu yang aktif melakukan impor kedelai hanya 39 perusahaan. Jadi meskipun jumlah importir yang aktif sangat banyak berjumlah 39, namun hanya ada beberapa pemain besar importir kedelai, yakni; Gerbang Cahaya Utama (64%), PT.Cargill Indonesia (18%), 7% (Alam Agri Perkasa) dan (6%) Teluk Intan serta 5% para importir lainnya.⁵⁵ Ketika KPPU melakukan pemeriksaan kepada para importir dengan indikasi adanya kartel dalam kedelai, importir besar hanya berjumlah 4, yaitu; Teluk Intan (GCU dan Teluk Intan bersatu menjadi satu perusahaan)⁵⁶, Cargill Indonesia, Liong Seng dan Gunung Sewu yang dimiliki oleh keluarga Angkosubroto, Pemilik Chase Plaza.⁵⁷

Sementara itu, realitas yang terjadi di tanah air pada pertengahan tahun 2007 tersebut, harga kedelai lokal di pasaran kurang lebih mencapai Rp 3.450,-/kg dan terus merangkak naik lebih dari 100% pada awal tahun 2008 menjadi Rp. 7.500/kg,⁵⁸ padahal kedelai merupakan salah satu komoditas yang vital bagi masyarakat. Kedelai adalah sumber gizi protein nabati utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai Indonesia dilakukan dalam bentuk tempe, 40% dalam bentuk tahu, dan 10% dalam bentuk produk lain (seperti tauco, kecap, dan lain-lain). Indonesia memang merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan

⁵⁵ Bisnis Indonesia. Hendri T.Asworo, "Mungkinkah harga kedelai diturunkan,"

www.bisnis.indonesia.com, jumat 18 Januari 2008. Di akses 17 Desember 2011 jam 16.05.

⁵⁶ Wawancara dengan Asep Nurdin; Ketua 1 GAKOPTINDO melalui telpon tanggal 1 Maret 2012 jam 11.20. (Lampiran 4)

⁵⁷ *Cendana Pos*, "Ada Kartel di Kedelai," *op.cit.*

⁵⁸ *Policy Paper* Serikat Petani Indonesia (SPI). *op.cit.*

menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Konsumsi tempe rata-rata orang per tahun di Indonesia saat ini di duga sekitar 6,45 kg

Kelangkaan kedelai dan kenaikan harga yang drastis ini telah menciptakan keadaan *afuliru* terutama bagi para pengrajin tahu dan tempe atau pedagang yang menggunakan produk kedelai sebagai bahan utamanya. Ketergantungan terhadap kedelai juga bukan milik produsen (pengrajin tahu dan tempe, pedagang gorengan) yang usahanya amat bergantung pada kedelai dan produk olahannya, namun juga konsumen. Kenaikan harga itu telah menyebabkan harga tahu dan tempe melambung bahkan sempat menjadi barang yang langka di pasaran. Para pengrajin tahu dan tempe di buat kelimpungan menanggung langkanya bahan baku dan kenaikan biaya produksi, konsumen pun ikut merasakan imbas dengan naiknya harga tahu dan tempe di pasar.

Kelangkaan kedelai di pasaran sangat ironis karena Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa para importir masih menyimpan kedelai setidaknya sebanyak 250-300 ton. Stok sebanyak itu sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan. Terbukti pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2008 di Surabaya, Satuan Tim Unit IV Reserse Kriminal Wilayah Kota besar Surabaya menemukan gudang penimbunan kedelai impor sebanyak 13.000 ton milik PT.Cargill Indonesia (CI).⁵⁹ Letak gudang penimbunan kedelai itu tersembunyi di dalam area pabrik garam PT.Susanti Megah yang berlokasi di Jl. Dupak Rukun No. 71-73 Surabaya, sejak tahun 2007 PT.Susanti menyewakan gudang itu kepada PT.Cargill Indonesia.⁶⁰ Kedelai yang di timbun CI sebenarnya untuk pemenuhan kebutuhan kedelai di tahun 2007, namun yang didistribusikan hanya sekitar 9000 ton dari jumlah total sebanyak 22.000 ton dan sisanya ditimbun.⁶¹ PT.Cargill Indonesia mengimpor kedelai dari

⁵⁹ Trie. Ada 'Gunung' Kedelai di Surabaya, <http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=6128>. 28 januari 2008 10:09, di akses 11 November 2011, jam 13.51.

⁶⁰ *Tempo interaktif, Surabaya*. "Polisi Temukan Gudang Penimbunan 13 Ribu Ton Kedelai," <http://www.infoanda.com/id/link.php?lh=BVBdVgcCDIQc>, 25 januari 2008 20:06 WIB.

⁶¹ Trie, Ada 'Gunung' Kedelai di Surabaya, *op.cit*.

Amerika sebanyak 22.000 ton dengan harga Rp 6.950,- pada akhir November 2007.⁶² Penimbunan juga ternyata dilakukan oleh importir utama lainnya, yakni; Gerbang Cahaya Utama ketika Polres Sidoarjo dan Polwiltabes Surabaya menggerebek gudang pada tanggal 28 Januari 2008 di Jalan Raya Kletek 196-197, Sidoarjo. Stok perusahaan itu hampir dua kali lipat dibandingkan PT.Cargill Indonesia, yakni; 50.000 ton kedelai.⁶³ Selain menyimpan stok sebesar 27,3 ribu ton di Jalan Raya Kletek itu, GCU juga menempatkan 22,7 ribu ton kedelai impornya di sebuah gudang di Jalan Tanjung Batu, Tanjung Perak, Surabaya.⁶⁴ Kuat dugaan bahwa kedelai sengaja ditimbun oleh para importir di saat harga kedelai di pasaran melambung tinggi hingga melewati Rp 8.500,- per kilogram di atas harga normal Rp 5.000,- per kilogram.⁶⁵ Sementara dari data yang di himpun penulis, importir besar lainnya, seperti; PT.Alam Agri Perkasa mengimpor sebanyak 1.890 ton kedelai per bulan dan PT.Teluk Intan mengimpor sebanyak 11,34 ton kedelai per bulan.⁶⁶ Jadi sebenarnya stok kedelai impor itu tersedia cukup.

Aksi unjuk rasa para pengrajin tahu dan tempe pun di gelar di Bundaran HI dan Istana Merdeka, Forum Komunikasi Koperasi Pengrajin Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) juga menyuarakan kepada seluruh pengrajin, pedagang tahu dan tempe di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk mogok kerja.⁶⁷ Menjelang aksi unjuk rasa para pengrajin pada tanggal 5-14 Januari 2008 harga kedelai mendadak stabil, meskipun

⁶² *Detik Finance*, Imam Wahyudiyanta, "Polisi Temukan Timbunan Kedelai Miliki Cargill di Surabaya," <http://finance.detik.com/read/2008/01/25/175759/884271/4/polisi-temukan-timbunan-kedelai-milik-cargill-di-surabaya>, 25 januari 2008. Di akses 6 Desember 2012.

⁶³ Bangsa ini Jika Terus Putar-putar Makin Celaka, *op.cit.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Tempo Interaktif*, "Kedelai setelah Satu Dekade," <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/03/29/EB/mbm.20100329.EB133122.id>, 29 Maret 2010. Di akses 16 November 2011 jam 13.42.

⁶⁶ *Jawa Pos*. Fidyah, "Lagi ditemukan 50ribu ton kedelai," www.jawapos.com, Selasa 29 Januari 2008. Di akses 15 November 2011, jam 18.45.

⁶⁷ Revitalisasi Pertanian, <http://autos.okezone.com/read/2008/02/04/212/80638/revitalisasi-pertanian>, Senin, 4 Februari 2008 07:50 WIB, di akses 17 November 2011 jam 12.13.

harga di luar negeri sedang bergejolak.⁶⁸ Ini menunjukkan indikasi yang kuat adanya kartel dalam kedelai.

Setelah adanya unjuk rasa 5.000 orang, Presiden SBY menggelar rapat kabinet terbatas di Kementerian Pertanian.⁶⁹ Pemerintah segera mengambil langkah dengan menurunkan bea masuk impor kedelai dari 10% menjadi 0%, negara tempat impor kedelai di perluas dan importir diperbanyak, termasuk mengerahkan Bulog.⁷⁰ Kemudian pembebasan bea masuk impor kedelai di teken dalam Peraturan Menteri Keuangan pada tanggal 21 Januari 2008, harga kedelai tingkat gudang importir akan menjadi sekitar Rp 5.987,-/kg dan sampai di konsumen sekitar Rp 6.000,-.⁷¹ Kemudian di sisi produksi, Pemerintah menargetkan pencapaian produksi sebanyak 750 ribu ton dengan asumsi lahan yang ditanami 600 ribu ha yang disertai dengan kebijakan subsidi benih kedelai sebanyak 5.500 ton.⁷²

Di tanggal 31 Januari 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pengusaha segera mengembalikan stabilitas harga kebutuhan pokok secepatnya, pengusaha yang hadir di Istana Merdeka diantaranya Direktur Utama Cargill.⁷³ Solusi sementara ini sebenarnya tidak menjawab akar permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia.

Dari paparan di atas, pola aliansi tripel antara Negara dengan MNC dan anak usahanya tercermin pada kasus ini, misalnya; dalam penyelesaian penimbunan berton-ton kedelai dari para importir, pemerintah menyatakan bahwa hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, karena merupakan stok dalam 3 bulan yang belum habis, tanpa mempertimbangkan adanya kelangkaan kedelai di pasar dan kenaikan harga yang sangat tinggi. Pemerintah juga menawarkan solusi

⁶⁸Trisetarso, Kartel Di Bisnis Tempe, <http://trisetarso.wordpress.com/page/38/archives-list=1>, 21 Januari 2008. Di akses 12 November 2011, jam 13.41.

⁶⁹ *Cendana Pos*, "Ada Kartel di Kedelai," *op.cit.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *DetikFinance*. Indro Bagus SU, *op.cit.*

⁷² *Policy Paper* Serikat Petani Indonesia (SPI). *op.cit.*

⁷³ *Tempo Interaktif*, "Presiden Minta Pengusaha Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok,"

<http://www.infoanda.com/id/link.php?ih=UA8LAQQGAQpu>, Kamis, 31 Januari 2008 05:10 WIB, di akses 13 Januari 2012 jam 14.15.

untuk pemecahan krisis ini dengan cara menurunkan tarif dari 10% menjadi 0% seperti harapan dari Cargill Inc selaku *home country* yang menginginkan ketiadaan hambatan tarif dalam perdagangan. Sementara borjuasi lokal yakni Cargill Indonesia memperoleh keuntungan yang tinggi dari kenaikan harga kedelai karena para pemain utama kedelai, termasuk CI di dalamnya mampu menggerakkan harga di pasar. Kuatnya indikasi kartel dalam kedelai ditunjukkan dengan stabilnya harga kedelai saat terjadi demonstrasi para pengrajin tahu dan tempe.

3.3. Indikasi Permainan Kartel

Pada saat itu Importir kedelai di Indonesia hanya dikuasai 4 pelaku saja, yakni; Teluk Intan, Cargill Indonesia, Liong Seng dan Gunung Sewu. Dan pada perkembangan selanjutnya, berdasarkan Resume Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha pada Laporan KPPU tahun 2008 halaman 127 yang menyatakan adanya dugaan konsesi kartel dalam menggerakkan harga kedelai di pasar. Ketika harga kedelai impor naik, maka kedelai di pasar domestik pun ikut naik. Selain harga kedelai yang tinggi, pengimpor utama kedelai yang berjumlah 4 terkonsentrasi pada 2 importir saja sehingga mengakibatkan *market power* menjadi determinan yang mengarahkan pada pergerakan harga kedelai di pasar domestik.⁷⁴

Semenjak produksi kedelai nasional menurun serta meningkatnya ketergantungan Indonesia pada kedelai impor, sempat pula terjadi kelangkaan kedelai di pasaran pada tahun 2007, kemudian beberapa importir kedelai seperti CI dan GCU kedatangan menimbun berton-ton kedelai di saat harga kedelai yang melambung tinggi. Ini menunjukkan kuatnya indikasi kartel untuk mencari profit setinggi-tingginya di saat krisis komoditas itu terjadi. Pemerintah pun sedang menyelidiki dugaan adanya permainan harga oleh para importir besar, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ikut terjun mengusut adanya indikasi kartel ini.⁷⁵

⁷⁴ Resume Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha Pada Laporan KPPU tahun 2008, h.127.

⁷⁵ Trisetyarso, Kartel di Bisnis Tempe, *op.cit.*

Adapun pengertian Kartel yang didefinisikan oleh OECD adalah sebagai berikut:

“A cartel is a formal agreement in a oligopolistic industri. Cartel members may agree on such matters as prices, total industri output, market shares, allocation of customers, allocation of territories, bid-rigging, establishment of common sales agencies, and the division of profits or combination of these. Cartel in this brand sense is synonymous with “explicit” form of collusion.”

Kartel sendiri merupakan salah satu dari beberapa jenis perjanjian yang dilarang dalam Hukum Persaingan karena kartel menukar kompetisi dengan tindakan-tindakan yang kolusif diantara para pesaingnya. Biasanya kartel ada dalam struktur pasar yang oligopoli karena lebih mudah untuk bersatu dan menguasai sebagian besar pangsa pasar dengan beberapa pelaku usaha saja.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengategorikan kartel sebagai salah satu bentuk perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Dimana Pasal 11 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berbunyi: “pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan cara mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.”⁷⁶

Mekanisme terjadinya kartel adalah dilakukannya konspirasi antara beberapa pelaku usaha. Kedua, melakukan penetapan harga. Ketiga, agar penetapan harga dapat efektif, maka dilakukan pula alokasi konsumen atau produksi atau wilayah. Keempat, adanya perbedaan kepentingan diantara pelaku usaha misalnya karena perbedaan biaya. Oleh karena itu perlu adanya kompromi diantara anggota kartel misalnya dengan adanya kompensasi dari anggota kartel yang besar kepada mereka yang lebih kecil.⁷⁷

⁷⁶ KPPU. *Hukum Persaingan Usaha; Antar Teks dan Konteks*, (Jakarta: KPPU, 2009), h107-108.

⁷⁷ *Ibid.*

Seringkali anggota dalam kartel itu tidak setia dan realitasnya di lapangan, mereka yang membuat kesepakatan dalam suatu kartel banyak yang melakukan pengkhianatan terhadap konsesi kartel yang dibuatnya sendiri karena dalam bisnis adalah menghitung angka dan kalkulasi, kartel hanya menawarkan keuntungan jangka pendek, dan insentif untuk berkhianat itu lebih besar daripada loyalitas dalam perjanjian kartel. Namun bagaimanapun juga, sebagai pelaku bisnis akan melakukan penghitungan, apabila kartel ini menguntungkan bagi mereka, maka mereka akan memberikan loyalitas yang tinggi terhadap konsesi kartel. Sesungguhnya kartel merupakan tindakan yang penuh resiko tinggi yang jelas-jelas melanggar hukum dan selalu ada anasir antara yang sepakat mengenai kondisi *uncertainty* dari loyalitas anggota kartel tersebut.

Dugaan pada kasus ini adalah bahwa para importir utama kedelai, seperti; PT.Teluk Intan, PT.Cargill Indonesia, Gunung Sewu dan Liong Seng melakukan konsesi penetapan harga kedelai impor yang menggerakkan harga kedelai di pasar dan membatasi jumlah kedelai yang beredar sehingga menyebabkan situasi di dalam pasar mengalami kelangkaan kedelai (misalnya; dengan melakukan penimbunan berton-ton kedelai oleh Cargill Indonesia dan Gerbang Cahaya Utama), hal ini telah menyebabkan melonjaknya harga sehingga membebani konsumen.

Indikasi kartel sebenarnya sudah lama tercium ketika kedelai saat itu di kuasai oleh Gerbang Cahaya Utama (64%), Cargill Indonesia (18%), Teluk Intan (13%), Agri Perkasa (7%) dan importir lainnya (6%), dengan menghitung tingkat konsentrasi pasarnya para importir kedelai ini sesuai Teori The Herfindahl- Hirschman Index (HHI) dengan Rumus:⁷⁸

$$C = A^2 + B^2 + C^2 + D^2 + E^2$$

Keterangan:

C= Konsentrasi pasar

A, B, C, D, E = pelaku pasar

⁷⁸ *ibid.*

- 1) $HHI < 1000$ = pasar tidak terkonsentrasi,
- 2) $HHI < 1800$ = pasar agak terkonsentrasi (*moderately concentrated*)
- 3) $HHI > 1800$ = pasar sangat terkonsentrasi (*highly concentrated*)

Besar konsentrasi pasar pada pasar kedelai impor, yaitu;

$$\begin{aligned}
 C &= A^2 + B^2 + C^2 + D^2 + E^2 \\
 &= 64^2 + 18^2 + 13^2 + 7^2 + 6^2 \\
 &= 4096 + 324 + 169 + 49 + 36 \\
 &= 4676
 \end{aligned}$$

Dinyatakan bahwa pasar sangat terkonsentrasi dan jika konsentrasi pasarnya besar apalagi dengan segelintir pemain, maka indikasi dilakukannya kartel begitu kuat.

Menurut salah satu pejabat KPPU yang di wawancarai penulis.⁷⁹ Beliau menyatakan KPPU sebagai komisi Adhoc bertugas menyelidiki dan mengadili sebuah kasus tentang persaingan usaha, KPPU telah melakukan pemberkasan terhadap indikasi kartel kedelai ini, namun hal itu sudah dihentikan pada tahap pemberkasan, belum bisa diajukan sebagai pemenangan perkara. Penghentian pemberkasan menurut pejabat KPPU tersebut biasanya disebabkan alat bukti yang masih kurang lengkap karena dalam Perkom No.1 tahun 2010 itu disyaratkan minimal 2 bukti untuk pemenangan perkara, ada *direct evident* dan *indirect evidence* (satu alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri harus disokong alat bukti yang lain supaya kuat), atau persoalan ini bukan merupakan kewenangan dari Pihak KPPU sehingga hanya sampai pada tahap pemberkasan saja.

Pejabat KPPU itu menambahkan bahwa Persaingan tidak sehat atau praktek monopoli bisa timbul oleh dua hal, yakni; pertama, karena perilaku-perilaku para pelaku usahanya dan kedua, karena masalah kebijakan pemerintah, kalau perilaku usahanya tidak sehat dilakukan dengan pendekatan hukum melalui tuntutan perkara, kalau hal ini merupakan kebijakan pemerintah, KPPU hanya di beri kewenangan

⁷⁹ Wawancara dengan Pejabat KPPU, bertempat di kantor KPPU tanggal 29 Februari 2012 jam 15.00 (Lampiran 5)

sebatas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah supaya kebijakannya di ubah, biasanya laporan ini bersifat *confidential* karena hanya diperuntukkan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan.

Sementara itu, menurut staf bagian investigasi KPPU yang diwawancarai penulis.⁸⁰ Beliau menyatakan bahwa dalam membuktikan satu kejahatan ekonomi sebuah kasus itu sangatlah sulit, apalagi menyangkut indikasi kartel perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha. Beberapa hal yang bisa disepakati dalam suatu kartel, antara lain; penetapan harga, pembatasan produksi, alokasi konsumen, pembagian wilayah, pengaturan keuntungan dan pengaturan tender. Kesuksesan kartel sangat bergantung pada koordinasi atau kerjasama, disiplin dan loyalitas anggota. Praktek kartel dapat berjalan sukses jika pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian kartel tersebut adalah mayoritas dari pelaku usaha yang berkecimpung di dalam pasar tersebut. Beliau kembali menekankan betapa sulitnya membuktikan suatu kartel ekonomi dalam sebuah kasus, beliau mencontohkan beberapa kasus yang pernah ditangani oleh KPPU, seperti; kasus kartel minyak goreng dengan nomer putusan 024/KPPU-I/2009, putusan KPPU ditolak oleh Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Negeri itu dikuatkan Mahkamah Agung, kasus kartel *fuel surcharge* No putusan 25/KPPU-I/2009, putusan KPPU itu di tolak oleh Pengadilan Negeri dan kasus ini masih *pending* di tingkat kasasi Mahkamah Agung, dan lain-lain.

Beliau mengakui sukarnya memperoleh bukti *hardcore/direct evidence* seperti; dokumen perjanjian, *implicit agreement or implied agreement* (notulen rapat-rapat, surat-menyurat, telepon, email), pertemuan antara pelaku atau asosiasi yang membicarakan harga, produksi, pemasaran, wilayah pasar, *discount*. Sementara *indirect evidence* berupa bukti ekonomi (bukti yang terkait dengan struktur pasar dan perilaku) dan bukti komunikasi berupa fakta adanya pertemuan dan atau komunikasi antar pesaing, meskipun tidak terdapat substansi dari pertemuan dan atau komunikasi

⁸⁰ Wawancara dengan Staff Investigasi KPPU, bertempat di kantor KPPU, 29 Februari 2012 jam 15.30 (Lampiran 6)

tersebut. Sulitnya bukti ekonomi dan komunikasi ini menjadi kendala bagi KPPU untuk di terima kasusnya di pengadilan negeri.

TABEL 3.2. Putusan KPPU dalam Kasus Kartel

No Putusan	Kasus Kartel	Pasal yang di langgar	Putusan	Keberatan MA	Kasasi MA
024/KPPU-I/2009	Minyak goreng	Pasal 4, 5 dan 11	Bersalah, Denda	Putusan KPPU ditolak PN	Putusan PN dikuatkan MA
025/KPPU-I/2009	<i>Fuel Surcharge</i> maskapai penerbangan	Pasal 5	Bersalah, Denda plus kerugian konsumen	Putusan KPPU ditolak PN	Proses kasasi masih berlangsung di MA
01/KPPU-I/2010	Semen	Pasal 5 dan 11	Tidak terbukti	-	-
010/KPPU-I/2010	<i>Pharmaceutical</i>	Pasal 5, 11, 16 dan 25 ayat 9 (1) huruf a	Bersalah denda	Putusan KPPU ditolak PN	Proses kasasi masih berlangsung di MA

Sumber: di olah dari KPPU, 2011

Meskipun laporan pemberkasan tentang indikasi kartel dalam kedelai tidak berhasil diketahui oleh penulis karena sifat laporan tersebut hanya tertutup bagi pemerintah saja. Penulis berusaha menganalisanya sesuai dengan UU No.5/1999 mengenai larangan dalam perjanjian kartel, sebagai berikut:

- Pasal 5: Penetapan harga

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus di bayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasar bersangkutan yang sama.

Pada saat krisis kedelai terjadi, harga kedelai impor naik, harga kedelai lokal yang lebih mahal itu pun ikut naik. Harga kedelai terus bergerak dan mencapai puncaknya di angka Rp 8.500,-. Yang mampu menggerakkan harga kedelai impor adalah para importir besar, seperti Teluk Intan dan Cargill Indonesia, hal ini dikuatkan dengan adanya kestabilan harga kedelai saat unjuk rasa dari ribuan para pengrajin tahu dan tempe terjadi, padahal harga kedelai dunia sedang naik-naiknya.

Selain itu, praktek kartel bisa berjalan dengan sukses jika pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian kartel adalah kelompok mayoritas dari pelaku usaha yang berkecimpung di dalam pasar tersebut.⁸¹ Karena apabila hanya sebagian kecil saja pelaku usaha yang terlibat di dalam perjanjian kartel biasanya perjanjian kartel tidak akan efektif dalam mempengaruhi pasokan produk di pasar, karena kekurangan pasokan di dalam pasar akan ditutupi oleh pasokan dari pelaku usaha yang tidak terlibat di dalam perjanjian kartel.⁸² Pada realitasnya harga terdongkrak naik sampai pada titik kulminasinya. Dari penghitungan konsentrasi pasar sebelumnya, pasar kedelai memang sangat terkonsentrasi sehingga 4 importir ini sebenarnya mampu menggerakkan harga di pasar. Namun negasi disampaikan oleh Jubir PT.Cargill Indonesia yang menyatakan bahwa para importir bukan penentu harga kedelai dipasar karena harga kedelai berdasarkan mekanisme pasar.⁸³

- Pasal 9 : Pembagian Wilayah

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

⁸¹ KPPU. *Hukum Persaingan Usaha; Antara Teks dan Konteks*, *op.cit.* h.107.

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Cendana Pos*, "Ada Kartel Di Kedelai," *op.cit.*

Mantan pejabat tinggi PT.Cargill Indonesia membantah bahwa tidak terdapat perjanjian pembagian wilayah dalam pendistribusian kedelai impor antara supplier dengan importir sehingga adanya situasi persaingan yang sehat diantara importir kedelai.⁸⁴

- Pasal 11 : Kartel

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat.

Dalam prakteknya *direct evidence* tidak mudah untuk ditemukan, namun sangat mengherankan jika importir besar seperti Cargill Indonesia kedapatan menimbun 13.000 ton kedelai seharga 90 Milliar dan Gerbang Cahaya Utama juga sama-sama menimbun kedelai sebanyak 50.000 ton. Sepertinya sudah ada suatu kesepakatan untuk menimbun kedelai di saat terjadi kelangkaan kedelai, namun tindakan itu dianggap tidak melanggar ketentuan undang-undang karena Departemen Perdagangan menyatakan puluhan ribu stok kedelai di gudang importir itu bukan praktek penimbunan, melainkan masih sesuai dengan Permendag nomor 16/M-DAG/PER/3/2006, Pemerintah memperbolehkan penyimpanan di gudang selama tiga bulan.⁸⁵

Adanya Indikasi kartel memang sangat kuat, namun lemah dalam pembuktiannya. Lagi-lagi hal ini terkait dengan sebuah simpulan, apabila Indonesia dapat meningkatkan produksi kedelai nasionalnya dan mengurangi ketergantungannya pada produk impor utamanya kedelai asal Amerika, maka indikasi kartel kedelai kedepannya dapat dikurangi atau dihilangkan. Namun sekali lagi Indonesia masih sukar melepaskan diri dari pembangunan dalam ketergantungan

⁸⁴ Wawancara dengan Mantan Pejabat Tinggi PT.Cargill Indonesia, bertempat di Plaza Senayan, tanggal 16 Januari 2012 (Lampiran 2)

⁸⁵ Asep Toha, Sembako Naik; Depperdag Nyatakan Kedelai di Gudang Berizin, Legal, <http://polarisminor.blogspot.com/2008/02/sembako-naik.html>, di akses 11 November 2011 jam 21.30.

yang disebutkan Evans tersebut, importir kedelai dimanjakan oleh fasilitas kredit dari Pemerintah Amerika sehingga memilih kedelai Amerika Serikat yang mana dikuasai oleh Cargill Inc dan ADM.

3.4. Analisa Dampak Bagi Sektor Pertanian Indonesia

Dugaan kartel kedelai di dalam negeri ataupun krisis pangan di dunia merupakan akibat dari liberalisasi perdagangan dan perangkat aturan yang terlalu liberal, sebenarnya ekspektasi dibukanya pasar bebas adalah masyarakat akan lebih mudah memperoleh akses terhadap bahan pangan. Namun ternyata tidak demikian realitasnya. Di dunia, liberalisasi sektor pertanian mengakibatkan angka kelaparan dunia semakin meningkat dari 800 juta jiwa pada tahun 1996 menjadi 853 juta jiwa pada tahun 2007 padahal ketersediaan pangan (*food availability*) di pasar itu melimpah, permasalahannya adalah akses terhadap pangan (kedelai tiba-tiba hilang di pasaran tahun 2008) menjadi sulit dan tidak terjangkau oleh setiap orang yang membutuhkan.⁸⁶

Menurut Achmad Ya'kub dari perwakilan Serikat Petani Indonesia (SPI) menyatakan bahwa krisis kedelai merupakan salah satu contoh krisis harga pangan yang sebenarnya diakibatkan oleh beberapa sebab, yakni;⁸⁷

1. Pengalihan konsumsi pangan yang harusnya menjadi makanan, malah menjadi pakan ternak, misal; sapi, babi seperti di Norwegia.
2. Pengalihan makanan menjadi *agrofuel* (CPO sebagai alternatif energi)
3. Pangan dikategorikan kedalam komoditas berjangka, sudah banyak spekulasi dilakukan di bursa berjangka, misal; *New York Stock Exchange*, harga pangan kedelai kurang dari 90 hari bisa berubah-ubah dalam satu hari, padahal kedelainya berada disitu saja, ini semua telah menyebabkan kenaikan harga pangan dan yang mampu berspekulasi adalah petani berskala besar atau

⁸⁶ *Policy Paper* Serikat Petani Indonesia (SPI). *op.cit.*

⁸⁷ Wawancara dengan Achmad Yakub, Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI), bertempat di kantor SPI, tanggal 26 Januari 2012 jam 14.30. (Lampiran 3)

korporasi pertanian atau perusahaan distribusi hasil pertanian, seperti; Cargill sebagai salah satu perusahaan pendistribusi kedelai Amerika.

SPI melihat peran-peran perusahaan besar sangat berbahaya baik bagi konsumennya, selain tidak ada kepastian harga, juga tidak ada kepastian sehat atau tidak karena kedelai impor banyak mengandung GMO yang masih kontroversi. Dominasi perusahaan besar pada akhirnya merembet kepada UU tentang pangan, misalnya; pada UU No.7 tahun 1996 mengenai *food safety* dan standarisasi pangan. Melalui proses ini, akhirnya sektor pangan dikuasai via monopoli atau oligopoly (kartel). Karena pangan dikendalikan oleh *capital*, maka hanya perusahaan multinasional dan produsen besar yang dapat terus memperoleh keuntungan.

Keberadaan PT.Cargill Indonesia sebagai salah satu importir kedelai impor ini telah menyebabkan berbagai dampak pada seluruh mata rantai yang sangat bergantung pada kedelai, seperti;

3.4.1. Petani Kedelai Lokal

Implikasi bagi petani lokal sangat signifikan dan jelas telah memukul sektor pertanian, komoditas kedelai lokal yang kalah bersaing dengan kedelai impor. Berbagai wilayah sentra penanaman kedelai di wilayah Jawa Timur, seperti; Ponorogo, Bojonegoro, Tulung Agung dan Trenggalek, produksinya mulai terancam akibat keberadaan kedelai impor. Menurut Ruslan; salah satu narasumber yang merupakan ketua petani kedelai wilayah Jawa Timur yang berhasil diwawancarai penulis.⁸⁸ Beliau mengatakan bahwa keberadaan kedelai impor telah berdampak langsung karena harganya lebih murah dari kedelai lokal. Petani di Jawa Timur masih bertahan untuk menanam kedelai lokal karena selain Jawa Timur sebagai sentra penanaman kedelai di Indonesia, Ruslan selaku salah satu petani kedelai ingin melestarikan tanaman-tanaman lokal dan tidak menginginkan kalau kedelai lokal ini dikalahkan oleh kedelai impor, beberapa petani masih bertahan untuk menanam

⁸⁸ Wawancara dengan Ruslan; Ketua Petani Kedelai Wilayah Jawa Timur (SPI Jatim) melalui telepon tanggal 5 Maret 2012 jam 14.35 (Lampiran 7)

kedelai lokal karena adanya kebutuhan dari produsen tahu dan tempe, industri tahu dan tempe setiap harinya membutuhkan 5-10 ton kedelai sebagai bahan bakunya, namun saat ini kehadiran pesaing dari kedelai impor menjadi kendala.

Beliau menyadari keberadaan kedelai impor yang mulai masuk ke daerah-daerah, hal itu bisa mengancam keberadaan kedelai lokal yang hanya bisa masuk ke daerah-daerah saja, sementara kedelai impor biasanya sudah dipakai di kota-kota besar seperti di Surabaya, jadi apabila kedelai impor sudah mulai merembet ke daerah-daerah terpencil karena harganya yang lebih murah, jelas-jelas membahayakan eksistensi kedelai lokal di daerah.

Selain itu petani kedelai lokal juga memiliki kendala dalam penanaman berupa benih kedelai lokal yang mahal, yang kedua adalah tidak adanya benih kedelai lokal yang bagus sehingga hampir semua petani enggan menanam kedelai dikarenakan takut menderita kerugian akibat berubah-ubahnya harga saat penanaman dan saat panen.

Ruslan menyarankan agar pemerintah mempunyai program yang lebih baik untuk para petani khususnya petani kedelai, jangan sampai petani-petani Indonesia kalah bersaing dengan produk-produk luar.

3.4.2. Koperasi Tahu Tempe (KOPTI)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Asep Nurdin selaku Ketua 1 GAKOPTINDO.⁸⁹ Beliau mengakui bahwa pasokan kedelai KOPTI sebagian besar berasal dari para importir kedelai, tidak semuanya pasokan merupakan kedelai impor, ada juga kedelai yang berasal dari petani lokal, yakni; sekitar 10-20%, sisanya kedelai impor yang berasal dari Amerika. Alasan KOPTI menggunakan kedelai impor karena sedikitnya produksi kedelai lokal, selain itu harga kedelai impor yang lebih murah ketimbang lokal.

⁸⁹ Wawancara dengan Asep Nurdin; Ketua 1 GAKOPTINDO melalui telepon tanggal 01 Maret 2012 (Lampiran 4)

KOPTI hanya bertujuan untuk membantu pasokan kedelai anggota-anggotanya yang merupakan para pengusaha tahu dan tempe dengan menjalankan prinsip-prinsip koperasi. KOPTI mengakui kemudahan membeli kedelai impor karena mekanisme pembeliannya sangat sederhana, yakni; langsung membeli dari para importir yang terdaftar, seperti; CI atau GCU atau importir lainnya sesuai dengan permintaan anggota dan KOPTI memilih harga yang paling cocok dengan kemampuan daya belinya itu, harga kedelai dari para importir kedelai ini berbeda-beda karena kedelai impor yang mereka dapatkan harus diolah kembali, di pasang merk oleh para importir kedelai, misalnya; GCU dengan merk bola merah, Cargill dengan merk Pelangi, dll. Harga-harganya pun bisa berubah-ubah setiap waktu berdasarkan harga dunia atau NYMEX.

Dari segi mutu kedelai lokal sebenarnya jauh lebih baik dari kedelai impor, kedelai lokal ini memiliki rasa yang lebih gurih, sari dan wanginya masih ada, sementara kedelai impor sudah lama di simpan serta mutunya juga sudah banyak yang berkurang. Namun karena ukuran kedelai impor yang lebih besar dan harga yang murah kini mengungguli kedelai lokal.

Kedelai impor juga sempat menggerakkan harga kedelai di pasar pada tahun 2008, hal ini dikarenakan pemerintah saat ini tidak lagi mengatur harga, segalanya sesuatunya diserahkan pada mekanisme pasar sehingga harga sering dimainkan oleh para pelaku bisnis kedelai.

Senada dengan Ruslan, Asep Nurdin mengungkapkan kendala-kendala pada kedelai lokal, yakni; berubah-ubahnya harga, misalnya; waktu penanaman kedelai, harga kedelai lokal itu mahal, tetapi ketika panen harganya jatuh, memang kenyataannya bahwa pada tahun 1990-an harga kedelai pernah mencapai Rp.8.000/kg sehingga petani bergairah menanam kedelai sehingga produksi nasional mencapai 1,6 juta ton, kendala lainnya adalah jumlah petani kedelai banyak yang berkurang dengan jumlah sawah yang juga terbatas, apabila dikomparasikan dengan produk impor, kedelai impor berasal dari perkebunan yang sangat besar, selain itu rantai

distribusinya juga tidak panjang seperti di Indonesia dimana petani datang terlebih dahulu ke pengumpul dan lain sebagainya sehingga harganya pun menjadi mahal.

Sementara itu, kedelai impor di berbagai daerah sudah merambah bukan hanya wilayah kota, namun sudah ke daerah-daerah di Jawa Barat misalnya, penyalur kedelai berskala kecil yang diwawancarai penulis mengatakan bahwa pemasok kecil seperti ini mendapatkan kedelai dari pemasok kedelai yang lebih besar.⁹⁰ Ardi sebagai penyalur kedelai yang kecil tidak perlu bersusah-susah pergi ke kota untuk membeli kedelai impor karena di daerah yang lebih dekat jaraknya, kedelai impor itu sudah bisa didapatkan. Bahkan sekarang ini semua industri tahu dan tempe di daerahnya memakai kedelai impor sebagai bahan baku karena harganya itu jauh lebih murah, sementara dalam pemilihan merk kedelai yang di belinya tergantung pada harga dan persediaan kedelai impor di pasaran.

3.4.3. Pengrajin Tahu dan Tempe

Pengrajin tahu dan tempe yang penulis wawancarai mengakui bahwa kedelai lokal memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan kedelai impor karena biasanya kedelai itu adalah kedelai yang baru saja dipanen sehingga lebih wangi dan segar, rasanya juga lebih gurih, namun karena harga kedelai lokal saat ini berada di atas 7000an sementara yang impor 6750/kilo (harga per 8 April 2012), dari sekilo kedelai itu bisa dibuat 8 buah tempe, sementara harga tempe hanya berkisar 1000 rupiah. Kalau memilih yang di atas 7000an sementara harga tempe tetap 1000an, pengusaha tempe ini bisa menderita kerugian, apalagi ukuran kedelai lokal kecil-kecil, sementara kedelai impor berukuran lebih besar sehingga jumlah tempe yang dihasilkan lebih banyak. Pengusaha tempe mendapatkan pasokan kedelainya dari koperasi atau

⁹⁰ Wawancara dengan Ardi; Penyalur Kedelai Berskala Kecil bertempat di Kabupaten Cirebon, tanggal 8 April 2012 jam 12.30 (Lampiran 8)

membeli dari penyalur kedelai yang saat ini sudah memakai kedelai impor semua, kedelai impornya itu berasal dari Amerika.⁹¹

3.4.4. Konsumen

Konsumen yang diwawancarai penulis mengakui kalau tempe yang sekarang ada di pasaran rasanya tidak seguhrih dulu, namun karena ketersediaan di pasar hanya ada tempe yang seperti itu sehingga tidak ada pilihan lain bagi konsumen untuk membelinya, konsumen tidak terlalu peduli apakah bahan baku tempe itu berasal dari kedelai impor atau lokal, yang terpenting bagi mereka adalah harga tempe atau tahu masih terjangkau, konsumen juga tidak terlalu paham mengenai kedelai impor yang mengandung GMO karena 80% kedelai yang ditanam di negara-negara asal kedelai impor itu adalah hasil dari rekayasa genetik (GMO) yang masih pro dan kontra kandungan kimiawinya.⁹²

Dari indikator *variable dependent* dalam kasus kedelai ini bahwa adanya tingkat ketergantungan yang tinggi, krisis kedelai di tahun 2008, indikasi kartel para importir kedelai serta dampaknya bagi seluruh rantai bisnis kedelai dapat dianalisa pola hubungan ekonomi dan politik yang terjadi antara pemerintah, borjuasi lokal dan modal asing. Pemerintah nampaknya terkooptasi menjadi agen kapitalis dengan memberi kebijakan yang terlalu liberal dan longgar bagi pemodal asing, dalam hal ini Cargill inc. ataupun para borjuasi lokal dalam hal ini Cargill Grain milik PT.Cargill Indonesia yang bergerak sebagai importir kedelai impor asal Amerika Serikat tersebut dan diuntungkan pada saat terjadinya krisis kedelai di tahun 2008.

⁹¹ Wawancara dengan Pengrajin Tempe bertempat di Kota Kuningan, tanggal 10 April 2012 jam 11.30 (Lampiran 9)

⁹² Wawancara dengan salah satu Konsumen bertempat di Kota Kuningan tanggal 10 April 2012 jam 8.00 (Lampiran 10)

BAB 4 PT.CARGILL INDONESIA DALAM KOMODITAS SAWIT

4.1. Liberalisasi Perdagangan Dalam Komoditas Sawit

Dengan ketiadaannya grand *design* pertanian nasional menyebabkan lahirnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi pasar bebas, liberalisasi perdagangan misalnya, hal itu telah menciptakan kondisi dimana pasar nasional tidak sanggup lagi menahan gempuran pangan impor akibat surplus pangan yang berlebih khususnya dari negara-negara maju, seperti; Amerika Serikat. Pemerintah mengeluarkan *beleid* untuk menggenjot produksi hasil perkebunan berorientasi ekspor, seperti; minyak kelapa sawit (CPO). Sementara produksi tanaman pangan menjadi tersisihkan dan bahkan areal lahannya justru tergusur oleh sawit. Produksi dan areal sawit meningkat seperti pada gambar di bawah ini;

TABEL 4.1. Perkembangan Produksi dan Luas Areal Kelapa Sawit (2000 – 2010)

Tahun	Areal (Ha)				Produksi (Ton)			
	Petani Mandiri	Negara	Swasta	Total	Petani mandiri	Negara	Swasta	Total
2000	1.166.758	588,13	2.403.194	4.158.077	1.905.653	1.460.954	3.633.901	7.000.508
2001	1.561.031	609,95	2.542.457	4.713.435	2.798.032	1.519.289	4.079.151	8.396.472
2002	1.808.424	631,57	2.627.068	5.067.058	3.426.740	1.607.734	4.587.871	9.622.345
2003	1.854.394	662,8	2.766.360	5.283.557	3.517.324	1.750.651	5.172.859	10.440.834
2004	2.220.338	605,87	2.458.520	5.284.723	3.847.157	1.617.706	5.365.526	10.830.389
2005	2.356.895	529,85	2.567.068	5.453.817	4.500.769	1.449.254	5.911.592	11.861.615
2006	2.549.572	687,43	3.357.914	6.594.914	5.783.088	2.313.729	9.254.031	17.350.848
2007	2.752.172	606,25	3.408.416	6.766.836	6.358.389	2.117.035	9.189.301	17.664.725
2008	2.881.898	602,96	3.878.986	7.363.847	6.923.042	1.938.134	8.678.612	17.539.788
2009*	3.013.973	608,58	3.885.470	7.508.023	7.247.979	1.961.813	9.431.089	18.640.881
2010**	3.314.663	616,58	3.893.385	7.824.623	7.774.036	2.089.908	9.980.957	19.884.901

Sumber: Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, 2010

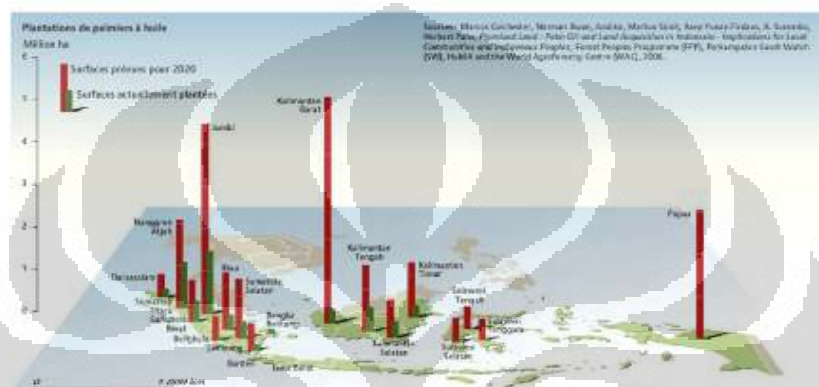
Ket: *data pendahuluan, ** estimasi

Pemerintah telah menyiapkan rencana untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan target produksi pada tahun 2020 mencapai 52 juta ton per tahun. Hal ini di icu oleh peningkatan permintaan khususnya di pasar internasional atas minyak nabati dari kelapa sawit khususnya digunakan untuk kebutuhan energi.

Dan dalam memenuhi target produksi sawit, pemerintah melakukan pembukaan areal-areal perkebunan baru, termasuk di daerah yang selama ini tidak

pernah menanam sawit seperti di Sulawesi dan Papua.⁹³ Rencana perluasan perkebunan mencapai 22 juta hektar dari total pengembangan sejumlah propinsi. Seperti dalam gambar berikut ini;

GAMBAR 4.1. Rencana Perluasan Perkebunan Kelapa Sawit hingga tahun 2020



Sumber: *Le Monde Diplomatique*, 2009

Ket: grafik hijau areal perkebunan yang ada saat ini. Grafik merah rencana perluasan areal perkebunan hingga tahun 2020.

Indonesia memang memiliki lahan sawit terluas di dunia, tetapi belum memiliki kedaulatan di sektor kelapa sawit sehingga banyak memberikan ruang bagi industri besar seperti asing untuk menjadi pemain besarnya. Sekitar separuh atau 50% dari lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah dimiliki oleh perusahaan asing.⁹⁴

Dalam komoditas minyak kelapa sawit/Cargill Palm Oils, di Indonesia, kegiatan usaha PT.Cargill Indonesia meliputi:

- PT Hindoli di Sumatra Selatan, yang merupakan investasi pertama Cargill di perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang dilakukan pada tahun 1996 ketika mengakuisisi PT Hindoli di Sumatra Selatan. Kegiatan usaha PT Hindoli mula-

⁹³ *Policy Paper* Serikat Petani Indonesia (SPI), 100 tahun Industri dan Perkebunan Sawit di Indonesia, Saatnya Memajukan Kepentingan Nasional dan Kemakmuran Rakyat Tani, Maret 2011.

⁹⁴ *Neraca*, "Separuh Lebih Lahan Sawit Di kuasai Perusahaan Asing," www.neraca.co.id/.../separuh-lahan-sawit-dikuasai-perusahaan-asing/, 15 Mei 2011. Di akses tanggal 17 November 2011 jam 13.32.

mula terdiri dari 10.000 ha perkebunan kelapa sawit penghasil tandan buah segar yang Cargill proses di dua pabrik milik perusahaan menjadi minyak kelapa sawit mentah dan biji sawit. Pada tanggal 25 Februari 2009, PT Hindoli menerima sertifikasi dari *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). Hindoli bukan saja sebagai perkebunan kelapa sawit investasi Cargill yang pertama yang diberikan sertifikasi berkesinambungan oleh RSPO, tapi juga merupakan salah satu dari perkebunan kelapa sawit pertama di Indonesia dan yang pertama di Sumatra Selatan yang menerima sertifikasi ini.⁹⁵ Para petani plasma kelapa sawit berperan cukup penting bagi keberhasilan perkebunan Cargill, Pabrik PT.Hindoli memproses tandan buah segar dari perkebunan kelapa sawit perusahaan dan yang di beli dari petani plasma.⁹⁶ Di Hindoli, Cargill memberikan bantuan kepada sekitar 8.500 petani plasma, yang kebanyakan dari mereka adalah transmigran yang disponsori oleh Pemerintah. Mereka memiliki sekitar 17.000 ha perkebunan kelapa sawit.⁹⁷ PT.Hindoli dalam setiap hektar kebun sawitnya sanggup memproduksi 26.000 ton sebelum sistem RSPO diterapkan yang hanya sekitar 18.000 ton tandan buah segar (TBS) per bulan.⁹⁸

- PT.Harapan Sawit Lestari (HSL) di tahun 2005, Cargill berhasil mengakuisisi PT.Harapan Sawit Lestari dan anak perusahaannya di Kalimantan. Kegiatan usaha ini terdiri dari 31.000 ha perkebunan kelapa sawit penghasil tandan buah segar yang Cargill proses di dua pabrik milik perusahaan menjadi minyak kelapa sawit mentah dan biji sawit yang berkualitas tinggi. Para petani perkebunan rakyat kelapa sawit cukup berperan bagi keberhasilan perkebunan Cargill. Di PT.Harapan Sawit Lestari, Cargill memberikan bantuan kepada sekitar 3.000 petani perkebunan rakyat, yang memiliki sekitar 6.500 ha perkebunan kelapa sawit.

⁹⁵ www.cargill.co.id, di akses 2 November tahun 2011 jam 11.20.

⁹⁶ *Antara*, "Hindoli Targetkan Perluas Kebun Plasma Sawit," id.berita.yahoo.com/hindoli-targetkan-perluas-kebun-plasma-sawit, 21 November 2010 jam 21.00, di akses 11 Desember 2011.

⁹⁷ www.cargill.co.id, di akses 2 November 2011 jam 11.20

⁹⁸ Yang berkelanjutan yang dicari, www.agrina-online.com/show-article.php?rid=10&nid=1778, 16 Maret 2009. Di akses 11 Oktober 2011 jam 13.43.

- PT.Indo Sawit Kekal. Perusahaan bernama Indo Sawit Kekal ini merupakan salah satu anak usaha Cargill dengan unit bisnis Cargill Palm Oils ini memiliki 8000 karyawan dan mengoperasikan empat pabrik minyak kelapa sawit dengan kapasitas seluruhnya 320 ton produk sawit per jam. Selain itu, Cargill membeli buah kelapa sawit dari sekitar 11.500 petani perkebunan plasma yang memiliki perkebunan 23.000 ha.⁹⁹

Cargill merupakan salah satu perusahaan raksasa dunia dengan bisnis unit kelapa sawit memiliki perkebunan kelapa sawit yang luas di Kalimantan Barat, yakni; melalui anak perusahaannya yang bernama PT.Harapan Sawit Lestari (HSL). Selain HSL, Cargill juga mempunyai anak perusahaan kelapa sawitnya lainnya, yakni; PT.Indo Sawit Kekal (ISK) dan PT.Hindoli, kasus konversi lahan PT.Hindoli sempat ramai dibicarakan media sehingga perlu di teliti dalam kaitannya pola aliansi tripel dan pembangunan dalam ketergantungan tersebut terjadi.

4.2. Konversi Lahan PT.Hindoli-Cargill di Sumatera Selatan

Menurut informasi yang di dapat dari berbagai media yang mem-*blow up* kasus konversi lahan PT.Hindoli-Cargill. Cargill menyatakan tidak membuka hutan secara ilegal seluas 1.976 hektare di Sumatera Selatan melalui anak perusahaannya yang bernama PT Hindoli seperti diklaim oleh LSM bernama Greenomics Indonesia.¹⁰⁰ Alasannya, sebelum diambil alih oleh Cargill, lahan tersebut telah dibuka dan ditanami oleh warga setempat, beberapa tahun kemudian barulah diketahui status lahan itu milik Kementerian Kehutanan (Kemenhut).¹⁰¹ PT Hindoli mengaku telah melapor ke Kemenhut dan membayar sejumlah denda serta ganti rugi yang ditentukan pemerintah, proses penyelesaian status lahan itu masih terus

⁹⁹ www.cargill.co.id, di akses 2 November 2011 jam 11.20 .

¹⁰⁰ Bisnis Indonesia. Rustam Agus, "Cargill bantah buka hutan secara ilegal,"

<http://bataviase.co.id/node/357946>, 26 agustus 2010. Di akses 4 November 2011 jam 12.34.

¹⁰¹ *Ibid.*

berlanjut baik di tingkat pemerintah pusat yakni Kemenhut, pemerintah provinsi dan kabupaten.¹⁰²

Sementara itu, Greenomics Indonesia menegaskan perambahan kawasan hutan yang dilakukan PT Hindoli memiliki dasar yang kuat karena merupakan hasil identifikasi Badan Planologi Kementerian Kehutanan.¹⁰³ Sesuai laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembukaan kawasan hutan yang melanggar undang-undang oleh anak perusahaan Grup Cargill tersebut dituangkan dalam berita acara tanggal 9 Agustus 2005 diketahui seluas sekitar 1.976 hektare, BPK meminta PT.Hindoli memperhatikan UU 41/1999 tentang Kehutanan, yakni Pasal 50 dan ketentuan pidana Pasal 78.¹⁰⁴ Greenomics menilai anak perusahaan Cargill tersebut perlu kembali mempelajari laporan BPK yang merekomendasikan kepada Menteri Kehutanan agar memerintahkan Dirjen Bina Produksi Kehutanan untuk menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Rp5,22 miliar (dibulatkan) dan US\$289,907,72.¹⁰⁵ Cargill pun melakukan semua pembayaran dendanya.

Pada perkembangan selanjutnya, BPK melakukan revisi nominal denda yang seharusnya lebih besar. BPK menerbitkan kekurangan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) berupa provisi sumber daya hutan/dana reboisasi (PSDH/ DR) sebesar Rp966 juta dan USS289.907.72 dan ganti rugi tegakan (GRT) sebesar Rp4,25 miliar kepada PT Hindoli.¹⁰⁶ Kekurangan pembayaran DR/PSDH itu, merupakan hasil perhitungan atas pemanfaatan kayu hutan alam di Sungai Tualang seluas 1534 ha yang memiliki potensi kayu sebanyak 16.24 m/ha dan pemanfaatan kayu hutan alam di kelompok Sungai Dawes seluas 442 ha dengan potensi kayu 11.20 m/ha.¹⁰⁷ Kementerian Kehutanan telah menagih ganti rugi kepada PT Hindoli dengan

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ *Bisnis Indonesia*. Erwin Tambunan Rustam Agus, "Perambahan hutan oleh Cargill atas laporan BPK", <http://202.52.131.11/node/359979>, 27 Agustus 2010, di akses 7 November 2011 jam 13.23.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Bisnis Indonesia*. Edwin Tambunan, "Kemenhut Terbitkan Denda PT.Hindoli," www.bataviase.co.id/node/363086, 30 Agustus 2010. Di akses 7 November 2011 jam 13.33.

¹⁰⁷ *Ibid.*

mengeluarkan surat perintah pembayaran (SPP) tertanggal 7 September 2010, yang memerintahkan perusahaan itu untuk melunasi ganti rugi tegakan Rp 4,25 miliar.¹⁰⁸ Dan Cargill akhirnya melakukan pelunasan pembayaran denda tersebut.

Penulis mengumpulkan informasi dari berbagai pihak untuk memperoleh titik terang terhadap kasus konversi lahan ini sehingga di dapat berbagai sudut pandang, yakni; dari Cargill (Berdasarkan wawancara dengan mantan pejabat tinggi PT.Cargill Indonesia dan kolega bisnis PT.Cargill Indonesia), sudut pandang LSM dan Pemerintah (Berdasarkan email dari Elfian Effendi selaku direktur eksekutif Greenomics Indonesia dan wawancara dengan mantan pejabat BPK RI). Hal ini dilakukan untuk kemudahan menganalisa dan membangun kesimpulan yang konstruktif.

4.3. Kasus Hindoli-Cargill Menurut Sudut Pandang Cargill

Nama perusahaan Hindoli berasal dari singkatan Holand Indonesia yang sudah ada sejak tahun 80-an. Pemiliknya dahulu adalah orang Belanda-Indonesia.¹⁰⁹ Cargill membeli Hindoli karena salah satu bisnis unitnya adalah sawit dan kebutuhan akan pasokannya bisa dipenuhi melalui anak usahanya ini.¹¹⁰

Ketertarikan Cargill pada Hindoli adalah karena setelah mendengar kabar suksesnya pengelolaan petani plasma di Sumsel oleh Hindoli terutama di sentra perkebunan kelapa sawit Sungai Lilin, Musi Banyuasin, Palembang, akhirnya perusahaan Amerika Serikat ini ingin memiliki Hindoli dan Cargill berhasil mengakuisisi hampir 100% kepemilikan Hindoli di Sumsel pada Mei 1995.¹¹¹

¹⁰⁸ *Bisnis Indonesia*. Erwin Tambunan, "Greenomics Minta Nestle Unilever boikot CPO Cargill," <http://bataviase.co.id/node/398278>, 29 September 2010, di akses 7 November 2011 jam 21.00.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Kolega Bisnis Cargill bertempat di Jakarta Pusat, tanggal 5 Desember 2012 jam 20.30 (Lampiran 1)

¹¹⁰ Wawancara dengan Mantan Pejabat Tinggi PT.Cargill Indonesia bertempat di Plaza Senayan, tanggal 16 Januari 2012 jam 15.00 (Lampiran 2)

¹¹¹ *Bisnis Indonesia*, kolom opini, www.bisnisindonesia.com, 05 Juli 2011, diakses 6 Desember 2011 jam 21.00.

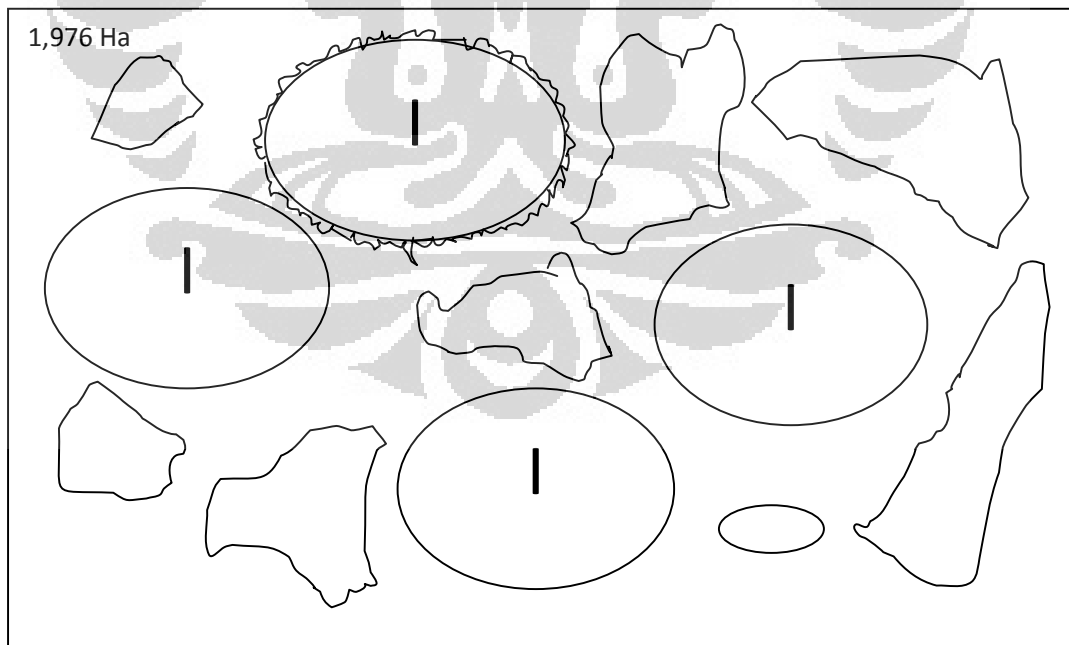
Menurut salah satu mantan pejabat tinggi Cargill yang bersedia untuk diwawancarai. Dalam kasus konversi lahan Hindoli-Cargill di Sungai Lilin, Palembang.




Beliau mengungkapkan bahwa posisi Cargill sebenarnya tidak 100% salah. Hal ini diawali dengan adanya pelepasan hutan melalui Program Perkebunan Trans Rakyat (PTR), yakni; Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi. Hal itu sudah terjadi jauh sebelum Cargill masuk.

Diakui olehnya, bahwa Cargill membeli lahan dari masyarakat transmigran dengan kelengkapan surat-surat tanah yang mereka miliki, namun karena praktek di lapangan bahwa batas patok di dalam kawasan hutan itu maya dan pemilik tanah memiliki tanah yang bermacam-macam bentuknya sehingga hal ini menyebabkan ketidakjelasan pada garis batasnya.

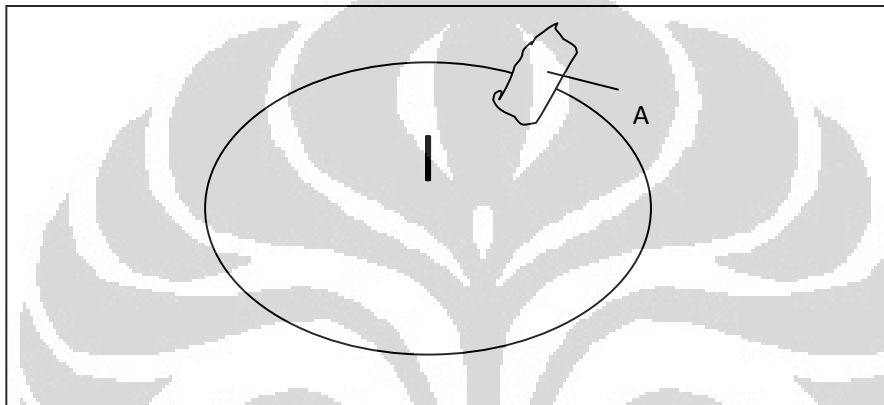
Cargill melebihi kawasan hutan yang dikelolanya, namun tidak pernah lompat dari batas kawasan, seperti di dalam gambar ini;

GAMBAR 4.2. Perkebunan Hindoli- Cargill dan kawasan hutan



1.  : Wilayah Perkebunan kelapa sawit Cargill.
2.  : tanah-tanah masyarakat transmigran
3.  : kawasan hutan

Jika diperbesar gambarnya menjadi seperti berikut ini;



Sumber: di olah dari keterangan Mantan Pejabat Tinggi Cargill

Cargill membeli lahan warga yang masuk ke area hindoli, akibat batas patok yang tidak jelas, ini melebihi kawasan konsesinya, namun tidak pernah lompat dari batas-batas yang ada.

Masalah itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1998-1999 dan karena telah melebihi kawasan, maka mantan pejabat tinggi Cargill yang baru masuk di tahun 2003 menyadari adanya kesalahan itu, Beliau mendatangi Departemen Kehutanan, namun ternyata tidak dilakukan perbaikan karena sebenarnya kawasan tersebut termasuk Hutan Produksi Konversi (HPK).

HPK adalah kawasan hutan yang memang disiapkan untuk dikonversi menjadi non hutan, tapi dengan melakukan pembayaran-pembayaran kepada negara serta ada persyaratan-persyaratannya.

Cargill melakukan kalkulasi area dan dihitung-hitung total semuanya di empat wilayah itu adalah 1,976 Ha. Menurutnya, Hindoli-Cargill merupakan perusahaan

yang pertama kali di Indonesia dengan niat baik untuk menyelesaikan masalah ini, mereka menyatakan kesediaan bila harus di denda oleh pemerintah, mereka siap membayar dendanya berapapun nominal yang harus dikeluarkan.

Departemen Kehutanan mendatangi Cargill serta membentuk tim untuk melakukan penelitian di lapangan, mereka menghitung total areanya yang berjumlah 1,976 Ha sehingga tidak ada permasalahan lagi, hanya memerlukan surat rekomendasi dari Gubernur Sumatera Selatan untuk melepaskan kawasan ini untuk perusahaan dan hal itu telah disepakati bersama. Namun, tiba-tiba ada laporan dari kepolisian. Padahal sebenarnya masalah Cargill sudah dalam proses penyelesaian pemutihan dan Departemen Kehutanan sudah memproses ini secara administratif.

Menurut Laporan BPK pada tanggal 15 Januari 2010, Cargill diharuskan membayar ganti rugi tegakan dan Dana Reboisasi (DR) serta Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Dalam undang-undang kehutanan, misalnya ketika melakukan penebangan hutan, kayunya yang berdiameter lebih besar dari 40 cm diambil oleh perusahaan. Karena di nilai sudah mengambil hasil hutan ada dua mekanisme *penalty* yang harus di bayar, yakni; dana reboisasi dan PSDH. Dana reboisasi digunakan untuk melakukan reboisasi hutan. Sementara itu, PSDH adalah dana kompensasi karena perusahaan di nilai mengambil sumber daya hutan.

Setelah ditanyakan mengenai hal ini, mantan pejabat tinggi Cargill itu membantah bahwa tidak benar jika Cargill telah melenyapkan kayu-kayu alam sebanyak 23.265,13 m³, karena ketika dahulu kawasan ini akan dilepaskan, ada studi dari Departemen Kehutanan, studinya adalah menghitung berapa potensi kayunya, misalnya 2 juta m³ X 1,976, tapi tanah-tanah ini semuanya dibeli dari masyarakat sehingga sudah sedikit kayunya, walaupun ada kayunya sudah mereka ambil. Menurutnya, Cargill sangat terkenal menjaga reputasi, namun pemberitaan seakan seperti diputar balik, seolah-olah perusahaan multinational yang selalu salah.

Hal itu senada dengan pendapat Praktisi Perkebunan yang juga Kolega Bisnis PT.Cargill Indonesia yang menyatakan bahwa Cargill merupakan perusahaan yang berani melaporkan adanya penyimpangan praktek masa lalu. Hal yang belum berani

atau tidak dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Semua orang sudah mengetahui adanya lahan area Hindoli dan lahan plasma warga transmigran. Peraturan pemerintah pada saat itu mensyaratkan petani plasma sebesar 20% lahan, pemerintah menginginkan 2 Ha diserahkan kepada masyarakat, dengan jumlah berbagai ribu orang, karena plasmanya tidak memiliki tanah yang cukup, maka areanya masuk ke Hindoli, hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan batas patok sehingga Hindoli mengambil areal kawasan hutan supaya jumlahnya menjadi satu-satu. Area hutan itu akhirnya dipakai dan ketika Cargill masuk ke manajemen Hindoli, Cargill sebenarnya mau mengurus perizinan, namun izin pelepasan hutannya dari tahun 2000 tidak di urus. Akhirnya PT.Hindoli diwajibkan membayar denda, Cargill dituduh merambah hutan yang sebenarnya sudah dilakukan Hindoli sebelum Cargill masuk. Sejak tahun 1990-an tidak ada hutan lagi di areal tersebut, kayu-kayu alamnya hanya sedikit dan kalaupun ada sudah di ambil masyarakat.

Sementara itu, mengenai pemberitaan masalah perampasan lahan warga Sukadamai, Sungai Lilin daerah Palembang secara sepihak oleh perkebunan sawit Hindoli, mantan pejabat tinggi Cargill ini mengatakan bahwa Hindoli telah membayar semua tanah yang dibelinya lengkap dengan dokumen pembelian dan surat-surat tanah, Cargill berusaha menyelesaikan konflik secara baik-baik.

4.4. Kasus Hindoli-Cargill Menurut Sudut Pandang LSM

Melalui email dari Elfian Effendi selaku Direktur Greenomics Indonesia menulis bahwa dasar Greenomics mengkritisi Cargill adalah berdasarkan laporan audit BPK tanggal 15 Januari 2010.¹¹² Greenomics mengungkapkan anak perusahaan Cargill yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, yakni PT Hindoli, telah membuka hutan secara ilegal.¹¹³ Hal itu didasarkan pada laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 15 Januari 2010, terungkap bahwa PT Hindoli dinyatakan

¹¹² Email dari Elfian Effendi; Direktur LSM Greenomics Indonesia tanggal 26 Februari 2012 (Lampiran 11).

¹¹³ *Bisnis Indonesia*. Erwin Tambunan, "Greenomics Grup Cargill buka hutan secara illegal," bataviase.co.id/node/352815, 23 Agustus 2010, di akses 7 November 2011 jam 14.54.

telah melakukan pembukaan kawasan hutan secara ilegal di Provinsi Sumatra Selatan seluas 1.976 hektare (ha) atau hampir setara 2.000 lapangan sepak bola. Cargill telah menyebabkan timbulnya kerugian negara sekitar Rp5.217.796.440 dan US\$289,907,72. PT.Hindoli juga diwajibkan membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) sebesar Rp 966.258.600 dan dana reboisasi (DR) US\$289,907,72. Perambahan kawasan hutan oleh perusahaan Cargill itu telah melanggar Pasal 50 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ancamannya adalah penjara paling lama 10 tahun dan membayar denda serta membayar ganti rugi sesuai tingkat kerusakan yang ditimbulkannya.

Berdasarkan kalkulasi BPK yang di revisi kemudian, pembukaan kawasan hutan yang dilakukan secara ilegal oleh Cargill itu juga telah melenyapkan kayu hutan alam dengan volume seluas 23.265,13 m dan diharuskan membayar ganti rugi tegakan (GRT) sebesar Rp4.251.537.840. Greenomics Indonesia pun gencar mengekspos laporan audit BPK RI tanggal 15 Januari 2010 mengenai kasus pembukaan kawasan hutan yang dilakukan oleh Hindoli-Cargill, Kementerian Kehutanan telah meminta bantuan POLRI melalui surat tertanggal 9 Agustus 2005 dan 4 Agustus 2009 (berselang hingga empat tahun) perihal perintah pembayaran ganti rugi tegakan sebesar Rp 5,41 miliar. Setelah surat kedua dari Menteri Kehutanan pada 9 Agustus 2009 tersebut, PT Hindoli melakukan pembayaran ganti rugi tegakan tersebut pada tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp 5,41 miliar. Namun, berdasarkan laporan audit BPK tertanggal 15 Januari 2010 tersebut, BPK mengungkapkan bahwa nilai ganti rugi tegakan kayu yang seharusnya dibayarkan oleh PT Hindoli adalah sebesar Rp 9,66 miliar, bukan RP 5,41 miliar. Sehingga BPK meminta Kementerian Kehutanan untuk membuat surat perintah pembayaran kembali kepada PT Hindoli untuk membayar sebesar Rp 4,25 miliar lagi. Mulai Agustus 2010, Greenomics mendesak PT.Hindoli untuk membayar ganti rugi kayu tersebut secara penuh melalui kampanye media dan advokasi langsung kepada pihak Kementerian Kehutanan.

Pada tanggal 7 September 2010, pihak Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat perintah pembayaran kepada PT.Hindoli untuk membayar Rp 4,25 miliar sesuai laporan audit BPK. Walaupun PT.Hindoli sempat meminta penjelasan atas surat perintah pembayaran tersebut serta meminta pengunduran waktu pembayaran kepada pihak Kementerian Kehutanan, akhirnya pada November 2010, PT Hindoli telah membayar sebesar Rp 4,25 miliar tersebut. Artinya, anak usaha Grup Cargill ini telah membayar secara penuh sesuai laporan audit BPK, yakni; sebesar Rp 9,66 miliar (sekitar USD 1 juta).

Pada saat Greenomics mengkonfirmasi soal pembayaran tersebut kepada pejabat berwenang dari Kementerian Kehutanan, pejabat tersebut menjelaskan bahwa verifikasi pembayaran tersebut diperoleh pada Februari 2011. Greenomics mengkonfirmasi langsung kepada pejabat berwenang di Kementerian Kehutanan pada tanggal 17 Februari 2012.

Elfian Effendi selaku direktur dari Greenomics Indonesia yang berkewajiban mengkritisi permasalahan semacam ini, sebelumnya sangat gencar mengkritik Cargill atas laporan audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) tertanggal 15 Januari 2010 tersebut, namun beliau juga sangat mengapresiasi atas kepatuhan Cargill dalam melakukan pembayaran dendanya.

Greenomics menilai kepatuhan Cargill tersebut sepatutnya menjadi contoh yang baik yang perlu ditiru oleh perusahaan-perusahaan sawit lainnya yang terlibat dalam pembukaan kawasan hutan tanpa izin sah.

4.5. Kasus Hindoli-Cargill Menurut Sudut Pandang BPK

BPK selaku auditor independen melakukan pemeriksaan kasus konversi lahan PT.Hindoli sebagai bagian dari audit terhadap instansi Pemerintah, yakni; Kementerian Kehutanan.¹¹⁴ BPK kemudian melakukan pemeriksaan dan kalkulasi. Setelah selesai dilakukannya audit, BPK menyampaikan laporannya antara lain ke

¹¹⁴ Wawancara dengan Mantan Pejabat BPK RI tanggal 21 Januari 2012 jam 19.46 (Lampiran 12)

Kementerian Kehutanan sehingga pihak kehutanan yang kemudian menyelesaikan dan memberitahukan kepada PT.Hindoli atas laporan audit BPK tersebut.

Dan setiap enam bulan sekali BPK menyampaikan laporan auditnya dalam bentuk IHPS ke DPR, Laporan tersebut masuk ke DPR, tapi tidak secara parsial, di gabung dengan instansi lainnya selama satu semester. Kemudian DPR berdasarkan informasi dari IHPS itu akan memanggil Menteri Kehutanan untuk menanyakan apakah rekomendasi dari BPK sudah ditindaklanjuti atau belum, rekomendasi ini sifatnya perintah. Menteri Kehutanan begitu menerima laporan dari BPK diharuskan untuk segera menindaklanjuti, kalau ada pihak-pihak yang harus mengganti atau dituntut ganti rugi, maka dilakukan penagihan oleh departemen tersebut kepada perusahaan, kemudian denda itu dibayarkan masuk ke kas negara melalui instansi Kementerian Keuangan bagian anggaran dengan kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Mengenai revisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengoreksi kalkulasi GRT yang dihitung dari volume tegakan dikali 56% volume kayu HPH dengan sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia (TPT).¹¹⁵ Badan Pemeriksa Keuangan mengatakan GRT bukan merupakan PSDH/DR karenanya sesuai dengan Undang-Undang No.41/1999 tentang kehutanan sebagaimana bunyi Pasal 10 menyebutkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara. Hal ini diperjelas Kepmenhut No.146/Kpts-II/2003 Pasal 11.¹¹⁶

4.6. Analisa Kasus dan Dampak Bagi Sektor Pertanian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (pasal 23) di mana disebutkan bahwa penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan (a) penetapan fungsi kawasan hutan meliputi kegiatan (a) penetapan fungsi kawasan

¹¹⁵ *Bisnis Indonesia*. Erwin Tambunan, "Kemenhut terbitkan denda PT.Hindoli", *op.cit.*

¹¹⁶ *Ibid.*

hutan dan (b) penggunaan kawasan hutan. Fungsi hutan yang dimaksud dalam PP 44 Tahun 2004 adalah:¹¹⁷

- a. Hutan Lindung
- b. Hutan Produksi (Hutan Produksi Tetap, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi)
- c. Hutan Konversi, yang meliputi :
 - Hutan Suaka Alam, yang terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa
 - Hutan Pelestarian Alam, yang terdiri atas Taman Nasional, Taman Hutan
- d. Raya dan Taman Wisata Alam
 - Taman Buru.

Sementara itu kriteria Hutan Produksi adalah:¹¹⁸

1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) apabila skor kelas lereng, kelas tanah dan intensitas curah hujan berkisar antara 125 mm dan 174 mm dan kawasan tersebut di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
2. Hutan Produksi Tetap (HPT) apabila total skor kelas lereng, kelas tanah dan intensitas curah hujan lebih kecil dari 125 mm dan kawasan tersebut diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
3. Hutan Produksi yang dapat di konversi (HPK) apabila total skor sama dengan butir 2 (penetapan hutan produksi tetap), serta kawasan yang secara keruangan dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian dan perkebunan.

Berdasarkan keterangan dari berbagai narasumber, disimpulkan bahwa Cargill masuk ke manajemen Hindoli di tahun 1995-1996, sementara maraknya peristiwa ini terjadi mulai tahun 1998, mungkin sebelum Cargill masuk ke Hindoli, Hindoli telah melakukan hal yang sama, namun dalam sudut pandang penulis tetap saja kesalahan dapat dilimpahkan kepada Cargill karena Cargill sampai tahun 2000 tidak mengurus

¹¹⁷ Indef, *Ekonomi Politik Kehutanan; Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, (Jakarta; INDEF, 2012) h.36.

¹¹⁸ *Ibid.*

perizinan, hal ini juga terjadi pada anak usaha Cargill yang lain, yakni; PT.Harapan Sawit Lestari (HSL) yang menurut pemberitaan berdasarkan laporan investigasi RAN berjudul *The Cargills Problem with Palm Oil*, Cargill tidak dapat menunjukkan satupun dari empat perusahaan milik Grup Cargill yang berada di Kalimantan Barat tersebut yang memiliki kelengkapan izin perkebunan sawit.¹¹⁹ Tiga dari empat perusahaan sawit milik Cargill itu tidak mengantongi izin pemanfaatan kayu (IPK) dalam penyiapan lahan.¹²⁰ Dua dari empat perusahaan milik Cargill itu juga tidak memiliki izin usaha perkebunan (IUP).¹²¹

Namun ketika Cargill dibawah kepemimpinan mantan pejabat tinggi yang penulis wawancarai, mantan pejabat tinggi tersebut mengungkapkan bahwa beliau beritikad baik untuk melapor kepada Kementerian Kehutanan. Setelah itu berlaku mekanisme dendanya terlepas dari apakah Cargill mengambil potensi kayu alam di hutan atau tidak, namun dapat dikatakan bahwa Cargill melanggar ketentuan hukum Indonesia, tetapi juga pelanggaran hukum itu diakuinya dan Cargill bersedia mematuhi peraturan dengan membayar semua denda yang dijatuhkan kepadanya itu, termasuk revisi audit BPK pada tanggal 15 januari 2010.

Kepatuhan Cargill membayar seluruh denda yang dijatuhkan padanya dapat dijadikan contoh khususnya oleh para pelaku industri perkebunan. Begitu pula dengan pemberlakuan RSPO baik pada PT.Hindoli dan petani plasmanya yang merupakan komitmen Cargill untuk menjalankan bisnis kelapa sawit yang berkelanjutan. Para petani kelapa sawit binaan PT.Hindoli terdiri dari 8.800 petani plasma yang saat ini terorganisasi dalam 17 koperasi pada lahan seluas 17.594 hektar.¹²² Petani plasma itu menerima sertifikat *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), setelah pada tahun sebelumnya perkebunan PT.Hindoli mendapatkan sertifikat yang sama, Cargill berkomitmen untuk memproduksi minyak kelapa sawit

¹¹⁹ *Bisnis Indonesia*, Erwin Tambunan, "Greenomics minta Nestle Unilever boikot CPO Cargill," www.bisnisindonesia.com, di akses 12 Desember 2011 jam 15.00.

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Antara*, "Hindoli Targetkan Perluas Kebun Plasma Sawit," id.berita.yahoo.com/hindoli-targetkan-perluas-kebun-plasma-sawit, 21 November 2010, di akses 12 November 2011 jam 21.22.

yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.¹²³ Setiap petani rata-rata memiliki laba seluas dua hektare.¹²⁴

Meskipun begitu perlu diperhatikan bahwa kondisi ini juga membuka peluang terjadinya dominasi lahan perkebunan apabila pemerintah tidak segera membenahi sektor perkebunan yang masih dalam keadaan carut marut. Apalagi setengah lahan sawit telah dikuasai oleh asing, sementara perusahaan asing seperti Cargill mau menyanggupi berapa pun denda dan bagaimana bentuk mekanisme denda yang di atur, yang pada akhirnya lahan tersebut kemudian menjadi milik Cargill.

Mantan Pejabat Tinggi Cargill juga mengungkapkan selain kepatuhan Cargill dalam membayar dendanya, Cargill juga turut menyumbang besarnya pajak ekspor yang diserahkan Cargill pada negara, pajak ekspor merupakan pajak yang harus dibayarkan setiap kali dilakukannya ekspor.

Beliau mencontohkan, misalnya saja; perhitungan harga sawit \$1000 di kurang dengan biaya-biaya dan hasilnya adalah 500, dikenakan PPH (pajak dari laba perusahaan) sebesar 25% menjadi \$125 dan PPN 10% sebesar 50, di tambah pajak ekspor misalnya 20% dari \$1000 menjadi \$200. Jadi pajak yang di dapat pemerintah pada satu kali ekspor ini saja sudah mencapai \$375.

Cargill turut menyumbang devisa pada negara yang cukup besar, dari pajak ekspor dan Pph serta Ppnnya. Selain itu pula, dalam perkebunan kelapa sawit ada *multiplier effect* dari biaya menanam sawit, biaya tenaga kerja, biaya pupuk, dll. Memang berdasarkan data yang dihimpun dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tahun 2008, perkebunan kelapa sawit mempekerjakan 3,06 juta orang dimana 3,047 juta bekerja di perkebunan besar, 308.000 di PTPN, sementara itu terdapat 1.920.000 petani sawit skala kecil. Sedangkan dari 470 pabrik pengolahan kelapa sawit yang ada di Indonesia, atau yang tercatat di GAPKI, mempekerjakan 63.450 orang dan total nilai perdagangan kelapa sawit mencapai angka

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

10.366.610.000 US\$.¹²⁵ Kelapa sawit memang merupakan tanaman yang ditujukan untuk kebutuhan ekspor dengan daerah tujuan pemasarannya terutama ke Eropa dan Amerika Serikat.

Sementara untuk pasokan dalam negeri, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan minyak goreng, di tahun 2007 Hindoli memasok 1.000 ton untuk kebutuhan minyak goreng di dalam negeri, sementara sisanya dilakukan untuk ekspor. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit pemasok CPO untuk minyak goreng menurut keputusan Menteri Pertanian tahun 2007 tercermin pada data berikut ini;

TABEL 4.2. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit pemasok CPO untuk minyak goreng tahun 2007

Nama Perusahaan	Pasukan CPO (ton)	Total Luas Lahan di Indonesia	Luas Lahan yang ditanami di Indonesia
Sinar Mas group/PT Golden Agri Resources	15.000	320.463	113.562
Wilmar International group	7.500	210.000	64.700
PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IV	6.675		
Astra Agro Lestari group/PT Astra Agro Lestari Tbk	6.000	192.375	125.461
Minamas Plantation group	6.000		
Musim Mas group	6.000		
PT Perkebunan Nusantara	5.650		

¹²⁵ Membangun Indonesia dengan Kelapa Sawit. Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI). Infosawit. Jakarta.2009.

(PTPN) III			
Asian Agri group/Raja Garuda Mas	5.000	259.075	96.330
Duta Palma group	5.000	65.800	25.450
Salim group/PT Salim Plantations/Indofood group/PT IndoAgri	5.000	1.155.745	95.310
PT. Perkebunan Nusantara(PTPN) V	4.380		
LONSUM group(PT PP London Sumatera Indonesia)/Napan Group	4.000	245.629	78.944
PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII	3.295		
Permata Hijau Sawit group	3.000		
Best Agro group	2.000		
PT Socfindo/Socfin Group	2.000		
PT. ToIan Tiga/SIPEF Group	1.600		
Bakrie Plantation group/PT Bakrie Sumatra Plantations	1.200	49.283	23.392
Sungai Budi group	1.000		
Hindoli – Cargill	1.000		
Rea Kaltim	1.000		
PT. Tasik Raja	1.000		

Lyhian Agro Group	750
PT. Gema Reksa Mekarsari	500
Makin group	500
Sawindo Kencana group	500
Unggul Widya group	500
Asam Jawa group	300
Triputra Agro Persada group	300
PT. First Mujur Plantation	250
PT. Musirawas	200
PT. Majuma Agro	100
PT. Mopoli Raya	100
Korindo group	100
PT. Paya Pinang	75
PT. Fajar Bajuri	50
Incasi Raya group	1.200
PT. Kencana Sawit Indonesia	1.000
Sampoerna Agro group	800
PT. Agro Indomas	500
PT. Gunung Maras Lestari	450
PT. Gunungawit Binalestari	400
PT. Sime Indo Agro	350
Golden Hope group	350

Kuala Lumpur Kepong Berhad	160	
PT. Fetty Mina Jaya	50	

Mantan pejabat tinggi Cargill berargumen bahwa kebutuhan orang membeli minyak goreng itu sedikit sehingga Hindoli lebih banyak melakukan ekspor, pemerintah pun mendapat devisa dari pungutan pajak ekspor.¹²⁶

Selain itu Hindoli juga menyumbang pendapatan bagi pusat dan daerah dari pungutan-pungutan kehutanan, adapun jenis-jenis pungutan dalam sektor kehutanan sesuai dengan tabel di bawah ini;

TABEL 4.3. Jenis-jenis Pungutan di Sektor Kehutanan

No	Jenis Pungutan	Pusat	Daerah	Masyarakat
A	Pajak			
1	PBB	X	X	
2	PPN	X		
3	PPh	X		
4	PKB		X	
5	BBNKB		X	
6	Pajak pemanfaatan air permukaan		X	
7	Pajak reklame		X	
8	Pajak penerangan jalan		X	
B	PNPB			
1	IIUPHHK (Iuran Izin Usaha)	X		
2	PSDH	X		
3	DR	X		
4	Pengganti nilai tegakan	X		

¹²⁶ Wawancara dengan Mantan Pejabat Tinggi PT.Cargill Indonesia, bertempat di Plaza Senayan tanggal 16 Januari 2012 jam 15.00 (Lampiran 2)

C	RETRIBUSI			
1	Peredaran hasil hutan		X	
2	Pelayanan jasa Tata Usaha Kayu		X	
3	Tempat penimbunan kayu (TPK, TPN, <i>logpond</i>)		X	
4	Izin kepemilikan alat dan mesin kehutanan		X	
5	Izin kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai (<i>chainsaw</i>)		X	
D	Lain-lain			
1	Sumbangan wajib pembangunan daerah		X	
2	Sumbangan pihak ketiga		X	
3	Kompensasi masyarakat adat di dalam dan sekitar hutan			X
4	Buka portal, uang debu jalan, dsb.			X

Sumber: Fakultas Kehutanan IPB (2003)

Memang dalam segi pendapatan negara, Cargill turut menyumbang dari berbagai pungutan kehutanan, namun perlu dikritisi pula bahwa seperti perusahaan-perusahaan CPO lainnya, Cargill lebih banyak melakukan ekspor kelapa sawit ke luar, memang dari ekspor tersebut Cargill memberi sumbangan devisa yang cukup besar dari pungutan pajak ekspor pada setiap kali dilakukannya transaksi perdagangan, namun pendapatan Cargill yang di raup dari nilai ekspor tersebut adalah jumlah yang sangat besar. Dan pada akhirnya akan dikembalikan kepada MNC *home country*-nya di Amerika Serikat.

Hubungan aliansi tripel antara negara, borjuasi lokal dan pemodal asing dapat dianalisa bahwa Pemerintah melakukan pemberlakuan mekanisme denda yang dijatuhkan pada PT.Hindoli sebagai anak usaha MNC Cargill yang tidak mengurus perizinan lahan di luar area konsesinya adalah suatu tindakan pemerintah yang benar, namun dikeluhkan oleh MNC bahwa pemerintah kurang meninjau realitas di lapangan bahwa areal tersebut sudah bukan menjadi area hutan lagi, melainkan area para transmigran sehingga pelenyapan kayu-kayu alam sebagai salah satu bentuk denda terhadap Cargill itu dipertanyakan oleh pihak perusahaan asing tersebut, dari sudut pandang mereka, pemerintah seolah memeras lebih banyak keuntungan dari keberadaan perusahaan multinasional.

Sementara Cargill sebagai pemodal asing dan borjuasi lokal dalam hal ini PT.Hindoli memiliki hubungan yang saling mendukung, bahkan hal itu dipertegas dengan bantuan duta besar untuk melepaskan pejabatnya yang sempat di tahan oleh kepolisian akibat kasus ini.¹²⁷

Peningkatan dominasi dalam sektor perkebunan kelapa sawit oleh MNC dapat terus terjadi apabila pemerintah tidak segera membenahi sektor ini. Negara semestinya membuat perangkat aturan atau regulasi yang tegas serta menelisik realitas yang ada di lapangan.

¹²⁷ Wawancara dengan Kolega Bisnis PT.Cargill Indonesia, bertempat di Jakarta Pusat, 5 Desember 2011 jam 20.30 (Lampiran 1)

BAB 5

KESIMPULAN

Liberalisasi telah menggerakkan fenomena ekspor dan impor di Indonesia, perspektif yang digunakan pemerintah selaku *policy maker* terefleksi dalam dua komoditas yang diteliti, yakni; kedelai dan sawit, dari kedua studi kasus tersebut mencerminkan bahwa disayangkan pendekatan perspektif pemerintah yang sering dilakukan adalah pendekatan *budget* atau anggaran untuk serangkaian pemecahan masalah.

Pendekatan anggaran ini memang begitu penting untuk pembiayaan pembangunan, namun pemerintah masih kurang menelaah berbagai dampak yang ditimbulkan dari serangkaian kebijakan yang dibuatnya akibat pelaksanaan pendekatan tersebut.

Dalam kasus impor kedelai misalnya, kebijakan pemerintah hanya bersandar pada kemudahan mendapatkan pasokan kedelai dengan harga yang murah, tanpa membenahi secara signifikan autarki pasokan kedelai lokal yang saat ini kalah bersaing dengan keberadaan kedelai impor tersebut.

Serangkaian kebijakan yang digunakan Negara untuk menyelesaikan krisis kedelai di tahun 2008 hanya meredam permasalahan itu sendiri, sementara sifat resiprokal sebuah krisis itu bisa menciptakan kemunculan krisis yang baru di masa yang akan datang meskipun dengan sebab dan akibat yang berbeda, namun bermuara pada sumber yang sama, yakni; *beleid* dari pemerintah dalam menata sektor pertanian.

Kemunculan aktor-aktor non negara dalam sektor pertanian Indonesia, seperti; MNC Agribisnis telah menghantarkan apa yang di sebut Barnett dan Muller sebagai sifat-sifat dasar MNC, yakni; mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari negara tempat ia menjejakan dirinya. Dari kasus kedelai yang diuraikan dimana Cargill Indonesia menjadi salah satu pemain besar dalam bisnis kedelai, meskipun bukan yang menjadi pemain pertamanya (Teluk Intan), namun *market power* CI sangatlah besar, dan kekuatan Cargill Inc. sebagai perusahaan induknya tentu berpengaruh

sangat kuat terhadap bisnis kedelai CI bahkan di dunia, sehingga penulis menduga bahwa kedelai yang dibeli Teluk Intan selaku pemain utama kedelai impor bisa saja berasal dari Cargill Inc, karena memang para importir kedelai di Indonesia mendapatkan bantuan kredit dari Amerika Serikat (GSM 102, GSM 103, PL 480) sehingga banyak importir kedelai memburu kedelai asal Amerika itu, sementara di dunia bisnis kedelai dan sereal dikuasai oleh 2 MNC, yakni; ADM dan Cargill Inc.

Lagi-lagi pemerintah mengutamakan pendekatan anggaran dengan tawaran harga yang murah tersebut menjadi solusi atas pasokan kedelai dalam negeri yang masih sangat kurang itu, pemerintah membuat kebijakan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 141/MPP/Kep/3/2002 untuk dibukanya importir tanpa izin khusus, importir hanya memerlukan Nomer Pengenal Importir Khusus saja dalam melakukan transaksinya, namun pada perkembangannya importir kedelai hanya terkonsentrasi pada 4 importir besar, salah satunya adalah PT.Cargill Indonesia.

Indikasi kartel dan kesepakatan menimbun berton-ton kedelai yang dilakukan oleh CI dan GCU disaat terjadi kenaikan harga dan kelangkaan kedelai disikapi pemerintah dengan menghilangkan hambatan tarif dari 10% menjadi 0% dalam keputusan Kementerian Keuangan tanggal 21 Januari 2008 agar jumlah para importir kedelai bertambah dan harga kedelai impor di patok berkisar 6000-an, namun hal itu tidak menjawab akar permasalahannya.

Kendala lainnya berasal dari kebijakan pemerintah yang gencar menggalakan komoditas sawit dan menggenjot produksi kelapa sawit untuk di ekspor sehingga membuat kebijakan ekspansi lahan sawit untuk meningkatkan produksinya demi pemasukan devisa negara yang sangat besar.

Indonesia dan Malaysia memang pemasok sawit terbesar di dunia, namun semestinya hasil yang di dapatkan pemerintah bisa secara langsung dirasakan oleh masyarakat, hal ini berbeda dengan komoditas pangan yang dampaknya langsung terasa oleh masyarakat. Jadi hendaknya pemerintah mengkaji ulang kebijakan-kebijakannya dalam pengaturan komoditas kelapa sawit.

Sementara, pihak yang paling dirugikan posisinya adalah petani-petani kecil tanaman pangan. Menurut Pandangan SPI, Hendri Saragih selaku ketua umumnya memberi masukan dari petani dengan menuntut solusi jangka pendek kepada pemerintah, yakni;¹²⁸

1. Mematok harga dasar pangan yang menguntungkan petani dan konsumen. Harga tidak boleh tergantung kepada harga internasional karena tidak berkorelasi langsung dengan ongkos produksi dan keuntungan. Harga khusus harus sesuai dengan ongkos produksi dan keuntungan petani dan kemampuan konsumen.
2. Memberikan insentif harga kepada petani komoditas pangan (terutama beras, kedelai, jagung, singkong, gula dan minyak goreng) jika terjadi fluktuasi harga. Hal ini sebagai jaminan untuk tetap menggairahkan produksi pangan dalam negeri.
3. Mengatur kembali tata niaga pangan. Pangan harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bulog bisa diberikan peran ini, tapi harus dengan intervensi yang kuat dari Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan dan Departemen Keuangan.
4. Menambah produksi pangan secara terproyeksi dan berkesinambungan, dengan segera meredistribusikan tanah objek *landreform* yang bisa segera dipakai untuk pertanian pangan.
5. Menyediakan insentif bagi petani komoditas pangan, berupa bibit, pupuk, teknologi dan kepastian beli.
6. Memberikan dukungan pelebagaan organisasi petani komoditas pangan, yakni kelompok tani, koperasi dan ormas tani.

Dengan kata lain bahwa sebaiknya harga pangan tidak dikendalikan oleh mekanisme pasar yang menyebabkan kerugian bagi petani lokal dengan modal yang kecil, dan menguntungkan MNC di kala terjadinya krisis kedelai di tahun 2008

¹²⁸ Hendri Saragih, *Kedaulatan Pangan, Jalan Keluar Krisis Pangan Indonesia*, Serikat Petani Indonesia, 2008.

tersebut. Bulog dikembalikan fungsinya sebagai stabilisator harga karena pangan adalah kebutuhan masyarakat yang sangat penting, pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan pangan yang cukup, kemudahan akses dan harga yang terjangkau dengan daya beli yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah hendaknya memperhatikan tidak hanya komoditas primer seperti beras saja, melainkan komoditas sekunder, seperti; kedelai.

Peningkatan dominasi MNC dalam hal ini Cargill sedikit banyak mewarnai sektor pertanian, serangkaian kebijakan pemerintah seolah menyandarkan diri pada berbagai kebijakan yang berpihak pada MNC, misalnya; terikat konsesi dalam WTO, perjanjian LoI IMF, serta liberalisasi perdagangan yang menggiring sektor pertanian dalam bingkai pembangunan dalam ketergantungan, yakni; ketergantungan dalam impor pangan.

MNC menciptakan desain global dimana akan selalu ada ketergantungan terhadap produk-produknya yang di jual ke seluruh negeri dengan lembaga-lembaga internasional tersebut, bahkan pemerintah asal MNC itu berada ikut mendorong kelancaran distribusi produk yang dijualnya dengan membuat fasilitas kredit bagi para importir Indonesia misalnya.

Hipotesa pertama mengenai adanya peningkatan dominasi MNC di sektor pertanian dalam komoditas kedelai tercermin dari indikasi kartel dan spekulasi 4 importir besar kedelai di saat krisis kedelai 2008 sehingga menyebabkan kenaikan harga yang sangat drastis serta kelangkaan kedelai di pasaran dan importir besar seperti PT.Cargill Indonesia diuntungkan dalam keadaan tersebut. Konsesi kartel, meskipun tidak dapat dibuktikan secara nyata, namun indikasinya begitu jelas, memang diakui oleh Pejabat KPPU sendiri bahwa membuktikan adanya konsesi itu tidak mudah.

Sementara dari pola aliansi tripel yang terbentuk, Pemerintah selaku Negara tuan rumah menerapkan beleid yang mempermudah bisnis MNC beroperasi, misalnya; berupa kemudahan importir tanpa ijin khusus sehingga memudahkan PT.Cargill Indonesia untuk mengoperasikan bisnis kedelainya di Indonesia, sementara negara

tuan rumah tempat MNC itu berada, yakni; Amerika Serikat juga turut membantu MNC dengan penerapan kredit ekspor sehingga menarik negara-negara lain untuk membeli kedelai impor asal Amerika yang di dunia ini di kuasai oleh ADM dan Cargill. Di sini Cargill selaku *home country* menyokong supply kedelai bagi *host country*-nya di Indonesia.

Dan hipotesa kedua dengan adanya peningkatan dominasi MNC di sektor pertanian dalam komoditas sawit, setengah lahan sawit dikuasai oleh asing termasuk Cargill akibat kurangnya peranan pemerintah menata sektor perkebunan Indonesia tersebut dapat dibuktikan, memang kehadiran MNC kerap kali sangat merugikan, namun di satu sisi, penulis melihat bahwa Cargill memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam menaati aturan dan apabila melanggar ketentuan hukum di suatu negara, Cargill bersedia membayar semua denda sebagai salah satu bentuk kepatuhannya (misalnya; tercermin dalam kasus Hindoli-Cargill). Hal ini semestinya menjadi poin penting bagi pemerintah, dimana kedepannya pemerintah dapat membuat aturan-aturan yang lebih jelas dan tegas guna meningkatkan pembangunan di sektor pertanian. Kehadiran MNC sebagai imbas dari globalisasi memang tidak bisa dihindari. Jangan sampai kepatuhan tersebut menjadi *kamuflase* untuk melakukan ekspansi lahan perkebunan di Indonesia sehingga diperlukan aturan yang jelas dan adil bagi semua pihak.

Hipotesa akhir ini adalah adanya 'Pembangunan dalam ketergantungan' yang terjadi pada kasus kedelai dalam hubungan MNC sebagai *host country* (PT.Cargill Indonesia) dan *home country* (Cargill Inc.) Pembangunan dalam ketergantungan memang terjadi manakala sampai saat ini Indonesia belum bisa melepaskan dirinya dari ketergantungan impor kedelai yang tinggi dan para importir masih melakukan impor kedelainya yang berasal dari Amerika Serikat dimana MNC ternama bernama Cargill dan ADM menjadi pemain besar dunia dalam pendistribusian kedelainya itu ke seluruh dunia.

Nampaknya kondisi ini akan bertahan dalam beberapa tahun mengingat angka defisit kedelai dalam beberapa tahun kedepan masih tinggi, seperti tercermin data Pusdatin Kementerian Pertanian berikut ini;

TABEL 5.1. Proyeksi Kebutuhan Kedelai

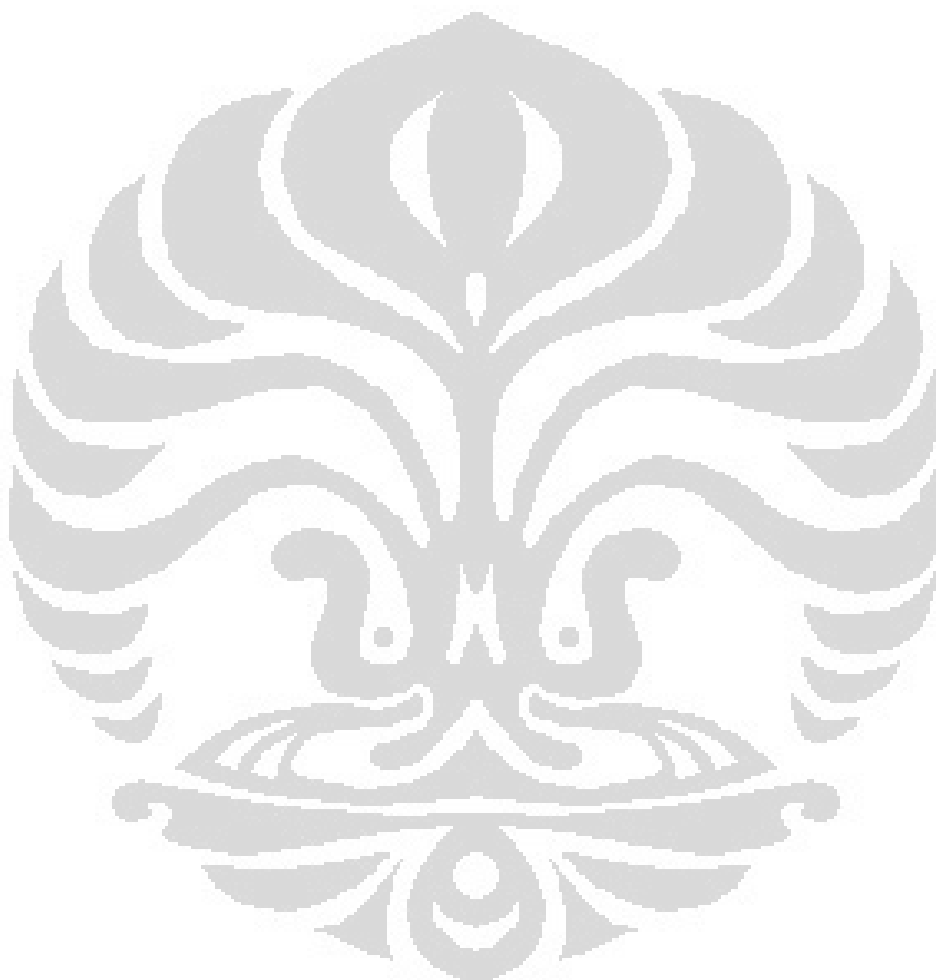
Tahun	Produksi (Ton)	Konsumsi Nasional (Ton)	Surplus/Defisit (Ton)
2009	974 512	1 689 001	-714.489
2010	907 031	1 718 260	-811.229
2011	870 068	1 847 105	-977.037
2012	874 266	1 875 259	-1.000.993
2013	858 665	1 903 651	-1.044.986
Laju pertumb.(%)	-3,08	3,07	10,21

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, 2011

Apabila Indonesia ingin melepaskan diri dari ketergantungan impor khususnya kedelai, semestinya negara tidak membebaskan harga komoditas pada pasar dan kembali mengembalikan fungsi Bulog sebagai *Public Service Obligation*. Saat ini fungsi Bulog telah bergeser untuk mencari profit sehingga banyak pilihan yang di ambil oleh Bulog itu lebih berorientasi pada impor dalam menghadapi keadaan kekurangan stok dan kenaikan harga sehingga daya saing produk lokal khususnya pangan menjadi jauh tertinggal dengan impor sehingga hal ini harus mampu ditingkatkan pemerintah dengan mendukung penuh perkembangan budidaya komoditas pangan baik itu primer maupun sekunder seperti tanaman kedelai ini. Sebenarnya dari sisi mutu, kualitas kedelai lokal berada di atas kedelai impor, namun karena disparitas harga yang tinggi dan keterbatasan produksi dan lahan, maka kedelai lokal akhirnya makin ditinggalkan dan diganti oleh keberadaan kedelai impor yang berharga murah dan berukuran lebih besar, kendati kondisinya kurang baik apabila dikomparasikan dengan kedelai lokal.

Peranan Negara semakin berkurang dengan kehadiran MNC yang dominasinya kian menggurita. Negara semestinya dapat menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat sehingga Negara harus mampu meningkatkan produktivitas komoditas pangan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat luas serta meningkatkan produktivitas kelapa sawit dengan meminimalisir atau tanpa adanya ekspansi lahan.

Sementara itu, MNC dan borjuasi lokal selaku pemodal asing dan anak usahanya dalam mengoperasikan bisnisnya di negara tempat ia berada, hendaknya memperhatikan nasib dari pelaku sektor pertanian lainnya, yakni; para petani lokal yang dirugikan dari berbagai perilaku-perilaku bisnisnya dan kian tersingkirkan karena kurang *concern*-nya pemerintah mengelola simpul-simpul strategis di sektor pertanian ini.



DAFTAR REFERENSI

- Budiman, Arief, (1996). *Teori dan Pembangunan Dunia Ketiga*. PT.Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. PT.Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Ikbar, Yanuar, (2007). *Ekonomi Politik Internasional 2; Implementasi Konsep dan Teori*. Reflika Aditama. Bandung.
- Indef. (2012). *Ekonomi Politik Kehutanan; Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*; INDEF, Jakarta.
- Mas'oed, Mohtar. (1997). *Bahan Kuliah Perusahaan Multinasional Dalam Ekonomi Politik Internasional*. Ilmu hubungan Internasional FISIPOL UGM. Jogjakarta.
- Sawit, M.Husein. (2007). *Liberalisasi Pangan; Ambisi dan Reaksi dalam Putaran Doha WTP*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Steiner, George A. *Business, Government, and Society a Managerial Perspective. Text and Cases*. Mc.Graw-Hill.
- Strauss, Anslem & Corbin, Juliet. *Dasar-dasar penelitian kualitatif; tata langkah dan teknik-teknik teoritisasi data*. Pustaka Peladjar. 2003.
- Tambunan, Tulus. (2010). *Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan*. Penerbit Universitas Indonesia. .
- Tim Penulis IPB. (2010). *Refleksi Agribisnis, 65 tahun Profesor Bungaran Saragih*. IPB Press. Bogor.
- Tim KPPU. *Hukum Persaingan Usaha; Antar Teks & Konteks*.(2009).KPPU. Jakarta.
- www.cargill.com, di akses 2 November 2011 jam 21.00.
- www.cargill.co.id , di akses 2 November 2011 jam 11.20.
- Cargill akan bangun pabrik kakao, <http://bataviase.co.id/node/803398>, 17 September 2011. Di akses 2 November jam 12.00.

Dua bulan ke depan, gula diperkirakan masih langka, pemerintah dinilai tak berbuat, <http://www.bumn.go.id/21857/publikasi/berita/bulog-kembali-menunjuk-cargill-memasok-gula-impor/>, 23 April 2003. Di akses 30 November 2011 jam 13.00.

Market Frash eTrading, <http://mdev.detik.com/read/2009/14/09022855/6/market-flash-etrading>. Senin, 14 September 2009 09:02 WIB. Di akses 29 Desember 2011 jam 19.30.

<http://www.cargill.com/news/releases/2011/NA3052248.jsp>, di akses 14 Desember 2011 jam 15.43.

Cargil Mengakuisi pabrik Pakan ternak di Medan, Sumatera, Indonesia. www.cargill.co.id/.../NA3037021.jsp, di akses 7 Desember 2011 jam 13.21.

Koran Tempo, “Ada ‘Gunung Kedelai’ di Surabaya,” <http://www.wikimu.com/News.aspx?id=6128>, 26 Januari 2008. Di akses 5 Desember 2011 jam 12.00.

Kenyang adalah masalah politik, <http://www.pergerakankebangsaan.org/?p=42>, di akses 14 November 2011 jam 14.00.

Bangsa ini Jika Terus Putar-putar Makin Celaka, http://www.selamatkan-indonesia.net/index.php?option=com_content&task=view&id=226&Itemid=55, di akses 7 November 2011 jam 13.23.

Cendana Pos, “Ada Kartel di Kedelai,” <http://www.cendanapos.com/2008/05/ada-kartel-di-kedelai.html>, 14 Mei 2008, di akses 13 Desember 2011 jam 19.01.

Policy Paper Serikat Petani Indonesia (SPI). “Pandangan Petani Atas Kebijakan Pertanian Pemerintah Tahun 2008.”

Detik Finance. Indro Bagus SU, “PMK Pembebasan BM Kedelai Di tekan 21 Januari,” <http://finance.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2008/bulan/01/tgl/time/182952/idnews/878921/idkanal/4>, senin 14 Januari 2008 18:39. Di akses 11 Januari 2012 jam 17.45.

Bisnis Indonesia. Hendri T.Asworo, “Mungkinkah harga kedelai di turunkan,” www.bisnisindonesia.com, jumat, 18 Januari 2008. Di akses 17 Desember 2011 jam 16.05.

Trie, Ada 'Gunung' Kedelai di Surabaya,

<http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?id=6128>, 28 Januari 2008 10:09,
di akses 11 November 2011 jam 13.51.

Tempo interaktif, Surabaya. "Polisi Temukan Gudang Penimbunan 13 ribu Ton Kedelai," <http://infoanda.com/id/link.php?Ih=BVBdVgcCDIQc>, 25 Januari 2008 20:06 WIB. Di akses 6 Desember 2011 jam 12.45.

Detik Finance. Imam Wahyudinata,

<http://finance.detik.com/read/2008/01/25/175759/884271/4/polisi-temukan-timbunan-kedelai-milik-cargill-di-surabaya>, 25 Januari 2008. Di akses 6 Desember 2011 jam 12.45.

Tempo Interaktif, "Kedelai setelah Satu Dekade,"

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/03/29/EB/mbm.20100329.EB133122.id.29.Maret.2010>. Di akses 16 November 2011 jam 13.42.

Jawa Pos. Fidyaa, "Lagi ditemukan 50ribu ton kedelai," www.jawapos.com, selasa 29 Januari 2008. Di akses 16 November 2011 jam 13.42.

Revitalisasi Pertanian,

<http://autos.okezone.com/read/2008/02/04/212/80638/revitalisasi-pertanian>, senin 4 Februari 2008 07:50 WIB, di akses 17 November 2011 jam 12.13.

Trisetyarso, Kartel Di Bisnis Tempe,

<http://trisetyarso.wordpress.com/page/38/archives-list=1>, 21 Januari 2008. Di akses 12 November 2011 jam 13.42.

Tempo Interaktif, "Presiden Minta Pengusaha Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok,"

<http://www.infoanda.com/id/link.php?ih=UASLAQQGAQpu>, Kamis, 31 Januari 2008 05:10 WIB. Di akses 13 Januari 2012 jam 14.15.

Resume Evaluasi dan Kajian Dampak Kebijakan Persaingan Usaha Pada Laporan KPPU tahun 2008.

Asep Toha, Sembako Naik; Depperdag Nyatakan Kedelai di Gudang Berizin, Legal, <http://polarisminor.blogspot.com/2008/02/sembako-naik.html>, 11 November 2011 jam 21.30.

Policy Paper Serikat Petani Indonesia (SPI), 100 tahun Industri dan Perkebunan Sawit di Indonesia, “Saatnya Memajukan Kepentingan Nasional dan Kemakuran Rakyat Tani, Maret 2011.

Neraca, “Separuh Lebih Lahan Sawit Di kuasai Perusahaan Asing,” www.neraca.co.id/.../separuh-lahan-sawit-dikuasai-perusahaan-asing/, 15 Mei 2011. Di akses tanggal 17 November 2011 jam 13.32.

Antara, Hindoli Targetkan Perluas Kebun Plasma Sawit, id.berita.yahoo.com/hindoli-targetkan-perluas-kebun-plasma-sawit, 21 November 2010. Di akses tanggal 17 November 2011 jam 13.32.

Yang berkelanjutan yang dicari, www.agrina-online.com/show-article.php?rid=10&nid=1778, 16 Maret 2009, di akses 11 Oktober 2011 jam 13.43.

Bisnis Indonesia. Rustam Agus, “Cargill bantah buka hutan secara illegal,” <http://bataviase.co.id/node/357946>, 26 agustus 2010. Di akses 4 November 2011 jam 12.34.

Bisnis Indonesia. Edwin Tambunan, “Kemenhut Terbitkan Denda PT.Hindoli,” www.bataviase.co.id/node/363086, 30 Agustus 2010. Di akses 7 November 2011 jam 21.00.

Bisnis Indonesia. Erwin Tambunan, “Greenomics Minta Nestle Unilever boikot CPO Cargill,” <http://bataviase.co.id/node/398278>, 29 September 2010, di akses 7 November 2011 jam 21.00.

Bisnis Indonesia, kolom opini 05 juli 2011, diakses 6 Desember tahun 2011 jam 21.00.

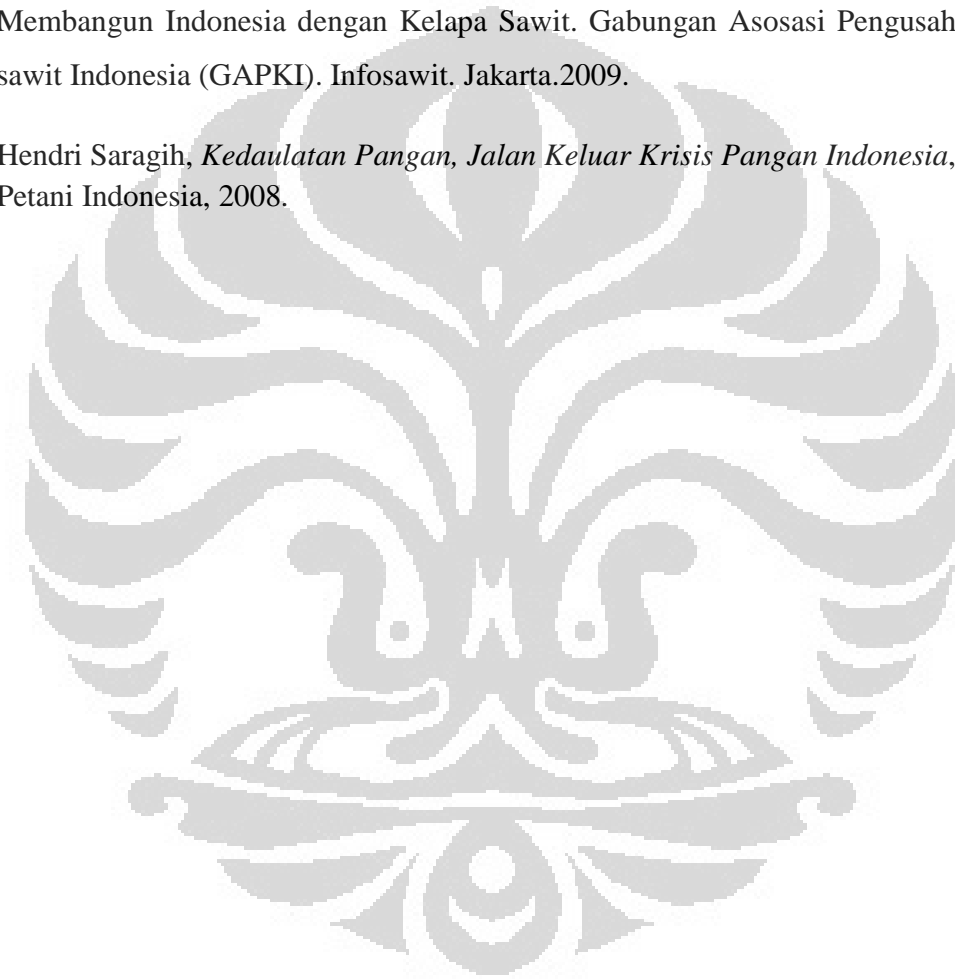
Bisnis Indonesia. Erwin Tambunan, “Greenomics Grup Cargill buka hutan secara illegal,” <http://bataviase.co.id/node/352815>, 23 Agustus 2010, di akses 7 November 2011 jam 14.54.

Bisnis Indonesia, Erwin Tambunan, “Greenomics minta Nestle Unilever boikot CPO Cargill,” www.bisnisindonesia.com, di akses 12 Desember 2011 jam 15.00.

Antara, “Hindoli Targetkan Perluas Kebun Plasma Sawit,” id.berita.yahoo.com/hindoli-targetkan-perluas-kebun-plasma-sawit, 21 November 2010, di akses 12 November 2011 jam 21.22.

Membangun Indonesia dengan Kelapa Sawit. Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (GAPKI). Infosawit. Jakarta.2009.

Hendri Saragih, *Kedaulatan Pangan, Jalan Keluar Krisis Pangan Indonesia*, Serikat Petani Indonesia, 2008.



Lampiran 1: Wawancara dengan kolega bisnis PT.Cargill Indonesia



Narasumber : kolega bisnis PT.Cargill Indonesia

Tanggal wawancara: 5 Desember 2011 jam 20.30.

Tempat : Jakarta Pusat.

B: Bagaimana tentang kasus PT.Hindoli yang sampai dilaporkan dalam audit BPK tanggal 15 Januari 2010?

S: Hindoli-Cargill itu ibaratnya mempunyai 10 prinsipal yang benar-benar dipatuhi, yang dia tulis di atas batu bahwa kami tidak boleh ini dan itu, untuk pengadaan mesin tik saja itu 2 juta dan biayanya 300.000US\$ mesti konsultasi dulu ke kantor pusatnya di Minnesota. Jadi yang terjadi pada Hindoli adalah dia *men-take over* perusahaan sawit yang sudah ada sejak tahun 80-an. Hindoli ini miliknya orang Belanda-Indonesia. Sinyo lah. Namanya Hindoli adalah singkatan Holand Indonesia, di tahun 1998 di *take over*, semua orang sudah tahu ada lahan areanya Hindoli dan ada lahan plasma warga. Peraturan pemerintah mensyaratkan petani plasma sebesar 20% lahan, maunya pemerintah 2 Ha diserahkan ke masyarakat, dengan berbagai ribu orang, karena plasmanya tidak punya tanah yang cukup, maka areanya masuk ke Hindoli sehingga Hindoli mengambil areal kawasan hutan supaya jumlahnya satu-satu, Nah, di ambil dan jadi pohon, ketika Cargill masuk ke manajemen Hindoli, ibaratnya dia tidak tahu kalau di Indonesia ke kamar kecil saja harus bayar, dia lirak-lirik untuk

Universitas Indonesia

mengurus sertifikat, jadi di tahun 2000 sampai sekarang tidak di urus pelepasan areal hutannya, waktu kemudian komandan polisi yang baru datang diberikan tugas, ibaratnya berburu binatang di kebun binatang, jadi sangat mudah, ini di bilang merambah kawasan hutan, kawan saya di tahun 80-an masih pakai celana pendek baru lulus SMP, di bilang tidak mengurus ini, ya dia mana tahu karena pada saat konversi dia masih SD kok, kenapa harus dipermasalahkan? Akhirnya PT.Hindoli harus bayar denda akibat perijinan penggunaan areal hutan yang tidak diurus sebelumnya, Cargill dituduh merambah hutan yang sebenarnya sudah dilakukan Hindoli sebelum Cargill masuk, Cargill sampai memakai kekuatan kedutaan besar Amerika Serikat untuk mengeluarkan pegawainya dari jeratan tahanan polisi, dan kemudian kasusnya *happy ending* bagi Cargill, diputihkan. Sejak tahun 1990-an tidak ada hutan disitu, kayu-kayunya tidak ada, walaupun ada sudah di ambil masyarakat. Itu kasus Hindoli.

B : Apakah Cargill salah karena tidak mengurus perizinan?

S : Ini ada dua hal, saya tidak mau mengurus ijin karena saya tidak mau menyuap, menyogok, *take money*, tetapi karena ijin tidak di urus maka ijinnya tidak keluar, saya sudah melanggar ijin itu sendiri, saya tidak mau urus KTP karena harus pakai duit, saya tidak mau bikin SIM karena harus menyogok, karena itu saya bertahan dengan integritas, tapi saya tetap menyetir sepeda motor di jalan, ya itu tetap merupakan pelanggaran.

B : Terimakasih, Pak!

Keterangan:

A: Narasumber, B: Bilqis Fitria Salsabiela

Daftar Pertanyaan Pokok:

1. Bagaimana tentang kasus PT.Hindoli yang sampai dilaporkan dalam audit BPK tanggal 15 Januari 2010?
2. Apakah Cargill dalam posisi yang salah karena tidak mengurus perizinan?



Universitas Indonesia

LAMPIRAN 2: Wawancara dengan Mantan Pejabat Tinggi PT.Cargill Indonesia

Narasumber : Mantan Pejabat Tinggi PT.Cargill Indonesia

Tanggal wawancara: 16 Januari 2012 Jam 15.00.

Tempat : Plaza Senayan

A : Ini saya lupa tahun berapa, tapi ada pelepasan hutan dengan program Perkebunan Trans Rakyat (PTR). Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi, jadi jauh sebelum Cargill masuk sudah ada kawasan transmigrasi SP1, SP2, SP berapa lah, kemudian diberikan namanya pelepasan hutan untuk HPK, Hutan Produksi Konversi. Yang terjadi yang diceritakan itu adalah Cargill ini melebihi kawasan ini, tapi dia tidak pernah lompat, karena ekses di lapangan dia lewat-lewat, kalau diperbesar ini kira-kira begini batasnya, kan ada pelepasan hutan, itu artinya Cargill hanya boleh mengelola di dalam sini. Nah, tapi sekarang coba kamu bayangkan ini kondisi di lapangan tidak bisa membayangkan ini kan hutan mereka bilang mereka ada pasang patok, pada prakteknya batas patoknya ada atau tidak tidak tahu...mereka akan *men-chase* Hindoli atas patok yang ada yang kita tidak tahu itu ada atau tidak, ini di lapangan tadinya kawasan transmigrasi yang seperti saya gambarkan tadi, sekarang misalnya, sebelum Cargill masuk kan sudah menjadi kawasan transmigrasi dan kamu misalnya punya tanah disini dan ini tidak ada di lapangan kan? Ada tidak garis ini dilapangan? Tidak ada, kemudian orang datang, kamu belilah lahanku ini kita waktu membeli tidak tahu apakah ini ada di dalam atau di luar karena garisnya adalah garis maya, patok-patok itu ada atau tidak kan tidak tahu, mungkin hal yang sama juga terjadi di sini, inilah yang menyebabkan akhirnya Cargill membeli tanah yang melebihi ini. Tanah-tanah ini semua, yang namanya kepala desa itu mengeluarkan surat-surat tanah, ada surat tanahnya segala macam, suatu saat kemudian timbul persoalan, saya selaku penanggungjawab melihat ada persoalan yang tidak benar, tanah yang di beli dari masyarakat, jangan di bilang tidak dibeli, ini dibeli loh dengan dokumen jual

Universitas Indonesia

belinya ada juga rapih, ini ada ekses ada yang pemilik tanah yang bentuknya begini, begini, bentuknya bermacam-macam karena dilapangan garisnya maya, jadi yang ada hanya yang di atas kertas, tapi tidak pernah ada yang melompat, selalu ada yang menempel dengan garis batasannya. Kita mengatakan ini salah dan ingin memperbaiki, dan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah datang ke departemen kehutanan, ini terjadi yang begini loh, kita bertanya bagaimana ini? tapi tidak dilakukan perbaikan karena sebenarnya ini semua termasuk HPK, Hutan Produksi Konversi. HPK adalah kawasan hutan yang memang disiapkan untuk dikonversi menjadi non hutan, tapi dengan melakukan pembayaran-pembayaran kepada negara, ada syarat-syaratnya.

B : Jadi mengenai berita audit BPK yang menyebutkan Hindoli diharuskan membayar denda itu bagaimana?

A : Jadi ini bukan berdasarkan kebenaran penuh, saya ingin jelaskan. Dihitung-hitung total semuanya di empat wilayah ini adalah angka 1,976 Ha, kita pergi ke departemen kehutanan, Pak ini sudah salah, kami ingin perbaiki, perusahaan pertama kali dengan niat baik untuk menyelesaikan, kalau kami harus di denda kami siap membayar dendanya, itu kejadian yang sebenarnya dan saya orang yang di belakang itu. Karena seperti itu, akhirnya mereka datang ke kita, kita presentasikan semuanya karena ini kawasan hutan khusus konversi ini artinya apa, ini hutan yang memang sudah disiapkan untuk non kehutanan untuk jadi perkebunan atau usaha-usaha yang lain, ok lah kami akan datang, sampai level direktur kementerian kehutanan datang ke lapangan, mereka membentuk tim untuk melakukan penelitian lapangan, mereka sajikan oh ya betul angkanya 1,976 Ha, tidak ada masalah lagi, hanya perlu rekomendasi dari gubernur untuk melepaskan, angka 1,976 ini mau dilepas untuk perusahaan, itu sudah disepakati. Nah...disitulah tiba-tiba ada laporan dari kepolisian. Padahal sebenarnya kita sedang melakukan dalam proses penyelesaian pemutihan, dan kami sudah katakan kami siap untuk membayar. Berapapun kita akan bayar.... Apapun denda kita akan bayar.

Universitas Indonesia

B : Sebenarnya Audit BPK dulu atau laporan polisi dulu?

A : Belum ada audit BPK atau polisi, kita ini adalah perusahaan pertama yang menyadari ada kesalahan ini, kita mau memperbaiki, kita siap membayar dan mereka sudah tentukan dan identifikasi timnya itu, ditandatangani oleh direktur, tinggal minta rekomendasi dari gubernur supaya kami melepaskan kawasan ini dari hutan, dan ingat kita mau membayar berapapun biayanya, tapi tiba-tiba muncul ada laporan polisi, padahal sedang tahap penyelesaian pemutihan, sudah disajikan dalam bentuk laporan, barulah yang lain semuanya masuk ke dalam ininya, sebenarnya yang sedang terjadi ini tidak ada Cargill mengambil kayu, yang ada hitung-hitungan belaka, hitungannya kira-kira begini untuk membayar ini, karena ini sudah di buka dahulu, ada mekanismenya dendanya, itulah yang dinamakan bayar DRnya (dana reboisasi), bayar Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH)nya terhadap potensi kayu, potensi kayu ini berapa, potensi kayu adalah sebelumnya pada waktu kita ini kan hutan.

B : kalau berita di sini dia melenyapkan kayu alam sebanyak 23.265,13 m³.....

A : Bisa jadi jumlah itu, tapi apa logikanya, perlu di ingat ketika dahulu waktu ini mau dilepaskan ada studi dari departemen kehutanan, studinya ini menghitung berapa potensi kayunya misalnya 2 juta m³ X 1,976, tapi sekarang pertanyaan saya, tanah-tanah ini semua dibeli dari masyarakat, sudah sedikit kayunya walaupun ada sudah mereka ambil, makanya itulah yang terjadi, kalau kita baca berita begini-begini bisa saja tidak menggambarkan kebenaran, semua seolah-olah kembali ke Cargill dan apakah orang kehutanan mengetahui hal ini? sebenarnya mereka tahu, tapi karena mekanisme denda itu adalah seperti itu maka terjadilah, lalu apakah Cargill mengambil kayunya? Tidak.....

C: I tell you.....Perusahaan yang melaporkan adanya penyimpangan praktek masa lalu adalah Cargill waktu kita pakai celana pendek itu Cargill dan Bapak inilah yang membereskan apa yang dijalankan Cargill, hal yang belum atau tidak dijalankan oleh perusahaan-perusahaan lainnya.

Universitas Indonesia

A : Intinya sebenarnya begini pemerintah berbicara tentang sumber daya alam Indonesia, pemerintah belum melakukan pengawasan yang benar, ketika pemerintah melihat kasus, lebih banyak pemerintah hanya menyalahkan saja kepada sektor swasta.

B : Akhirnya denda ini di bayar atau bagaimana?

A : Ya di bayar, kalau tidak di bayar, saya marah karena Cargill terkenal menjaga reputasinya. Ini seperti diputar balik semua seolah-olah perusahaan multinational itu salah, Cargill salah, saya mengatakan ini bukan karena saya dari Cargill. Tapi begitulah yang terjadi.

B : Setelah itu upaya selanjutnya bagaimana, pak?

A : Kalau sudah di bayar berarti ya pelepasan dan selesai, pelepasan terhadap kawasan hutan itu. Karena 1,976 ini statusnya Hutan Produksi Konversi (HPK) tadi, pengertian dilepaskan itu adalah berarti dikonversi dari hutan menjadi non hutan, begitu menjadi non hutan tidak ada masalah, tapi salah satu syarat menjadi non hutan adalah bayar dulu *penalty* ini. Bayangin saya mau memperbaiki dan kejadian ini sudah ada sebelum saya masuk ke perusahaan, apa yang terjadi, saya yang mau dikerjakan, mau di peras, dimintain uang oleh polisi. Makanya jangan percaya dengan semua ini. Itu semua bohong. Makanya berita-berita itu tidak penuh kebenarannya. Saya mau memperbaiki hal ini, waktu kejadian saya belum masuk, saya masuk tahun 2003 dan dia sudah mulai 1998-1999, saya yang mau di tahan, dimintain duit, tapi tolong ini hanya untuk keperluan akademis dan teman saya yang minta bantu kamu, saya mau cerita karena saya sebenarnya tidak boleh cerita. Karena Ini soal akademis, kamu yang harus memilah mana yang perlu di ambil mana yang tidak.

B : Oh...berarti Cargill sebagai korban, harus membayar ganti rugi tegakan dan DR serta PSDH, tetapi saya masih tidak mengerti PSDH itu?

Universitas Indonesia

A : Provisi itu cuma mekanisme, kamu biar tahu ya...ini kan undang-undang kehutanan katakanlah ini kawasan hutan, misalnya kamu tebang, kayu-kayunya kamu tebang, lognya, misalnya kayunya ini yang bernilai diameter lebih besar dari 40 meter inilah yang diambil oleh perusahaan kayu, ada perusahaan-perusahaan yang pakai cara *illegal logging* juga. Karena kita mengambil hasil hutan ada dua yang harus di bayar; dana reboisasi dan PSDH. Dana reboisasi ini apa? Kalau kita nebang hingga kayu ini tidak ada disini, perlu direboisasi dan di tanam kembali, dan ditarik DR. Selain itu, ada PSDH karena kita mengambil sumber daya hutan kita perlu membayar sumber daya hutan, itu hanya mekanisme pembayaran, bayarlah itu dengan asumsi kita mengambil kayu atau loging dikawasan hutan, tetapi kalau ini sudah melakukan pelanggaran dimana tadi sudah keluar disengaja ataupun tidak disengaja seolah-olah kita mengambil kayu padahal ini hanya mekanisme penaltinya, kalau kita baca di koran seolah-olah Cargill mengambil kayu padahal tidak, kalau kita baca sepintas saja, orang banyak yang asal ngomong...

B : Masalah pemberitaan mengenai perampasan lahan warga Sukadamai, Sungai Lilin daerah Palembang secara sepihak oleh perkebunan sawit Hindoli bagaimana, Pak?

A : Hindoli sudah bayar itu semua, ada tanda buktinya. Begini...Katakanlah dulu ini namanya kawasan. Nah, ini kemudian masyarakat yang dulunya nomaden, kejadian ini yang sebenarnya terjadi, ada yang mengaku tanahnya ini, kemudian ada yang mengaku tanahnya ini, dia ada irisan, jadi ada bagian ini yang sudah di klaim oleh 2 orang, ada lagi juga yang ngakunya begini....saya hitung 1 irisan sekecil ini ada 7 orang yang mengklaimnya, mereka bilang ini tanah nenek moyangku, sekarang saya tanya sama kamu dia kan nomadik, mungkin tidak kalau ini terjadi? mungkin saja mungkin tahun 20 dia disini, tahun berikutnya dia pindah-pindah nomaden, dia tahun 28 orang lain masuk, ada tidak pendaftaran? Tidak ada, tapi kadang-kadang itu yang terjadi, tapi ada juga orang yang mengklaim seperti di Hindoli, karena dia mengklaim itu ok...ok, mari kita bawa ke bupati dan sampai ke pengadilan, kita

Universitas Indonesia

menang...kenapa? Karena Hindoli punya buktinya, pembayaran, kalah kan dia..Hal-hal seperti ini jadi bisnis.

B: Apa karena sawit itu komoditas yang menarik dan ekspektasi pendapatannya tinggi?

A : Bukan cuma sawitnya yang punya nilai, ini juga karena banyak lawyer yang mencari objek, dia cuma datang sama kamu...eh, Bilqis begini deh, dulu bapamu itu disana, kita jadiin saja, siapa tahu kau dapat, kalau dapat kau bagi dua ya...kalau tidak dapat kan tidak rugi, jadi tidak ada apa-apa.

B : Masalah undang-undang itu apakah menyusahkan atau tidak? Khususnya untuk undang-undang kehutanan dan perkebunan.

A: Undang-undang kehutanan ini tidak terlalu menyusahkan, tetapi yang susah itu prakteknya.

B : Oh...kalau masalah sengketa dengan warga, penyelesaiannya bagaimana?

A : Selesaikan saja, kita malah tidak seperti perusahaan dalam negeri yang butuh *backing-an*, Pakai militer, sogok-sogok, saya berusaha menyelesaikan kasus dengan jalan baik-baik..Memang budaya kerja kita begitu, Cargill berusaha menanamkan budaya kerjanya ini...tidak mau korup, tidak mau menyogok, yang saya alami itu urusan ujung-ujungnya mencari duit. Dijadikan objek.

B : Perusahaan kelapa sawit pasti punya masalah ya Pak dengan konversi lahan, apa masalahnya disitu saja?

A : Masalah perizinannya juga banyak, proses yang harus dijalani, seperti Cargill itu kan masalah tandatangan sebenarnya gubernur sudah mau tandatangan, dia sudah tahu Cargill bagaimana reputasinya, kita sudah dekat sama dia, tapi karena ada kejadian ini, ya sudahlah begitu.....

Universitas Indonesia

B: Oh.....jadi berhentinya kasus ini ketika semua denda itu di bayar lalu pelepasan hutan, semua perkara selesai, begitu Pak?

A : Ya sudah selesai.

B: Masalah HSL ini apakah sama dengan Hindoli, terkait dengan penebangan IPK?

A: Itu mungkin masalah Pemanfaatan kayu. Mungkin kayunya sudah di ambil orang lain, tapi karena itu di areanya Cargill, lalu dijadikan laporan untuk akhirnya kena denda.

B: Produksi Sawit di tiga anak usahanya kecil, bagaimana Pak?

A: Mungkin kecil, tapi Cargill banyak di *supply chain* atau rantai pasokan misalnya Coca Cola kan dari Amrik, ada *global deal* antara Cargill dengan Coca Cola untuk pasokan sugar, di sawit juga banyak, ada minyak goreng, ada CPO, mungkin ada *value added*. Jadi kamu harus lihat positif negatifnya, dalam bisnisnya juga...Kenapa dia mau masuk ke perkebunan, padahal banyak masalahnya? Jangan dilihat sisi jeleknya saja, coba lihat berapa devisa negara untuk pajak ekspor, PPh, PPN, selain bayar tenaga kerja dan material disitu.

B: Pajak ekspor itu bayar pendapatan per tahunnya atau bagaimana ?

A : Pajak yang di bayar setiap kali dilakukan ekspor, misalnya saja; perhitungan harga sawit \$1000 di kurang dengan biaya-biaya dan hasilnya adalah 500, dikenakan PPH (pajak dari laba perusahaan) sebesar 25% menjadi \$125 dan PPN 10% sebesar 50, di tambah pajak ekspor misalnya 20% dari \$1000 menjadi \$200. Jadi pajak yang di dapat pemerintah pada satu ekspor ini saja sudah mencapai \$375.

B: Kalau dari 3 anak usaha sawit kecil, Cargill membeli sawit dari perusahaan swasta?

A : Iya, dari *group tradingnya*, dan setiap kali dilakukan ekspor kan pemerintah mendapat pajak ekspor dari Cargill.

B : Kalau Cargill sebagai importir kedelai misalnya, itu bagaimana, katanya menjadi dominan peranannya?

A: Begini saja, kalau di dalam negeri kekurangan, Cargill tidak jadi pemasok disitu sebenarnya tidak rugi, Cargill melakukan karena memang ada kebutuhan dalam negeri yang tidak bisa terpenuhi dan akhirnya memutuskan impor, lalu Cargill masuk, bisa dari kualitasnya dan masalah kekurangan pasokan itu.

B: Apakah benar ada indikasi konsesi kartel antar para importir kedelai, ya seperti pembagian wilayah atau penetapan harga kedelai di pasaran misalnya?

A: Tidak ada, semua bersaing sehat.

B: Untuk Sawit apakah lebih banyak yang mengekspor atau untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri?

A: Kita butuh 5 juta ton tiap tahun, kira-kira orang beli minyak goreng berapa persen dari pendapatannya, kan kecil sekali, kalau di ekspor kan kena pajak juga. Pemerintah dapat devisa.

B: 85% CPO dunia di pasok Indonesia dan Malaysia, Indonesia 55% dan sisanya Malaysia. Tapi kan setengah lahan sawit dikuasai asing, ini bagaimana?

A: So what? Kalau mereka menyumbang devisa negara yang besar, dari pajak ekspor dan Pph serta Ppnnya, hal ini beda kalau dibandingkan dengan tambang, pada dasarnya eksploitasi, jadi boleh lah direnegosiasi, kalau ini kan ada unsur *cost*; tenaga kerja, pupuk, dll. Ada *multiplier effect*, disini kan ada biaya menanam, biaya tenaga kerja, biaya pupuk, dll. pemerintah juga dapat pajak yang besar, semua orang cuma bisa bicara sepiantas saja, tapi tidak tahu kebenarannya.

Universitas Indonesia

B: Kan Cargill membeli Hindoli perusahaan yang sudah ada, kenapa tertarik berinvestasi di sawit, padahal masalahnya banyak, ini alasannya kenapa?

A : Cargill kan awalnya *supply chain*, tapi dia merasa ini bisnis yang bagus sehingga mau belajar bisnisnya sawit dengan membeli hindoli, yang kedua...pasokannya biar bisa dipenuhi sendiri selebihnya kalau kurang baru membeli dari yang lain, ada juga untuk *commodity trading*.

B: Iya, Pak. Terimakasih!

Keterangan:

B : Bilqis Fitria Salsabiela A : Narasumber C: Kolega Bisnis Narasumber

Daftar Pertanyaan pokok:

1. Bagaimana berita mengenai audit BPK per tanggal 15 januari 2010 yang menyebutkan PT.Hindoli diharuskan membayar denda?
2. Bagaimana dengan anggapan bahwa Cargill melenyapkan kayu-kayu alam sebanyak 23.265,13 m³ ?
3. Setelah adanya pemberlakuan mekanisme denda apa yang dilakukan perusahaan?
4. Apakah masalah sawit sebagian besar hanya berkisar seputar kasus konversi lahan hutan?
5. Bagaimana pendapatnya mengenai Cargill sebagai pemain besar dalam komoditas kedelai? Apakah adanya konsesi pembagian wilayah dalam bisnis kedelai impor?
6. Apa alasan ketertarikan Cargill membeli PT.Hindoli?

Universitas Indonesia

LAMPIRAN 3: Wawancara dengan Achmad Yakub; Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia.

Narasumber : Achmad Ya'kub

Tanggal wawancara: 26 Januari 2012 jam 14.30.

Tempat : Kantor Serikat Petani Indonesia (SPI)

B: Menurut tulisan Pak Hendri Saragih; ketua umum SPI, Liberalisasi pertanian menyebabkan terjadinya krisis pangan tahun 2008, produksi pangan sebenarnya mencukupi bahkan meningkat, tapi bukan produktivitas para petani, melainkan perusahaan agribisnis yang hasilnya lebih dialokasikan ke *agrofuel* dan pakan ternak itu apa benar menjadi penyebab krisis pangan? Terus....posisi petani terhadap keberadaan perusahaan agribisnis ini bagaimana?

A: Ada banyak faktor, makanya SPI jarang menyebut krisis pangan tahun 2007-2008, kita menyebutnya krisis harga pangan, FAO menyebut adanya penurunan produksi pangan, tapi kami yakin justru pangan meningkat, cek di pasar pangan itu ada, yang menjadi masalah adalah orang tidak mampu menjangkaunya, hal ini menyangkut daya beli dan situasi tertentu, misalnya; situasi bencana alam, perang, dsb. Yang terjadi sekarang sebagian besar tidak mampu menjangkau pangan karena daya beli, kenapa pangan menjadi mahal?

4. Pengalihan konsumsi pangan yang harusnya menjadi makanan, malahan menjadi pakan ternak, misal; sapi, babi seperti di Norwegia.
5. Pengalihan makanan menjadi *agrofuel*
6. Pangan ini masuk ke dalam komoditas berjangka, dia banyak spekulasi di bursa berjangka, misal; NY stock exchange, harga pangan kedelai kurang dari 90 hari bisa sehari sekali berubah, padahal kedelainya disitu saja, ini semua bisa menyebabkan kenaikan harga pangan, terutama yang paling besar adalah spekulasi tadi, yang mampu berspekulasi kan bukan petani kecil, tetapi petani

Universitas Indonesia

berskala besar atau korporasi pertanian atau perusahaan distribusi hasil pertanian, seperti; Cargill, Cargill salah satu perusahaan pendistribusi kedelai Latin Amerika, dia memperjualbelikan kedelai. Jadi bagi SPI peran-peran perusahaan besar sangat berbahaya baik bagi konsumennya, tidak ada kepastian harga, tidak ada kepastian sehat atau tidak, kedelai yang kita impor itu mengandung GMO atau tidak, GMO sendiri masih kontroversi sifatnya, di Amerika membolehkan, di Eropa menolak, GMO di anggap membahayakan, tetapi sampai saat ini belum ada ilmuwan atau akademisi yang mengatakan bahan produksi pertanian berbasis GMO atau rekayasa genetika itu bagaimana, yang kedua...SPI mempertanyakan pangan yang kita impor itu untuk pangan atau pakan? Dominasi mereka ini pada akhirnya merebet ke UU tentang pangan, UU no.7 tahun 1996, isinya bagaimana jual beli pangan, berisikan *food safety*-nya atau keamanan pangan, perdagangan pangan. Itu kan harusnya cukup di PP atau apa, tapi ini UU pangan mengatur siapa yang memproduksi pangan, bagaimana pangan di produksi, perlindungannya.

B: Apa ini menyangkut standarisasi produsen yang memproduksi pangan?

A: Bukan, UU ini mengubah perspektif pangan menjadi komoditi *heavy industry*/industri berat, pangan itu SPI melihat bukan sebagai komoditi, dalam artian bukan untuk komersialisasi seperti membeli hp atau pakaian, pangan itu berbeda, dia harus ada proteksi atau perlindungan harga dan konsumen dari bahan-bahan yang berbahaya ataupun perlindungan dari pangan di jadikan alat politik atau perang. Itu kan sangat berbeda. Nah, oleh perusahaan-perusahaan besar ini pangan menjadi alat ekonomi, alat politik dan dominasi terhadap suatu negara.

B: Apa regulasi pemerintah yang mempermudah perusahaan besar termasuk MNC masuk?

A: Ada banyak regulasi, kalau soal pangan ada; bea masuk, hambatan tarif dan non tarif, hambatan tarif misalnya; kedelai ini bea masuknya sempat 0%, orang

Universitas Indonesia

mengimpor tidak kena pajak karena tahun 1997-1998 Loi IMF ratusan ribu bahkan jutaan ton masuk mengakibatkan menurunnya jumlah petani kedelai akibat tidak mampu bersaing dengan kedelai impor. Orang lebih beralih untuk tidak menanam kedelai, jadi bagaimana menghambat impor ini masuk? Dia bisa memberlakukan bea masuk dan pajak, misalnya; 5%, juga bisa dengan non tarif barrier, misalnya; kedelainya di periksa mengandung zat apa, A,B,C secara kesehatan baik atau tidak, kalau secara sosial, apakah ternyata kedelai ini mempekerjakan anak di bawah umur di Latin Amerika sana, ini politik dagang dan banyak hal bisa di pakai Indonesia untuk meningkatkan Standar Nasional Indonesia, kualitas kedelai dan melindungi konsumen, tetapi yang terjadi adalah pemerintah hanya menjaga kestabilan politik, memastikan kedelai itu cukup dan terpenuhi dengan harga murah, politik pangan murah, tidak peduli dari mana dan siapa yang memproduksinya. Itu mengenai UU No.7 tahun 1996.

B : Terkait dengan Loi IMF itu kan membuka gerbang masuk para importir, di Indonesia sendiri ada 4 pemain besar termasuk Cargill dan 70% kebutuhan kedelai nasional di penuhi dengan cara impor, yang dari lokal hanya bisa 600.000 ton, kira-kira dengan adanya importir ini untuk petani lokalnya, bagaimana?

A: tahun 1997-1998 keran impor di buka, Soeharto mencabut subsidi. Bulog sebagai badan yang tadinya menyangga pangan menjadi lembaga yang komersial, tetapi juga di suruh untuk *Public Service Obligation* (PSO). Logikanya fungsi bulog yang komersial lebih banyak daripada melayani masyarakat, karakteristiknya terbukti dengan beras, bulog lebih mau membeli beras dari Thailanda dan Vietnam, dibandingkan beras dari petani, dulu kan semua komoditas pokok, sekarang terbatas seperti beras dan gula saja, tetapi gula juga tidak monopoli bulog, bagi kita tidak menjadi masalah bulog memonopoli, tetapi fungsinya PSO bukan komersil, kepentingannya bukan untuk mencari untung.

B: Mekanisme bulog dalam membeli ini memakai tender atau bagaimana?

Universitas Indonesia

A: Mungkin bisa tender di luar negeri, tetapi bisa juga dilakukan dengan mitra dagang atau dengan berbagai cara, tetapi dalam beberapa tahun ini bulog langsung *Government to Government, Government to Bussiness, Business to Business*, tergantung situasinya.

B: Perluasan lahan apalagi untuk *agrofuel* seperti CPO banyak dilakukan, terus lahan pertanian jadi berkurang? Penguasaan lahan petani itu semakin kecil atau bagaimana?

A: Petani itu rata-rata penguasaan lahannya 0,3 Ha/keluarga, dalam situasi seperti itu, maka yang paling dimungkinkan mereka adalah subsistem, kalau ada surplus ya untuk di jual, tetapi ketika ada serbuan barang impor yang lebih murah karena negara asalnya ada domestic support dan subsidi, kemudian di ekspor, kita tentu tidak sanggup bersaing, terakhir kan kentang, petani Dieng dan petani daratan tinggi Sumatra utara kalah bersaing, terakhir ini bawang merah, hasil petani kita kalah bersaing dengan bawang dari China dan India.

B: Ada kebijakan pemerintah yang digunakan untuk ekspansi lahan guna kebutuhan energi?

A: banyak, ada PP, Keppres, energi untuk biofuel atau agrofuel, alasan pemerintah kan ingin memenuhi kebutuhan nasional Indonesia, menurunkan penggunaan energy fosil menuju ke agrofuel, tapi yang sekarang, tidak kan? Sekarang sawit sebagian besar hasil CPO-nya untuk ke luar negeri, ke Eropa, India, Bangladesh, China.

B: Jadi apakah pemenuhan dalam negeri sendiri kurang dan lebih banyak ekspor?

A: Bukan kurang lagi, tetapi minus, coba cek harga di tahun 2007-2008 CPO tinggi, pemilik perusahaan sawit lebih ingin mengekspor CPO-nya keluar negeri, walaupun kena pajak ekspor, yang paling miris kita adalah eksportir CPO 18 juta ton/tahun, tapi kita juga rakyat yang paling panjang untuk mengantri minyak goreng, artinya kita tidak bisa menjamin suatu barang itu surplus, tidak menjamin kebutuhan nasional

dengan sistem ekonomi liberal ini, makanya diperlukan peran negara seperti bulog yang monopoli tapi untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya.

B: Pemerintah punya regulasi tidak untuk membatasi jumlah ekspor CPO?

A: Tidak ada, hanya pungutan berupa pajak ekspor itu tadi. PE ini mengakibatkan adanya pajak progresif, sekian ton kena pajak, tetapi kan ujung-ujungnya nanti dia tinggal menekan harga di level mitranya, petani kecil yang di tekan, jadi dia tetap untung besar dengan ekspor CPO.

B : Jadi ini gerbang awalnya apa? Apakah liberalisasi pertanian menyebabkan keterpurukan petani atau bagaimana?

A: Gerbang awalnya Indonesia tidak memiliki *grand design* nasional tentang pembangunan pertanian, cabang pertanian kan banyak; perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan, pembangunan kita itu mau seperti apa atau apa yang harus dilakukan.

B: GAKOPTINDO bekerjasama dengan Cargill untuk pemenuhan kedelainya, lalu bagaimana dengan petani kedelai lokal?

A : Pengguna biasanya pendekatannya yang paling murah, tidak soal apakah impor atau lokal.

B: Cargill kan salah satu pelaku oligopoli dalam kedelai, lalu di akhir desember 2007 menimbun 13.000 ton di Surabaya, ini kira-kira spekulasi atau apa?

A : Dia kan pemain utama, bisa menentukan harga paku di rumah kita, sebagai pemain utama yang bisa menentukan harga, kemungkinan besar itu spekulasi dan memang menjadi prokontra yang di maksud dengan spekulasi itu juga belum ada aturannya, gimana dan berapa yang di stok atau di jual, tetapi kemudian yang perlu dipertanyakan adalah pada saat di pasaran butuh kedelai, Cargill malah menyimpan

Universitas Indonesia

kedelai di Surabaya, SPI mendapat data dari media (SCTV dan teman-teman di Surabaya), setelah di *blow up*, hilang saja beritanya, tidak ada kelanjutannya.

B : Di bulan februari 2008 ada koran yang memberitakan kalau itu stok Cargill untuk 3 bulan dan belum lewat masanya, jadi Cargill dinyatakan tidak salah.

A : Kemungkinan kalau hukum, Cargill sebagai MNC bisa menang, tetapi kita lihat gejala atau fakta sosial, akibat aksinya di Indonesia itu apa, petani kedelai berkurang, harga kedelai lokal tidak mampu bersaing, apa imbas sosial dan ekonominya, kasus-kasus Cargill bisa di *high light* saja, bahwa terjadi begini-begini, yang penting di dalam adalah oligopoli dan penguasaan kedelainya, kemana dia mendistribusikannya, darimana dia impor, dsb.

B : Datanya dari KPPU?

A : Dari KPPU, Kemerindag, bagaimana ini berdampak pada petani kedelainya, bayangin petani yang dekat, di depan muka dicuekin dengan alasan tahu itu lebih cocok dengan kedelai impor dan tempe dengan kedelai lokal.

B : Apa saja kerugian bagi petani lokal?

A : Harga lebih mahal, di banding impor kedelai itu karena di Latin Amerika sistemnya monokultur seperti sawit disini yang jumlahnya ratusan hektar dan dikelola oleh perusahaan, petani menjadi buruh pertanian, sebagai eksportir juga dia mendapat keringanan; perbankan, pajak, subsidi pupuk, dll. Akhirnya kita kalah bersaing, tidak hanya kedelai, tetapi juga bawang, kentang, susu, dll.

B : Peraturan apa yang paling memberatkan petani?

A: Regulasinya tidak ada mengenai kepastian harga, bea masuk kedelai terlalu murah, 5% harusnya bertahap dinaikan seiring dengan mendorong peningkatan produksi nasional, jadi suatu saat kedelai impor tidak terlalu mempengaruhi harga nasional,

tetapi pertanyaannya apakah petani sanggup memenuhi kebutuhan nasional, kan saat ini belum, jadi harus ada insentif harga yang pemerintah harus pikirkan.

B : Kalau Sawit kan Cargill sedikit produksinya, tetapi karena kasusnya sempat di *blow up* media jadi menarik....

A: Mungkin Cargill memulai bisnis perkebunan sawit disini, latihan dulu, dari situ dia memperluas, pemain sawit kan banyak dengan berbagai karakteristik pemain, ada Gurthie, Wilmar, Smart, Cargill, retailnya ada Carefour, Giant Group saling terkoneksi, ketika tahun 2007-2008 pada bangkrut karena krisis financial global, pertanian malah naik, ini mengakibatkan banyak orang yang main di bursa saham atau apa, bukan hanya dipertambangan, tetapi sudah mulai membidik komoditas pangan.

B : Dampak dari perusahaan agribisnis ini langsung atau tidak?

A : Langsung, sangat langsung, dia menguasai benih, peptisida dan pasar distribusi hasil pangan.

B: Indonesia mengikatkan diri dengan WTO, imbasnya bagaimana?

A : Langsung, kan perlu diratifikasi dan WTO sifatnya *legally binding* alias mengikat secara hukum, kalau kita melanggar itu ya bisa di bawa ke arbitrase internasional, aturan WTO bahkan melebihi UU nasional.

B : Jadi...Apakah perlu Indonesia keluar dari WTO?

A : WTO jangan mengurus masalah pertanian, FAO saja karena pangan adalah kebutuhan dasar seluruh dunia.

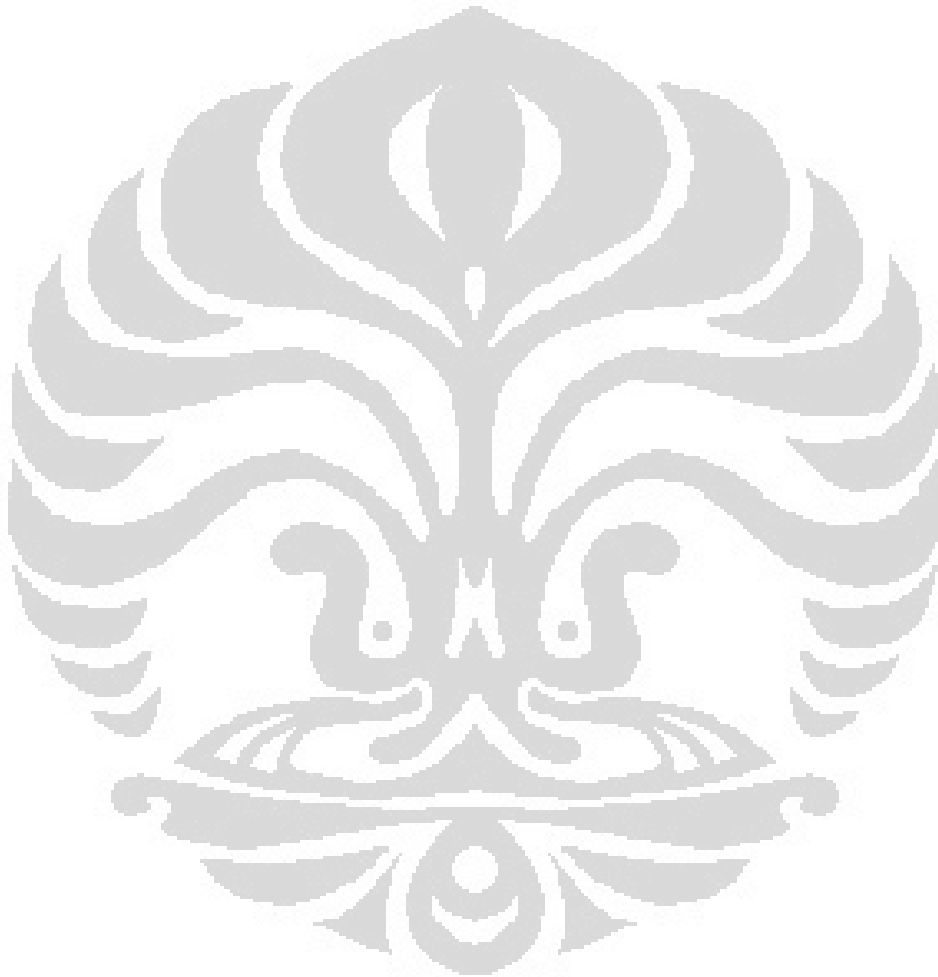
Keterangan:

A: Narasumber, B: Bilqis Fitria Salsabiela

Universitas Indonesia

Daftar Pertanyaan Pokok:

1. Bagaimana mencermati fenomena krisis harga pangan?
2. Bagaimana keberadaan perusahaan agribisnis terhadap posisi petani lokal dan dampaknya?
3. Bentuk regulasi pemerintah seperti apa?



Universitas Indonesia

LAMPIRAN 4: Wawancara dengan Asep Nurdin; Ketua 1 GAKOPTINDO.

Narasumber : Asep Nurdin; Ketua 1 Gabungan koperasi tahu dan tempe Indonesia (GAKOPTINDO)

Tanggal wawancara: 1 Maret 2012 jam 11.20 WIB.

Tempat : melalui telepon

B: Pasokan kedelai KOPTI di dapat darimana?

A: Itu didapatnya dari importir kedelai

B: Apakah semua kedelai KOPTI itu impor atau ada yang lokal?

A: Kalau yang lokal ada, tapi kebanyakan memang impor, kedelai dari Amerika.

B: Cara membeli kedelai dari importir itu bagaimana?

A: Langsung beli ke importir yang terdaftar, yang cocok dengan permintaan kita, begitu saja.

B: Biasanya KOPTI ini membeli produk GCU atau CI atau apa?

A: Kadang-kadang dari Cargill, kadang-kadang dari Gerbang Cahaya Utama, atau yang lain.

B: Teluk Intan?

A: Itu sama, GCU dengan teluk intan itu satu perusahaan, karena satu dan lain halnya GCU beralih ke Teluk Intan, atau Teluk Intan yang beralih ke GCU, saya kurang tahu, tapi yang jelas mereka satu perusahaan.

B: Lebih banyak mana pasokan yang berasal dari Cargill atau Gerbang Cahaya Utama?

Universitas Indonesia

A: Kalau KOPTI di sini memilih GCU karena Cargill agak mahal harganya, kita kan tergantung permintaan anggota dan memilih harga yang paling bagus.

B: Oh...berarti harga dari para importir itu berbeda-beda, tidak seragam?

A: Iya berbeda-beda, importir yang besar seperti GCU, CI, SB, mereka mengambil kedelai dari kapal, ya harus di olah lagi, sebelumnya kan belum ada merknya, mereka mengolah dan membersihkan dulu, lalu di pasang merk, misalnya; GCU ada merknya bola merah, Cargill dengan merk Pelangi, jadi harganya menjadi tidak sama antar importir.

B: Selisih harga antar importir itu banyak atau sedikit?

A: Kita tidak tahu pastinya, itu harga bisa di lihat di internet dengan NYMEX. Harga-harganya bisa berubah-ubah setiap waktu.

B: Apakah benar kalau ada anggapan bahwa tahu itu bagusya menggunakan kedelai impor, kalau tempe menggunakan kedelai lokal?

A: Tidak benar, kedelai lokal juga bisa untuk tahu, justru lebih bagus menggunakan yang lokal, tapi harganya mahal dan pasokannya sedikit.

B: Berarti...mutu sebenarnya lebih bagus kedelai lokal?

A: Iya, lokal itu bagus

B: Kelebihan kedelai lokal di banding impor?

A: Kedelai lokal ukurannya lebih kecil, tetapi lebih gurih, setelah di panen kedelai dikeringkan, kan terkena sinar matahari, sari dan wanginya masih ada, kalau impor kedelainya disimpan sudah lama, mutunya juga sudah berkurang.

B: Perbedaan selisih harga kedelai lokal dan impor ini jauh atau bagaimana?

Universitas Indonesia

A: Lumayan, kalau kedelai lokal kendalanya waktu menanam harga kedelai mahal, tapi pas panen harganya jatuh, harusnya lokal di harga 6000-an, tapi harganya di bawah 6000an, malah 5700, sementara itu juga jumlah petani kedelai banyak yang berkurang dengan jumlah sawah yang terbatas, kalau di luar kan sudah berasal dari perkebunan yang besar, kalau kedelai lokal kan penjualannya pakai berbagai macam, petani datang ke pengumpul, rantai distribusinya panjang, jadi harganya menjadi mahal.

B: Cargill kan impor kedelai dari Amerika? GCU juga? Apa ada importir yang melelang kedelai lokal?

A: Sejauh ini belum ada.

B : Cargill itu kan perusahaan Amerika, kalau GCU ini milik asing atau swasta?

A: Milik orang Indonesia, GCU merk kedelainya bola merah.

B: Sebenarnya bagaimana mekanismenya KOPTI mendapat kedelai impor?

A: Melalui perdagangan terbuka, ada uang ada barang.

B: Berarti ada kontrak antara KOPTI dan importir?

A: Kita tidak ada kontrak, kalau ada uang ya beli langsung.

B: Apakah KOPTI yang lain juga memilih GCU atau tergantung permintaan?

A: Tergantung permintaan anggotanya, kalau banyak yang suka pelangi ya pilih Cargill, kalau bola merah ya GCU, ada juga yang pakai tiga roda yang punya importir kecil.

B: Pak Asep memilih GCU karena harganya lebih murah?

A: Itu permintaan anggota KOPTI, kami melayani semua permintaan, karena KOPTI kan tujuannya melaksanakan prinsip-prinsip koperasi, membantu pasokan kedelai karena anggota-anggotanya para pengusaha tahu dan tempe.

B: Alokasi produksi tahu dan tempe nya kemana?

A: Di jual ke pasar, KOPTI hanya membantu pasokan kedelai, tidak masuk ke ranah hasil produksi dan distribusinya.

B: Harga kedelai impor naik di tahun 2008 misalnya, harga kedelai di pasar jadi naik, apa benar ini karena kenaikan harga kedelai impor?

A: Iya, ini ketergantungan, kadang-kadang harga suka dimainkan oleh pedagang, tergantung apa yang mereka lakukan kalau dulu kan ada yang mengatur yaitu pemerintah, sekarang sudah tidak bisa, diserahkan ke pasar.

B: Penggunaan kedelai lokal di KOPTI ini kira-kira berapa persen?

A: Saya belum tahu persisnya masalah data ini, tapi kalau yang jelas dari perkiraan kedelai lokal itu digunakan hanya sekitar 10-20%.

B: Apa itu nanti di campur dengan kedelai impor atau bagaimana?

A: Bisa di campur, tapi kalau untuk produksi tempe tidak bisa di campur, yang bisa hanya tahu.

B : Terimakasih Pak atas wawancaranya!

Keterangan:

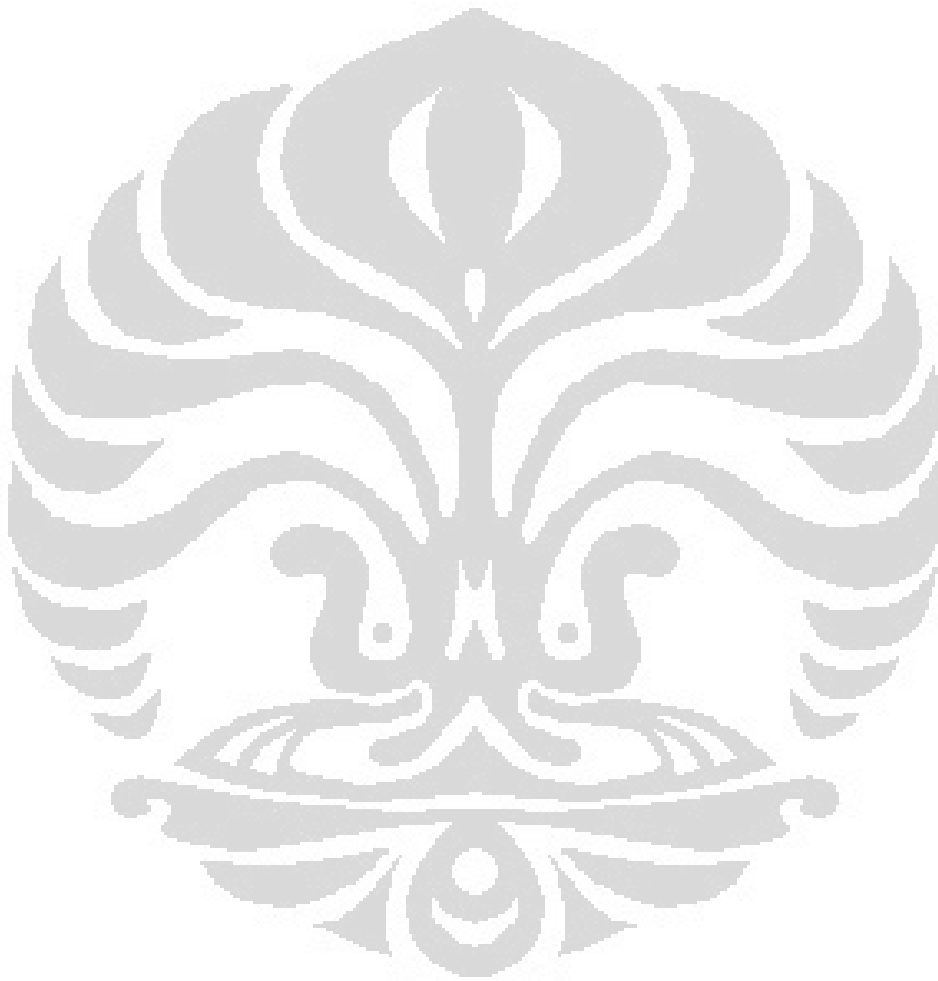
A: Narasumber, B: Bilqis Fitria Salsabiela

Daftar Pertanyaan Pokok:

1. Darimana mendapatkan pasokan kedelai?

Universitas Indonesia

2. Selisih harga antar importir itu banyak atau sedikit?
3. Apa kelebihan kedelai lokal di banding impor?
4. Kenapa lebih banyak menggunakan kedelai impor saat ini?



Universitas Indonesia

Lampiran 5: Wawancara dengan Pejabat KPPU

Narasumber : Pejabat KPPU

Tanggal wawancara: 29 Februari 2012 jam 15.00.

Tempat : kantor KPPU



B: Bagaimana tentang pemberkasan importir kedelai yang di buat oleh KPPU?

A: Pemberkasan itu kalau untuk pemerintah biasanya bersifat *confidential* kita berikan hanya kepada pemerintah, yang merupakan suatu kebijakan. Persaingan tidak sehat atau praktek monopoli itu bisa timbul oleh dua hal, yakni; pertama, karena perilaku-perilaku para pelaku usahanya dan kedua, karena kebijakan pemerintah, kalau perilaku usahanya dilakukan dengan pendekatan hukum melalui tuntutan perkara, kalau kebijakan pemerintahnya KPPU hanya di beri kewenangan dan sebatas memberikan saran serta pertimbangan kepada pemerintah supaya kebijakannya di rubah. Kalau ini hasil kajian nanti ada *positioning paper*, tapi kalau ini evaluasi kebijakan, hasilnya itu tidak diperuntukkan bagi umum, namun untuk Pemerintah saja.

B: Kalau masalah pemberkasan ini masuk ke dalam kategori yang mana? *Confidential* atau *non confidential*?

A: Kalau pemberkasan itu masuk ke ranah perkara. Pemberkasan itu sudah ada perilaku-perilaku pelaku usahanya yang berindikasi melanggar undang-undang, makanya dia masuk ke pemberkasan. Kalau sudah tahap pemberkasan masuk ke pemenangan perkara.

B: Kalau misalnya dihentikan dalam tahap pemberkasan itu biasanya karena apa?

Universitas Indonesia

A: Kalau dihentikan itu biasanya karena alat buktinya masih kurang karena dalam Perkom no.1 tahun 2010 itu minimal 2 bukti untuk pemenangan perkara, ada *direct evident* dan *indirect evidence* (satu alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri harus disokong alat bukti yang lain supaya kuat, misalnya; ada pertemuan antara saya dan kamu lagi makan di restoran, ada saksi yang melihat, trus misalnya ada bukti atm di gesek untuk bayar makannya) yang pertama itu mungkin bukan kewenangan KPPU, atau yang kedua, karena tim KPPU bekerja hasilnya digelar dalam laporan pemberkasan, kemudian rapat komisi akan memutuskan atas laporan pemberkasan itu, apakah itu layak masuk dalam pemenangan perkara atau tidak, atau harus di lengkapi alat buktinya dulu.

B: Bagaimana dengan kasus Kartel yang pernah ditangani KPPU?

A: salah satu kasus kartel itu misalnya minyak goreng, ada pertemuan antara pemerintah dan pelaku usaha minyak goreng, ada pertemuan pemerintah dengan asosiasi minyak goreng, itu sudah menjadi suatu *indirect evidence*, ada risalah rapatnya, salahnya komisioner, risalah rapat itu bukan *indirect evidence* itu *direct evidence* karena sudah merupakan bukti nyata kalau ada pertemuan yang di atur cuma KPPU tidak dimasukan kedalam kategori direct evidence, KPPU Perjanjian itu bisa tertulis dan tidak tertulis, KPPU mengatakan bahwa mereka ada pertemuan ngga, mau harga berapapun orang akan membeli, membuktikan kejahatan ekonomi itu tidak gampang, lain dengan dulu, kejahatan ekonomi sekarang jauh lebih luas. Yang pemenangan perkara kartel minyak goreng ini sudah sampai PN tapi kita kalah, kemudian kita banding di kasasi Mahkamah Agung, tapi diputuskan alat buktinya kurang, jadi pembuktian kartel itu susah.

B: Dasar untuk menginterpretasi *indirect evidence* itu masuk ke bukti petunjuk itu?

A: *indirect evidence* itu baru menyangkut kartel saja, ada bukti ekonomi dan bukti komunikasi dan bukti hukum, interpretasi itu ada tapi hanya mengindikasikan peristiwa terjadinya kartel, sifatnya tidak langsung seperti dokumen yang bisa di lihat

Universitas Indonesia

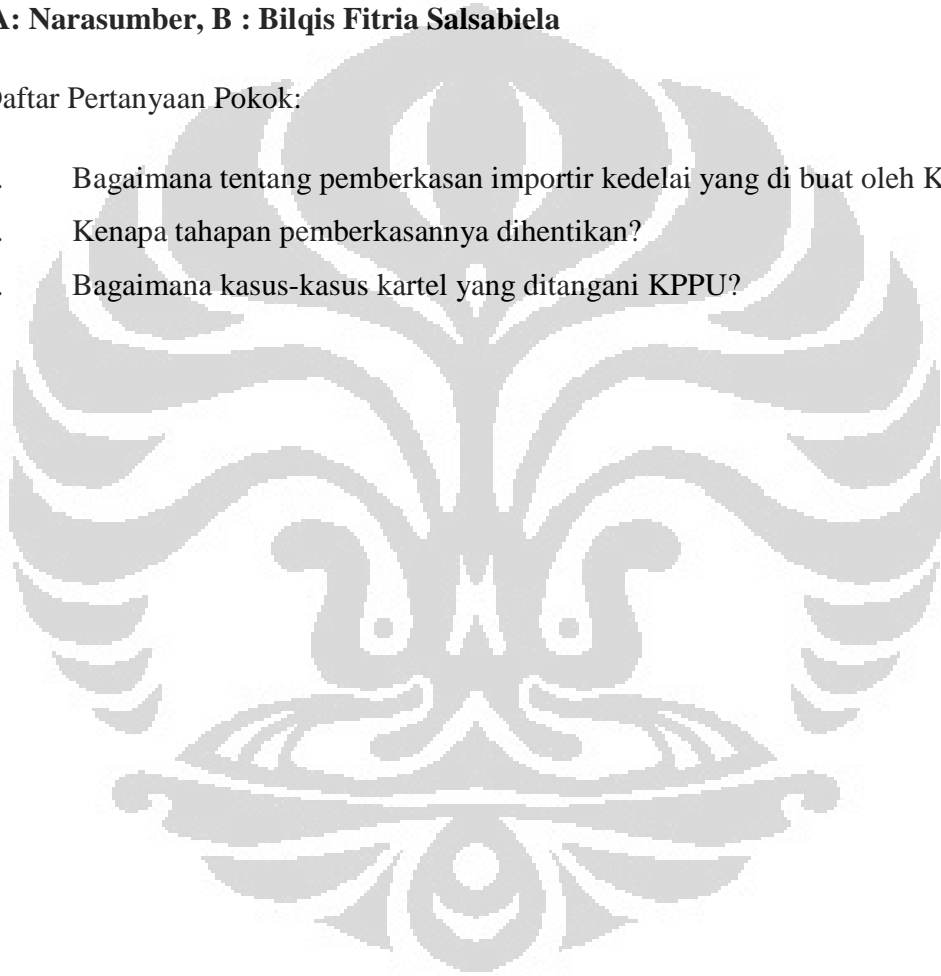
dan dipake langsung, jelas dokumen, kalau keterangan saksi kan bisa bohong, dari 5 itu dibutuhkan 2 alat bukti, bisa petunjuk berupa keterangan saksi bisa dengan dokumen atau petunjuk didukung oleh keterangan ahli, direct ini adalah risalah, *indirectnya* ada pertemuan untuk mengatur harga.

Keterangan:

A: Narasumber, B : Bilqis Fitria Salsabiela

Daftar Pertanyaan Pokok:

1. Bagaimana tentang pemberkasannya importir kedelai yang di buat oleh KPPU?
2. Kenapa tahapan pemberkasannya dihentikan?
3. Bagaimana kasus-kasus kartel yang ditangani KPPU?



Universitas Indonesia

Lampiran 6: Wawancara dengan Staff Investigasi KPPU



Narasumber : Staff Investigasi KPPU

Tanggal wawancara: 29 Februari 2012 Jam 15.30.

Tempat : Kantor KPPU

A: membuktikan satu kejahatan ekonomi sebuah kasus itu sangatlah sulit, apalagi menyangkut indikasi kartel perusahaan-perusahaan yang menjalankan usaha. Karena bisa disepakatinya penetapan harga, pembatasan produksi, alokasi konsumen, pembagian wilayah, pengaturan keuntungan dan pengaturan tender.

B: Sebenarnya kesuksesan itu karena apa?

A: ya kartel itu suksesnya tergantung dari koordinasi atau kerjasama, disiplin dan loyalitas anggota. Praktek kartel sukses kalau yang mendirect-nya leader, kalau pemain kecil mana bisa, karena kalau pemain besar bisa mempengaruhi pasar.

B: Kasus-kasus kartel KPPU itu sudah ada yang ke ranah kemenangan perkara?

A: Ada, kasus-kasus yang pernah ditangani oleh KPPU, seperti; kasus kartel minyak goreng dengan nomer putusan 024/KPPU-I/2009, putusan KPPU ditolak oleh Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Negeri itu dikuatkan Mahkamah Agung

Universitas Indonesia

kasus kartel *fuel surcharge* No putusan 25/KPPU-I/2009, putusan KPPU itu di tolak oleh Pengadilan Negeri dan kasus ini masih *pending* di tingkat kasasi Mahkamah Agung, dll.

B: Kenapa lebih banyak di tolak?

A: susah mendapat bukti *hardcore/direct evidence* seperti; dokumen perjanjian, *implicit agreement or implied agreement* (notulen rapat-rapat, surat-menyurat, telepon, email), pertemuan antara pelaku atau asosiasi yang membicarakan harga, produksi, pemasaran, wilayah pasar, *discount*. Kalau *indirect evidence* itu berupa bukti ekonomi (bukti yang terkait dengan struktur pasar dan perilaku) dan bukti komunikasi berupa fakta adanya pertemuan dan atau komunikasi antar pesaing, meskipun tidak ada substansi dari pertemuan dan atau komunikasi tersebut.

Keterangan:

A: Narasumber, B : Bilqis Fitria Salsabiela

Daftar pertanyaan pokok:

1. Apa faktor kesuksesan dalam sebuah kartel?
2. Apakah sudah ada kasus-kasus kartel di KPPU yang masuk ke ranah kemenangan perkara?
3. Kenapa dari kasus-kasus kartel lebih banyak ditolak oleh pengadilan negeri?

LAMPIRAN 7: Wawancara dengan Ruslan; Ketua Petani Kedelai Wilayah Jawa Timur

Narasumber : Ruslan

Tanggal wawancara: 5 Maret 2012 jam 14.35.

Tempat : melalui telepon

B: Apa kendala yang bapak temui sebagai petani kedelai?

R: Pertama....benih kedelai itu mahal, yang kedua....tidak ada benih-benih kedelai yang bagus, makanya semua petani itu enggan menanam kedelai karena rugi, kalau di jual harga kedelai itu sangat murah. Pada saat menanam harganya mahal, saat panen harganya murah.

B: Bapak menanam kedelai yang lokal atau impor? Karena kan sekarang ini harga kedelai impor jauh lebih murah....

R: Di wilayah jawa timur ini tidak ada yang mau menanam kedelai impor, jarang ada yang berani karena pembiayaannya tidak sesuai dan hasilnya juga kurang bagus.

B: Berarti.... Kedelai yang di tanam itu semuanya yang lokal?

R: Iya, banyak petani yang menanam kedelai lokal sampai beberapa hektar.

B: Kalau keberadaan kedelai impor ini dampaknya bagaimana?

R: Berdampak langsung karena harganya lebih murah dari kedelai lokal, kedelai kita jadi kalah bersaing.

B: Kenapa Bapak masih bertahan untuk menanam kedelai lokal kalau kalah bersaing dengan yang impor?

Universitas Indonesia

R: Kita kan petani ingin melestarikan tanaman-tanaman lokal, kita tidak mau dikalahkan oleh produk-produk luar.

B: Kalau dari segi menanam kedelainya apa ada kendala?

R: Kedelai itu hanya bisa di tanam dengan cara tumpang sari, misalnya lahan untuk menanam jagung lalu jagungnya mau panen, dibawahnya menanam kedelai, kalau hanya ditanami kedelai bisa-bisa rugi, kalau di Ponorogo ada ribuan hektar tanaman sari ini, di Bojonegoro juga sama di tanam di saat musim hujan saja, kalau jagung mau panen kita tanami kedelai, kalau kedelai panen kita tanami jagung lagi kepala wilayah Jawa Timur, saya tahu kantong-kantong kedelai karena petaninya tumpang sari ya kalau musim hujan itu semua menanam kedelai, tapi jika tidak ya menanam padi atau yang lainnya.

B: Dimana saja daerah-daerah sentra kedelai?

R: Ponorogo, Bojonegoro, Tulung Agung, Trenggalek, pokoknya daerah-daerah pegunungan dan tanahnya basah.

B: Kalau penyaluran atau distribusi kedelai lokal kemana saja?

R: Sekarang penyalurannya langsung ke tiap-tiap penggilingan tahu, ke tengkulak juga ada.

B: Kendala penyaluran menyangkut keberadaan kedelai impor?

R: Kedelai lokal hanya bisa masuk ke daerah-daerah, kalau impor biasanya sudah dipakai di kota-kota besar seperti di Surabaya, kalau di daerah sekarang masih dikuasai oleh kedelai lokal, tapi kalau kedelai impor merembet ke daerah-daerah karena harganya murah, kan bisa berbahaya buat petani lokal.

B: Bapak memasok kedelai untuk wilayah Ponorogo dan sekitarnya?

R: Iya...

Universitas Indonesia

B: Apa kendala utama bagi kedelai lokal?

R: Petani masih kurang cerdas mengenai panennya yang kurang, ini terkait juga masalah modal, terus...kedelai impor sekarang menguasai kota-kota besar, belum masuk ke daerah-daerah, kalau nanti masuk ke daerah-daerah bisa berbahaya untuk petani lokal.

B: Kalau perbedaan harga antara kedelai impor dan kedelai lokal?

R: Lumayan, kedelai impor lebih murah, tapi soal rasa dan wangi kedelai lokal lebih unggul.

B: Benar atau tidak adanya anggapan kalau tahu lebih bagus menggunakan kedelai impor, kalau tempe menggunakan kedelai lokal?

R: Tidak benar, tahu bisa memakai kedelai impor, tapi kalau memakai kedelai lokal justru lebih gurih rasanya karena sari tepungnya masih wangi, kalau impor tidak gurih, kalau di buat tahu masih bisa menggunakan kedelai impor, tapi kalau tempe harus menggunakan kedelai lokal karena kalau tidak rasanya tidak enak, meskipun harga kedelainya lebih mahal.

B: Apakah jumlah petani yang menanam kedelai lokal itu berkurang?

R : Iya, tetapi banyak juga yang masih exist menanam kedelai lokal, menghasilkan beberapa ton, pabrik tahu kan setiap hari membutuhkan 5-10 ton, itu memakai kedelai lokal, tapi sekarang kan ada pesaing dari kedelai impor.

B: Sejauh ini apakah ada peraturan pemerintah yang meringankan atau menyulitkan petani kedelai?

R: Sejak dulu pemerintah Indonesia berjabat tangan dengan kapitalis, tidak ada pemerintah yang memperhatikan masalah petani, bagaimanapun juga petani harus bangkit, jangan kalah dengan produk impor.

Universitas Indonesia

B: Ada masukan untuk pemerintah?

R: Bagaimana pemerintah mempunyai program terhadap petani yang lebih baik, jangan sampai petani-petani Indonesia kalah dengan luar negeri, harusnya produk pertanian Indonesia dikuasai oleh petani lokal, bukan produk impor, jangan sampai kita dikuasai negara-negara asing.

B: Bapak sebagai anggota SPI kalau mengadakan pertemuan membahas tent

R: Pertemuannya bisa membahas mengenai permasalahan tentang tanaman dan kebutuhan pasar, bagaimana petani jangan sampai tertinggal dari negara-negara lain.

B: Terimakasih, Pak!

Keterangan:

A: Narasumber, B: Bilqis Fitria Salsabiela

Daftar Pertanyaan Pokok:

1. Apa kendala yang ditemui sebagai petani kedelai?
2. Bagaimana dampak kedelai impor?
3. Bagaimana mengenai perbedaan harga kedelai impor dan lokal?
4. Apakah jumlah petani yang menanam kedelai lokal berkurang, apa sebabnya?

Lampiran 8: Wawancara dengan Ardi; Pemasok Kedelai Impor



Narasumber : Ardi; Pemasok Kedelai berskala kecil

Tanggal wawancara: 8 April 2012 Jam 12.30.

Tempat : Kabupaten Cirebon

B: Mendapatkan pasokan kedelainya dari mana?

A: Kita ini pemasok kecil yang mendapatkan kedelai dari pemasok kedelai yang lebih besar. Kita dapatkan dari daerah Temanggung, tadinya pasokan kedelai kita dapat dari Kota Cirebon, tapi karena selisih harga yang berbeda antar para pemasok itu, kita mencari yang lebih murah harganya, maka kita pindah ke Temanggung yang selisih harganya Rp.50,-.

B: Kedelai yang di beli itu jenisnya impor saja atau ada juga yang lokal?

A: Sekarang ini semua industri disini memakai kedelai impor sebagai bahan bakunya karena harganya jauh lebih murah, tadinya per kilo 6400 sekarang 6750. Kenaikan mulai berlaku minggu kemarin.

B: Kedelai yang biasa di beli itu mereknya apa?

A: Berubah-ubah tergantung kondisinya, pernah SB, pernah Pelangi, pernah SMB cuma sebentar kemudian diganti dengan Bola Merah, sekarang lebih banyak kita menggunakan Bola Merah yang banyak tersedia di pasaran.

Universitas Indonesia

B: Katanya kalau tempe hanya bisa menggunakan kedelai lokal untuk pembuatannya?

A: Oh, sekarang semua industri kecil tahu dan tempe di sini menggunakan kedelai impor karena harganya lebih murah, kedelai lokal harganya bisa di atas 7000an sementara impor 6750/kilo, bisa di bayangkan untuk 6750 saja bisa dihasilkan 1 ton tempe, misalnya 8 buah tempe, sementara harga tempe hanya berkisar 1000 rupiah, apakah itu sudah mencukupi untuk menutup biaya produksi tempe, saya kurang tahu? Kalau memilih yang di atas 7000an sementara harga tempe tetap 1000an kan mereka bisa rugi.

B: Terimakasih, Pak!

Keterangan:

A: Narasumber, B: Bilqis Fitria Salsabiela

Daftar Pertanyaan pokok:

1. Dari mana mendapatkan pasokan kedelai?
2. Jenis kedelai apa yang dibeli dan apa mereknya?
3. Apakah kedelai impor bisa digunakan untuk semua produk berbahan baku kedelai yang semula bahannya menggunakan kedelai lokal?

Lampiran 9: Wawancara dengan Pengrajin Tempe

Narasumber : Pengrajin Tempe

Tanggal wawancara: 10 April 2012 jam 11.30.

Tempat : Kuningan, Jawa Barat

B: Bahan baku kedelainya ini lokal atau impor?

A: Oh, sekarang semua industri kecil tahu dan tempe di sini menggunakan kedelai impor karena harganya lebih murah, kedelai lokal harganya bisa di atas 7000an sementara impor 6750/kilo, untuk 6750 saja bisa dihasilkan 8 buah tempe, harga tempennya hanya berkisar 1000 rupiah, para pengrajin juga menghitung biaya produksi tempe, Kalau memilih yang di atas 7000an sementara harga tempe tetap 1000an kan bisa rugi. Kalau kedelai impor juga ukurannya lebih besar.

B: Kalau pakai lokal?

A: Harganya mahal, kecil-kecil ukurannya, tapi memang lebih bermutu kualitasnya, tapi kalau pengrajin tempe ya hitung-hitungan biaya produksinya juga, lebih menggunakan kedelai impor karena masalah perbedaan harga itu. Kedelai impor lebih murah.

B: Pasokannya dapat darimana?

A: Dari koperasi atau penyalur kedelai, semuanya sudah menggunakan impor.

Keterangan: A: Narasumber, B: Bilqis Fitria Salsabiela

Daftar Pertanyaan Pokok:

- Apa bahan baku kedelai yang digunakan? Kenapa memilih kedelai impor sebagai bahan baku? Dan mendapatkan pasokannya dari mana?

Universitas Indonesia

Lampiran 10: Wawancara dengan Konsumen



Narasumber : salah satu konsumen

Tanggal wawancara: 10 April 2012 jam 11.30.

Tempat : Kuningan, Jawa Barat

B: Suka makan tempe? Rasanya apakah ada perbedaan dengan yang dulu?

A: Iya, Agak berbeda, tapi tidak terlalu mencolok, biasa saja.

B: Sudah tahu atau belum kalau bahan bakunya berasal dari kedelai impor?

A: Iya, tapi tidak jadi masalah.

B: Kalau kedelai impor kan katanya mengandung GMO atau rekayasa genetik yang masih kontroversi itu bagaimana?

A: Saya tidak tahu, tapi kan belum di larang

B: Terimakasih

Universitas Indonesia

Keterangan:

A: Narasumber, B: Bilqis Fitria Salsabiela

Daftar Pertanyaan Pokok:

1. Apakah ada perbedaan rasa dari tempe yang sekarang dengan yang dulu?
2. Apakah mengetahui adanya kandungan GMO atau rekayasa genetik dalam kedelai impor?



Universitas Indonesia

LAMPIRAN 11: Email dari Elfian Effendi; Direktur Greenomics Indonesia

Email dari Elfian Effendi; Direktur LSM Greenomics Indonesia tanggal 26 Februari 2012.

Dear Mba Bilqis,

Di bawah ini kami sampaikan update dari advokasi Greenomics terhadap PT Hindoli (anak usaha Cargill).

Berita soal update tersebut dimuat di Mongabay.com (salah satu situs lingkungan yang paling berpengaruh di dunia); http://news.mongabay.com/2012/0223-hindoli_fine_palm_oil.html

Mudah-mudahan update di bawah ini bisa bermanfaat.

Salam, Elfian

Akhirnya, anak usaha sawit Cargill membayar penuh ganti rugi kayu dari kawasan hutan yang illegally cleared untuk pembangunan kebun sawit sebesar USD1 juta

Walaupun Cargill sempat membantah pernyataan pers Greenomics Indonesia ketika mengekspos laporan audit BPK RI soal kasus pembukaan kawasan hutan di luar areal konsesinya serta meminta Cargill membayar secara penuh ganti rugi tegakan berdasarkan laporan audit BPK tersebut, akhirnya perusahaan perkebunan sawit PT Hindoli yang beroperasi di Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan anak usaha Grup Cargill, telah melakukan pembayaran tambahan atas ganti rugi kayu sebagai

Universitas Indonesia

akibat dilakukannya pembukaan kawasan hutan di luar areal konsesinya seluas hampir 2,000 hektar, mengacu pada laporan BPK RI tertanggal 15 Januari 2010.

Kepastian pembayaran tersebut diperoleh oleh Greenomics setelah mengkonfirmasi langsung kepada pejabat berwenang di Kementerian Kehutanan hari ini (Jumat, 17 Februari 2012).

Sebagai grup usaha agribisnis raksasa multinasional AS yang mengoperasikan perkebunan sawit di Indonesia, Greenomics sangat mengapresiasi atas kepatuhan Cargill tersebut.

Greenomics menilai, kepatuhan Cargill tersebut sepatutnya menjadi contoh yang baik yang perlu ditiru oleh perusahaan-perusahaan sawit lainnya yang terlibat dalam pembukaan kawasan hutan tanpa izin sah.

Mengingat PT Hindoli adalah penerima sertifikat RSPO, tentu RSPO juga perlu mengapresiasi langkah PT Hindoli tersebut serta menjadikannya sebagai contoh kepatuhan, yang kemudian mewajibkan kepada para perusahaan sawit lainnya -- baik yang telah menerima sertifikat RSPO maupun yang masih berstatus RSPO membership -- untuk menyelesaikan setiap temuan dan rekomendasi BPK RI secara pro-aktif bagi perusahaan-perusahaan yang dinyatakan terkait oleh laporan audit BPK, terutama yang terkait dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh operasi perkebunan sawitnya.

Sebagai catatan, pada 5 Oktober 2010, Greenomics menyurati RSPO untuk melaporkan kasus PT Hindoli tersebut berdasarkan laporan audit BPK tersebut. Namun, tidak ada respon yang diberikan oleh RSPO. Tentu RSPO perlu mengetahui bahwa kedudukan audit BPK memiliki kekuatan hukum yang kuat, sedikitnya diback-up oleh dua peraturan perundangan setingkat Undang-Undang, yang di antaranya mengatur bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk

Universitas Indonesia

menindaklanjuti rekomendasi BPK yang disampaikan dalam laporan hasil audit, dikenakan pidana penjara dan denda.

Kembali lagi kepada kepatuhan Cargill dalam membayar secara penuh atas ganti rugi tegakan kayu yang dilakukan oleh PT Hindoli tersebut, perlu kembali dijelaskan di sini bahwa dalam laporan BPK RI tertanggal 15 Januari 2010 tersebut, diungkapkan bahwa Kementerian Kehutanan telah meminta bantuan POLRI melalui surat tertanggal 9 Agustus 2005 dan 4 Agustus 2009 (berselang hingga empat tahun) perihal perintah pembayaran ganti rugi tegakan sebesar Rp 5,41 miliar.

Setelah surat kedua Menteri Kehutanan pada 9 Agustus 2009 tersebut, PT Hindoli melakukan pembayaran ganti rugi tegakan tersebut pada tanggal 27 Agustus 2009 sebesar Rp 5,41 miliar.

Namun, berdasarkan laporan audit BPK tertanggal 15 Januari 2010 tersebut, BPK mengungkapkan bahwa nilai ganti rugi tegakan kayu yang seharusnya dibayarkan oleh PT Hindoli adalah sebesar Rp 9,66 miliar, bukan RP 5,41 miliar.

Sehingga, BPK meminta Kementerian Kehutanan untuk membuat surat perintah pembayaran kembali kepada PT Hindoli untuk membayar sebesar Rp 4,25 miliar lagi.

Mulai Agustus 2010, Greenomics mendesak PT Hindoli untuk membayar ganti rugi kayu tersebut secara penuh melalui kampanye media dan advokasi langsung kepada pihak Kementerian Kehutanan. Dalam hal ini, Kementerian Kehutanan sangat responsif.

Pada tanggal 7 September 2010, pihak Kementerian Kehutanan mengeluarkan surat perintah pembayaran kepada PT Hindoli untuk membayar RP 4,25 miliar sesuai laporan audit BPK.

Walaupun PT Hindoli sempat meminta penjelasan atas surat perintah pembayaran tersebut serta meminta pengunduran waktu pembayaran kepada pihak Kementerian Kehutanan, akhirnya pada November 2010, PT Hindoli telah membayar sebesar Rp 4,25 miliar tersebut.

Artinya, anak usaha Grup Cargill ini telah membayar secara penuh -- sesuai laporan audit BPK dimaksud -- yakni sebesar Rp 9,66 miliar (sekitar USD 1 juta).

Pada saat Greenomics mengkonfirmasi soal pembayaran tersebut kepada pejabat berwenang dari Kementerian Kehutanan, pejabat tersebut menjelaskan bahwa verifikasi pembayaran tersebut diperoleh pada Februari 2011, dan hasil rekap finalnya pada akhir Desember 2011.

Artinya, Greenomics belum terlambat untuk mengekspos kepatuhan PT Hindoli dalam pembayaran ini serta juga belum terlambat bagi Greenomics untuk memberikan apresiasi atas kepatuhan anak usaha sawit Grup Cargill tersebut.***

http://news.mongabay.com/2012/0223-hindoli_fine_palm_oil.html

Lampiran 11: Wawancara dengan Mantan Pejabat BPK RI

Narasumber : Mantan Pejabat BPK RI

Tanggal wawancara: 21 Januari 2012 jam 19.46

Tempat : melalui telepon

B: Kalau mengenai audit BPK, instansi terkait mengetahui tidak sedang dilakukannya sebuah audit dari BPK?

A : Iya, dia mengetahui laporannya.

B: Maksudnya....pada saat proses dilakukannya audit, instansi terkait mengetahui atau tidak kalau BPK sedang melakukan sebuah audit? Sebelum hasilnya menjadi laporan audit BPK, misalnya pada PT.Hindoli yang terkait dengan kinerja Kemenhut, apakah Kemenhut selaku instansi terkait tahu pada saat proses pembuatan audit ini?

A : Oh tahu, nanti kan laporannya diberikan ke mereka.

B: BPK membuat ini dasarnya dari apa, pak?

A : Itu dari BPK sendiri, dia bebas menentukan instansi mana yang mau di audit.

B: Maksud saya...misalnya; kasus PT.Hindoli, BPK mengetahui dari mana? Kalau PT.Hindoli dikatakan bermasalah dengan konversi lahan.

A: Dari Kementerian Kehutanan , misalnya PT. itu bermasalah, nanti kan BPK memeriksa, kehutanan yang menyelesaikan...memberitahukannya.

B: Jadi...BPK tahu adanya konversi lahan dan sebagainya itu awalnya BPK mengetahui dari instansi terkait?

Universitas Indonesia

A: Ya dari data yang ada dari Kehutanan, ada kontrak misalnya, misalnya kontrak masalah ini dengan siapa, pekerjaan A dengan PT. ini, kontrak pengadaan lahan misalnya dengan PT.A.

B :Kalau PT yang bersangkutan sendiri mengetahui atau tidak sedang dilakukannya audit dari BPK?

A: Ya mengetahui dari departemen kehutanannya, bukan dari BPK. Tapi biasanya kalau ada masalah seperti itu BPK juga mengkonfirmasi ke perusahaan yang bersangkutan.

B: Kalau setiap laporan BPK itu apakah semuanya masuk ke DPR atau diseleksi dulu yang mana yang masuknya?

A : Ya semuanya masuk ke DPR, disampaikan ke DPR, tapi tidak secara parsial, di gabung dengan instansi lainnya selama satu semester. Masuk ke DPR kan satu semester sekali.

B : Oh....berarti laporannya yang bulan maret dan September itu, ya?

A : Iya, kira-kira bulan itulah, setiap semester dilaporkan.

B: Kalau audit 15 januari 2010, berarti dia masuknya ke semester yang mana, Maret atau September 2010?

A : Itu kalau auditnya bulan Januari nanti mungkin masuknya di September atau Oktober 2010 disampaikannya ke DPR.

B: Oh...berarti semester kedua IHPS 2010.

A : Iya di semester dua disampaikannya ke DPR.

B : Kalau dalam laporan ini PT.Hindoli disebutkan harus ganti rugi, nanti uangnya masuknya ke kas negara?

A: Iya, masuk ke kas negara, nanti melalui kementerian kehutanan yang menagih berdasarkan rekomendasi dari BPK. Kemudian jika dibayarkan nanti disetor ke kas negara. Masuk ke penerimaan non pajak, dari penggantian kerugian itu kategorinya kan ke penerimaan bukan pajak atau istilahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

B: Bagaimana mekanisme kerja BPK setelah audit dilakukan?

A: Mekanisme sederhananya setelah selesai audit, BPK menyampaikan laporannya antara lain ke kementerian yang bersangkutan dan setiap enam bulan sekali BPK menyampaikan ke DPR, rangkuman dari semua hasil audit selama satu semester. Nanti DPR berdasarkan informasi dari IHPS itu biasanya memanggil menteri kehutanan untuk menanyakan apakah rekomendasi dari BPK sudah ditindaklanjuti atau belum. Menteri kehutanan begitu menerima laporan dari BPK kan ada masalah-masalah, dia segera menindaklanjuti, kalau ada pihak-pihak yang harus mengganti atau dituntut ganti rugi ya...di tagih oleh departemen tersebut, kemudian denda dibayarkan masuk ke kas negara dengan kategori PNBP.

B: Saya ingin mengetahui kira-kira BPK tahu ada konversi lahan oleh PT.Hindoli itu darimana sumbernya?

O : Biasanya dari kontraknya, kan begitu ada kontrak dokumennya bermacam-macam, salah satunya dokumen kontrak, misalnya; kontrak pengadaan lahan dengan PT.Hindoli, misalkan; pengadaan lahan 1000 Ha, terus oleh BPK selain diperiksa kontraknya, bukti pembayarannya, cek fisik ke lapangan, terus misalnya saja, dari 1000 Ha, cuma ada 800 Ha, jadi yang 200 Ha ini kan harus di ganti, di bayarnya 1000 Ha lahannya yang ada cuma 800 Ha. Yang 200-nya dikalikan berapa ya itu harus dikembalikan, di setor, jadi BPK mengetahui ini dari kontrak-kontrak yang ada di kementerian kehutanan. Misalnya dari pengeluaran-pengeluaran itu kan ada bukti-buktinya, bukti pengeluaran dan dokumen pendukungnya, antara lain; kontrak-

kontrak itu selain kuitansi pembayaran, ada surat perjanjian, disitulah diketahui PT. ini PT. itu.

B: Terimakasih banyak, Pak!

Keterangan:

A: Narasumber

B: Bilqis Fitria Salsabiela

Daftar Pertanyaan:

1. Darimana BPK mengetahui adanya kasus konversi lahan sawit dari PT.Hindoli?
2. Bagaimana mekanisme kerja BPK setelah dilakukannya audit?



Universitas Indonesia